

INDEKS KUALITAS KELUARGA TAHUN 2020



KERJASAMA KEMENTERIAN PEMBERDAYAAN PEREMPUAN
DAN PERLINDUNGAN ANAK - REPUBLIK INDONESIA DENGAN
BADAN PUSAT STATISTIK
TAHUN 2021





KEMENTERIAN
PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

INDEKS KUALITAS KELUARGA TAHUN 2020

ISBN:
978 - 602 - 6571 - 50 - 2

Diterbitkan oleh:

Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15, RT. 2/RW. 3
Gambir, Kecamatan Gambir, Kota Jakarta Pusat,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta 10160

SAMBUTAN

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK

Salam Sejahtera Untuk Kita Semua.



Isu gender masih menjadi isu penting dalam kehidupan masyarakat, berbagai ketimpangan dan ketidakadilan gender masih terus terjadi pada semua aspek kehidupan baik di ranah domestik (keluarga) maupun publik. Persoalan gender dalam keluarga seringkali disebabkan oleh konstruksi sosial dan kultural yang dipahami dan dianut oleh masyarakat yang tidak didasarkan pada asas kesetaraan gender. Pemahaman tentang subyek atau obyek, dominan atau tidak dominan, superior atau imperior serta pembagian peran yang tidak seimbang antara anggota keluarga laki-laki (ayah, anak laki-laki) dan perempuan (ibu, anak perempuan) seringkali memposisikan laki-laki mendapatkan hak-hak istimewa, dibandingkan perempuan (ibu, anak perempuan).

Selain itu, persoalan anak dalam upaya pemenuhan hak anak dan perlindungan anak juga menjadi salah satu tantangan tersendiri. Di dalam sebuah keluarga, setiap orang tua mempunyai kewajiban dan tanggung jawab terhadap hak-hak seorang anak dan lingkungannya. Tanggung jawab orang tua sebagai anggota masyarakat wajib menciptakan lingkungan yang kondusif untuk tumbuh dan kembang anak-anaknya serta keluarga harus menjadi lembaga yang pertama dan utama dalam perlindungan anak.

Upaya Pembangunan Kualitas Keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan perlindungan anak merupakan sebuah keniscayaan yang patut kita upayakan bersama guna menjawab berbagai tantangan yang ada. Indeks Kualitas Keluarga sebagai indikator keberhasilan pembangunan kualitas keluarga pada publikasi ini diharapkan dapat kita jadikan sebagai bahan evaluasi bersama untuk membangun strategi pembangunan strategi kualitas keluarga yang lebih optimal kedepannya.

Terima kasih dan apresiasi yang tinggi disampaikan kepada Kepala Badan Pusat Statistik dan jajarannya, terutama Deputi Bidang Statistik Sosial, Direktorat Statistik Kesejahteraan Rakyat atas kerjasama yang baik dalam perhitungan Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2020 ini. Serta tak lupa kami juga ucapkan terima kasih kepada Tim dari Departemen Ilmu Keluarga dan Konsumen, Fakultas Ekologi Manusia, Institut Pertanian Bogor dan seluruh pihak yang terlibat dalam penyusunan Publikasi ini. Semoga dengan sinergi yang kuat dari seluruh pemangku kepentingan dalam upaya Pembangunan Kualitas Keluarga yang semakin baik dapat kita wujudkan demi Indonesia yang semakin maju.

Perempuan berdaya, Anak terlindungi, Indonesia maju.

Jakarta, Februari 2022

MENTERI PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK REPUBLIK INDONESIA

I GUSTI AYU BINTANG DARMAWATI

KATA PENGANTAR



Indonesia telah memiliki kebijakan terkait keluarga sejak disahkannya Undang-Undang (UU) Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 diikuti UU Nomor 10 Tahun 1992 yang kemudian diubah menjadi UU No 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga. Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) sebagai salah satu Kementerian yang membidangi urusan perempuan dan anak juga telah menerbitkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 6 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.

Pada Permen PPPA Nomor 6 Tahun 2013 tersebut, konsep yang dibangun adalah Ketahanan dan Kesejahteraan Keluarga yang mencakup 5 (lima) Dimensi, 15 Variabel dan 24 Indikator yang kemudian diukur secara komposit dari berbagai data hasil survei yang relevan dan tersedia di Badan Pusat Statistik (BPS) untuk menghasilkan Indeks Ketahanan Keluarga (IKK). Namun, dengan hadirnya UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pada Urusan PPPA, Sub Urusan Kualitas Keluarga, saat ini konsep ketahanan dan kesejahteraan keluarga tersebut bergeser menjadi kualitas keluarga, khususnya kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak.

Dengan adanya perubahan konsep menjadi kualitas keluarga tersebut, Indikator yang menjadi tolok ukur keberhasilannya juga berubah menjadi Indeks Kualitas Keluarga (IKK) yang terdiri dari **29** Indikator yang di bagi menjadi 5 (lima) dimensi. Kelima dimensi tersebut adalah **(1) Kualitas Legalitas-Struktur** (3 indikator); **(2) Kualitas Ketahanan Fisik** (6 indikator); **(3) Kualitas Ketahanan Ekonomi** (8 indikator); **(4) Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi** (6 indikator) dan **(5) Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya** (6 indikator).

Guna mengukur capaian dan kemajuan pembangunan kualitas keluarga, Kementerian PPPA bekerja sama dengan BPS telah menghitung capaian IKK Tahun 2020 dan menyusun publikasinya. Publikasi IKK ini diharapkan dapat digunakan sebagai *baseline* data dalam menyusun kebijakan, program dan kegiatan pembangunan kualitas keluarga bagi pemerintah pusat dan daerah serta seluruh pemangku kepentingan pada periode-periode berikutnya.

Selanjutnya atas nama Kementerian PPPA, kami mengucapkan terima kasih kepada BPS dan semua pihak yang telah berkontribusi dalam proses perhitungan dan penyusunan IKK 2020 sehingga publikasinya dapat diselesaikan dengan baik. Adapun kritik dan saran yang membangun untuk publikasi IKK yang lebih baik di tahun-tahun mendatang sangat diharapkan.

Jakarta, Desember 2021

Plt. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat,



Indra Gunawan

INDEKS KUALITAS KELUARGA TAHUN 2020

Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia dengan Badan Pusat Statistik

TIM PENYUSUN

Pengarah

Indra Gunawan (Kemen PPPA)
Ateng Hartono (BPS)

Penanggung Jawab Umum

Prijadi Santoso (Kemen PPPA)
Lies Rosdianty (Kemen PPPA)
Ateng Hartono (BPS)

Penanggung Jawab Teknis

Maya Septiyana (Kemen PPPA)
Sylvianti Angraini (Kemen PPPA)
Amiek Chamami (BPS)

Editor

M. Soleh
Fikhi Akbar
Ahmad
Ika Sari Nur Laili R.
Permata Putri Ismah A.

Penulis

Herien Puspitawati (IPB)
Ma'mun Sarma (IPB)
Deddy Cahyadi Sutarman (IPB)

Pengolah Data

Nur Sahrizal (BPS)	Asnita (BPS)
Maarif Ibnu Khoer (BPS)	Widya Larasati (BPS)
Idha Sahara (BPS)	Arum (BPS)
Ofi Ana Sari (BPS)	Sumardiyanto (BPS)
Hasti Amanda (BPS)	Nurhayati (Kemen PPPA)
Dhani (BPS)	Indah Lukitasari (Kemen PPPA)
Gaib (BPS)	

Layout

Nadhila Prameswari
Chusnul Nisa'i
Amaranti Sih Utami

SINGKATAN

AHP	: <i>Analytical Hierarchy Process.</i>
ART	: Anggota Rumah Tangga.
BPS	: Badan Pusat Statistik.
BPJS	: Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial.
FGD	: <i>Focus Group Discussion.</i>
KG	: Kesetaraan Gender.
Kemen PPPA	: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
IKK (Lama)	: Indeks Ketahanan Keluarga Tahun 2016 yang terdiri atas 24 indikator dan 6 dimensi.
IKK (Baru)	: Indeks Kualitas Keluarga Tahun 2020 yang terdiri atas 25 indikator dan 5 dimensi.
KLS	: Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur.
KKF	: Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik.
KKE	: Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi.
KKSP	: Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi.
KKSB	: Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya.
IPB University	: Institut Pertanian Bogor.
SMART	: <i>Simple, Measureable, Attainable, Rational, Timeable.</i>
SUSENAS	: Survei Sosial Ekonomi Nasional.
KP 2020	: Susenas -Konsumsi Pengeluaran Tahun 2020.
MSBP 2020	: Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan Tahun 2020.
Hansos 2020	: Susenas Modul Ketahanan Sosial Tahun 2020.
OPD	: Organisasi Perangkat Daerah.

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	2
KATA PENGANTAR	3
TIM PENYUSUN	4
SINGKATAN	5
DAFTAR ISI	6
DAFTAR TABEL	8
DAFTAR GAMBAR	8
DAFTAR LAMPIRAN	11
RINGKASAN EKSEKUTIF	13
BAB I PENDAHULUAN	17
1. Latar Belakang	17
2. Landasan Hukum	18
3. Tujuan	18
4. Sistematika Penyajian IKK Tahun 2020	19
BAB II PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KELUARGA (IKK)	20
1. Konsep Keluarga	20
2. Konsep Kualitas Keluarga	20
3. Sejarah Penghitungan IKK oleh BPS	21
BAB III METODE PENGHITUNGAN INDEKS KUALITAS KELUARGA (IKK)	22
1. Proses Penghitungan IKK Tahun 2020	22
2. Dimensi dan Indikator IKK Tahun 2020	23
3. Metadata dan Sumber Data	25
4. Metode Penghitungan Dimensi	26
5. Metode Penghitungan IKK Terbobot AHP	26
6. Kategorisasi IKK	27
BAB IV REKAPITULASI INDIKATOR DAN DIMENSI PEMBENTUK IKK TAHUN 2020	28
BAB V DIMENSI KUALITAS LEGALITAS-STRUKTUR (KLS) TAHUN 2020	31
1. Akta Kelahiran Anak	31
2. Tinggal Bersama.	32
BAB VI DIMENSI KUALITAS KETAHANAN FISIK (KKF) TAHUN 2020	34
1. Makanan Sehat Bergizi	34
2. Keluhan Kesehatan.	36
3. Prevalensi Kurang Gizi	38
4. Ruang Tidur Terpisah Antara Orangtua dan Anak	40
5. Anak Merokok	42
6. Sakit Hingga Terganggu.	44
BAB VII DIMENSI KUALITAS KETAHANAN EKONOMI (KKE) TAHUN 2020	46
1. Memiliki Rumah	46
2. Memiliki Penghasilan Cukup/Tidak Miskin.	48
3. Memiliki Rekening Tabungan	50
4. Memiliki Asuransi Kesehatan.	52
5. Anak Putus Sekolah	54
6. Perempuan Bekerja.	56

BAB VIII DIMENSI KUALITAS KETAHANAN SOSIAL-PSIKOLOGI (KKSP) TAHUN 2020	58
1. Kekerasan Terhadap Anak	58
2. Menjadi Korban Kejahatan.	60
3. Bepergian	62
4. Kegiatan Bersama Anak dan Orangtua (Ayah)..	64
5. Kegiatan Bersama Anak dan Orangtua (Ibu).	64
BAB IX DIMENSI KUALITAS KETAHANAN SOSIAL-BUDAYA (KKSb) TAHUN 2020	66
1. Perkawinan Usia Anak	66
2. Memiliki Tempat Cuci Tangan.	68
3. Melakukan Kegiatan Sosial	70
4. Ada Lansia Dalam Rumah Tangga..	72
5. Melakukan Kegiatan Keagamaan.	74
6. Mengakses Internet Bersama Anak dan Orang Tua.	76
BAB X INDEKS KUALITAS KELUARGA (IKK) TAHUN 2020	78
1. Penghitungan Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020	78
2. Analisis Web per dimensi pembentuk IKK Tahun 2020.	92
3. Penghitungan IKK Terbobot AHP Tahun 2020	128
BAB XI TANTANGAN INTERVENSI RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA	132
1. Intervensi yang Dibutuhkan	132
2. Koordinasi dan Sinergi Antar Kementerian/Lembaga	133
3. Koordinasi dan Sinergi Antar Kementerian/Lembaga Antar OPD di Daerah	134
BAB XII KESIMPULAN DAN SARAN	135
1. Kesimpulan	135
2. Saran.	136
BAB XIII DAFTAR PUSTAKA	137
LAMPIRAN	138

DAFTAR TABEL

NO	NAMA TABEL	HALAMAN
Tabel 5.1.	Rekapitulasi Indikator Positif Pembentuk IKK Tahun 2020 Beserta Provinsi yang mempunyai Nilai Tertinggi dan Terendah.	28
Tabel 5.2.	Rekapitulasi Indikator Negatif Pembentuk IKK Tahun 2020 Beserta Provinsi yang mempunyai Nilai Tertinggi dan Terendah.	29
Tabel 5.3.	Rekapitulasi Dimensi Pembentuk IKK dan IKK Tahun 2020 Beserta Provinsi yang mempunyai Nilai Tertinggi dan Terendah	30
Tabel 10.1	Penghitungan capaian per dimensi pembentuk IKK Tahun 2020.	79
Tabel 10.2	Rekapitulasi Urutan Tertinggi dan Terendah Dimensi Pembentuk IKK Per Provinsi	81
Tabel 10.3	Rekapitulasi Kategorisasi IKK Berdasarkan Dimensi Untuk Provinsi dan Indonesia Tahun 2020.	82
Tabel 10.4	Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)	84
Tabel 10.5	Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF).	86
Tabel 10.6	Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)	88
Tabel 10.7	Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP).	90
Tabel 10.8	Provinsi Berdasarkan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSb).	92
Tabel 10.9	Penghitungan IKK terbobot AHP Tahun 2020.	128
Tabel 10.10	Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Nilai IKK Terbobot AHP Tahun 2020.	131

DAFTAR GAMBAR

NO	NAMA GAMBAR	HALAMAN
Gambar 1.1.	Sistematika Penyajian IKK Tahun 2020.	19
Gambar 3.1	Indikator dan Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) dan Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF).	24
Gambar 3.2	Indikator dan Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP).	24
Gambar 3.3	Indikator dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSb).	25
Gambar 3.4	Hasil Pembobotan Dimensi (Seluruh responden)	27

NO	NAMA GAMBAR	HALAMAN
Gambar 5.1	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun memiliki Tahun 2020.	31
Gambar 5.2	Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan Tahun 2020	33
Gambar 6.1	Persentase rumah tangga yang tidak ada saat di mana anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya Tahun 2020.	35
Gambar 6.2	Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan Tahun 2020.	37
Gambar 6.3	Prevalensi kurang gizi untuk semua umur Tahun 2020.	39
Gambar 6.4	Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak Tahun 2020.	41
Gambar 6.5	Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok Tahun 2020.	43
Gambar 6.6	Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu) Tahun 2020.	45
Gambar 7.1	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah Tahun 2020.	47
Gambar 7.2	Persentase rumah tangga tidak miskin Tahun 2020.	49
Gambar 7.3	Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan Tahun 2020.	51
Gambar 7.4	Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya) Tahun 2020.	53
Gambar 7.5	Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah Tahun 2020.	55
Gambar 7.6	Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja Tahun 2020	57
Gambar 8.1	Kekerasan terhadap anak Tahun 2020.	59
Gambar 8.2	Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan Tahun 2020.	61
Gambar 8.3	Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir Tahun 2020.	63
Gambar 8.4	Persentase rumah tangga yang ada ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua Tahun 2020.	65
Gambar 9.1	Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak Tahun 2020.	67
Gambar 9.2	Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap Tahun 2020.	69
Gambar 9.3	Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial Tahun 2020.	71
Gambar 9.4	Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+	73

NO	NAMA GAMBAR	HALAMAN
Gambar 9.5	Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan Tahun 2020.	75
Gambar 9.6	Persentase rumah tangga yang ada ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam mengakses internet Tahun 2020.	77
Gambar 10.1a	Dimensi KLS pembentuk IKK Tahun 2020	83
Gambar 10.1b	Dimensi KKF pembentuk IKK Tahun 2020.	85
Gambar 10.1c	Dimensi KKE pembentuk IKK Tahun 2020.	87
Gambar 10.1d	Dimensi KKSP pembentuk IKK Tahun 2020.	89
Gambar 10.1e	Dimensi KKSBB pembentuk IKK untuk Indonesia Tahun 2020.	91
Gambar 10.2a	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Indonesia Tahun 2020.	93
Gambar 10.2b	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Aceh Tahun 2020	94
Gambar 10.2c	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020	95
Gambar 10.2d	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020	96
Gambar 10.2e	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Riau Tahun 2020	97
Gambar 10.2f	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jambi Tahun 2020	98
Gambar 10.2g	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020	99
Gambar 10.2h	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Bengkulu Tahun 2020	100
Gambar 10.2i	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Lampung Tahun 2020	101
Gambar 10.2j	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020	102
Gambar 10.2k	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020	103
Gambar 10.2l	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020	104
Gambar 10.2m	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020	105
Gambar 10.2n	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020	106
Gambar 10.2o	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020	107
Gambar 10.2p	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jawa Timur Tahun 2020	108
Gambar 10.2q	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Banten Tahun 2020	109
Gambar 10.2r	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Bali	110

NO	NAMA GAMBAR	HALAMAN
	Tahun 2020	
Gambar 10.2s	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020	111
Gambar 10.2t	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020	112
Gambar 10.2u	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020	113
Gambar 10.2v	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020	114
Gambar 10.2w	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020	115
Gambar 10.2x	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020	116
Gambar 10.2y	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020	117
Gambar 10.2z	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020	118
Gambar 10.2aa	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020	119
Gambar 10.2ab	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020	120
Gambar 10.2ac	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020	121
Gambar 10.2ad	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Gorontalo Tahun 2020	122
Gambar 10.2ae	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020	123
Gambar 10.2af	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Maluku Tahun 2020	124
Gambar 10.2ag	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Maluku Utara Tahun 2020	125
Gambar 10.2ah	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Papua Barat Tahun 2020	126
Gambar 10.2ai	Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Papua Tahun 2020	127
Gambar 10.3	IKK terbobot AHP per provinsi Tahun 2020.	130

DAFTAR LAMPIRAN

NO	NAMA LAMPIRAN	HALAMAN
Lampiran 1	Metadata 25 Indikator Pembentuk IKK Desember 2020 (BPS, 2021).	139
Lampiran 2	Data Indikator Pembentuk Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS).	163

Lampiran 3	Data Indikator Pembentuk Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF).	164
Lampiran 4	Data Indikator Pembentuk Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE).	166
Lampiran 5	Data Indikator Pembentuk Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP).	168
Lampiran 6	Data Indikator Pembentuk Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSb).	170
Lampiran 7	Data Dimensi Pembentuk IKK Terbobot AHP.	172

RINGKASAN EKSEKUTIF

Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. IKK merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di Indonesia dan menjadi tolok ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota. Penghitungan IKK Tahun 2020 dilakukan atas Kerjasama Kemen PPPA dan BPS dengan menggunakan ketersediaan data BPS.

Landasan hukum Kebijakan Pembangunan Kualitas Keluarga meliputi Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara, Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, dan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Tujuan umum buku ini adalah untuk menyajikan penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2020 per Provinsi di Indonesia. Adapun tujuan khususnya adalah untuk rekapitulasi capaian indikator dan dimensi pembentuk IKK Tahun 2020, menyajikan capaian 25 indikator pembentuk IKK per provinsi Tahun 2020, menyajikan capaian 5 (lima) dimensi pembentuk IKK per provinsi Tahun 2020, menyajikan analisis web terhadap capaian kelima dimensi pembentuk IKK per provinsi Tahun 2020, dan menyajikan penghitungan IKK terbobot AHP per provinsi Tahun 2020.

Sistematika penyajian IKK Tahun 2020 ditunjukkan melalui 13 Bab meliputi Bab I sampai III: Pendahuluan, Pengukuran IKK dan Metode; Bab IV. Rekapitulasi Indikator dan Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020; Bab V sampai IX menjelaskan Tingkat Indikator dan Dimensinya; Bab X. Penghitungan Dimensi dan IKK; Bab XI. Tantangan Intervensi; dan Bab XII. Kesimpulan dan Saran.

Konsep Keluarga yang digunakan merujuk pada definisi keluarga yang dituliskan dalam Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa Keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Secara formal, definisi keluarga berkualitas merujuk pada UU Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa Keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki

jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa..

Penyusunan Indeks Kualitas Keluarga mengikuti kaidah metode kontrol kualitas alat ukur (reliabilitas dan validitas) yang diuji melakukan survei *online* dengan menganalisis sebanyak 6507 sampel non-probability sampling dari 34 provinsi pada bulan Maret-April Tahun 2021 (Laporan Kemen PPPA, 2021a).

Sejarah Penghitungan IKK sudah tiga kali dilakukan Kemen PPPA bekerjasama dengan Badan Pusat Statistik dengan menggunakan data Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas). Adapun penghitungan indeks tersebut meliputi: (1) Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Tahun 2016 yang terdiri atas 24 indikator dan 6 dimensi (Kemen PPPA & BPS, 2016); (2) Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2019 yang terdiri atas 24 indikator dan 5 dimensi (Kemen PPPA & BPS, 2019); dan (3) Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2020 yang terdiri atas 25 indikator dan 5 dimensi (Kemen PPPA & BPS, 2021).

Proses penghitungan IKK Tahun 2020 melalui proses yang cukup panjang dengan berbagai tahapan. Hasil penghitungan IKK Tahun 2020 menggambarkan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender dan hak anak. Terdapat 25 Indikator dan 5 (lima) Dimensi pembentuk IKK Tahun 2020 (Kemen PPPA & BPS, 2021a) adalah: (1) Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) terdiri atas 2 indikator yaitu memiliki akta kelahiran anak, dan keluarga tinggal bersama; (2) Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) terdiri atas 6 indikator yaitu makan makanan sehat bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, tempat tidur terpisah antara orangtua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu; (3) Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas 6 indikator yaitu memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi Kesehatan, anak putus sekolah, dan perempuan bekerja; (4) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas 5 indikator yaitu kekerasan terhadap Anak, menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orangtua (indikator dobel); dan (5) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKS) terdiri atas 6 indikator yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, tinggal bersama lansia, melakukan kegiatan keagamaan, dan adanya akses internet.

Data yang digunakan untuk mengukur IKK Tahun 2020 berasal dari berbagai sumber data BPS (BPS, 2021) yaitu dari: (1) Susenas KOR 2020, (2) Susenas untuk Pencacahan Konsumsi Pengeluaran (KP) 2020, (3) Susenas Modul Sosial Budaya dan Pendidikan (MSBP) 2018, dan (4) Susenas Modul Ketahanan Sosial (Hansos) 2020.

Dimensi pembentuk IKK dihitung berdasarkan rata-rata jumlah indikator pembentuk masing-masing dimensi. Pembobotan 29 Indikator asal dari konsep Kualitas Keluarga dilakukan dengan menggunakan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) yaitu dengan memberikan

kuesioner kepada para pakar atau narasumber dari berbagai stakeholder dan dilanjutkan dengan diskusi mendalam (Kemen PPPA-RI, 2021b).

IKK dapat dikategorikan sebagai berikut (Kemen PPPA, 2021c): (1) Indeks Kualitas Keluarga yang kurang responsif gender dan hak anak apabila nilai kurang atau di bawah 50,00; (2) Indeks Kualitas Keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak apabila nilai antara 50,00 – 75,00; dan (3) Indeks Kualitas Keluarga yang responsif gender dan hak anak apabila nilai di atas 75,00.

Rekapitulasi atau ringkasan hasil indikator dan dimensi pembentuk IKK menunjukkan posisi suatu provinsi yang mempunyai nilai IKK tertinggi dan terendah untuk setiap indikator pembentuk IKK. Rekapitulasi dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok indikator pembentuk IKK yaitu indikator positif dan indikator negatif. Terdapat 17 indikator positif pembentuk IKK. Nilai tertinggi untuk indikator positif sebanyak 4 (empat) kali berada di Provinsi Bali. Adapun nilai terendah untuk indikator positif sebanyak 5 (lima) kali berada di Provinsi Papua dan DI Yogyakarta. Terdapat 8 (delapan) indikator negatif pembentuk IKK. Nilai tertinggi untuk indikator negatif sebanyak 2 (dua) kali berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat (NTB). Adapun nilai terendah untuk indikator negatif sebanyak 2 (dua) kali berada di Provinsi Papua, Bali dan DKI Jakarta.

Penghitungan IKK dilakukan berdasarkan komposit kelima dimensi dengan pembobotan metode AHP. Diketahui bahwa semua nilai IKK per provinsi berada pada kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Hasil menunjukkan bahwa nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Terbobot AHP Tahun 2020 di Indonesia adalah 68,13. Terdapat 13 Provinsi atau 38 persen yang mempunyai nilai IKK yang lebih tinggi dari Indonesia. Sisanya, terdapat 21 provinsi atau 62 persen yang mempunyai nilai IKK yang lebih rendah dari Indonesia.

Berdasarkan analisis per dimensi pembentuk IKK, diketahui bahwa nilai tertinggi untuk setiap dimensi tersebar di berbagai Provinsi seperti Provinsi Jawa Timur, Kepulauan Riau, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan DKI Jakarta. Adapun nilai terendah untuk tingkatan dimensi sebanyak 3 (kali) berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur (NTT). Sehingga, secara keseluruhan nilai IKK tahun 2020 tertinggi berada di Provinsi Bali dan terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai nilai IKK adalah Provinsi Bali, Jambi, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah. Adapun 5 (lima) provinsi terendah yang mempunyai nilai IKK adalah Provinsi NTT, Maluku, Maluku Utara, NTB dan Sulawesi Tenggara.

Berdasarkan nilai capaian indikator dan dimensi pembentuk IKK Tahun 2020 di tingkat provinsi dan nasional, maka dapat diketahui potensi dan permasalahan keluarga yang dapat dipertimbangkan untuk menyusun rencana aksi. Oleh karena itu perlu Koordinasi dan Sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan antar OPD di Pemerintah Daerah.



BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi pemerintah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga untuk mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. IKK merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan keluarga di Indonesia dan menjadi tolak ukur atau basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan keluarga di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan pemerintah daerah kabupaten/kota.

Kebijakan pembangunan keluarga merupakan amanah utama dari Undang-Undang (UU) Nomor 52 Tahun 2009 yang kemudian menjadi dasar penyusunan Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak (Permen PPPA) Nomor 06 Tahun 2013 Tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga. Setahun kemudian lahir Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan pada Bagian H adanya Pembagian Urusan Pemerintahan Bidang Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak mengenai Sub Urusan Nomor 3 yaitu Kualitas Keluarga. Disebutkan bahwa kewenangan pemerintah pusat salah satunya adalah peningkatan kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak tingkat nasional.

Permen PPPA Nomor 2 Tahun 2020 Tentang Rencana Strategis Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Tahun 2020-2024 menyebutkan bahwa salah satu upaya pencapaian Visi dan Misi Kemen PPPA adalah **“Meningkatkan Partisipasi Masyarakat dan Kualitas Keluarga dalam Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak”**. Dengan demikian, salah satu capaian sasaran strategis ini diukur dengan indikator kinerja sasaran strategis yaitu Indeks Kualitas Keluarga (IKK). Dalam rangka mencapai sasaran strategis, maka perlu untuk menyusun Indikator Kualitas Keluarga (IKK) dan menghitung IKK sebagai capaian kinerja pembangunan kualitas keluarga.

Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021) merupakan pengembangan dari penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (Permen PPPA, 2013). Terjadi perubahan nama indeks yang membawa konsekuensi perubahan indikator dari ketahanan keluarga menjadi kualitas keluarga. Penyusunan Indikator Ketahanan Keluarga (Kemen PPPA-RI, 2013, 2016) didasarkan atas 24 Pertanyaan dan 6 dimensi, sedangkan penyusunan Indikator Kualitas Keluarga didasarkan atas 29 Pertanyaan dan 5 dimensi (Kemen PPPA-RI, 2021a). Penghitungan IKK Tahun 2020 dilakukan atas Kerjasama Kemen PPPA dan BPS dengan menggunakan ketersediaan data BPS. Hasil penghitungan IKK Tahun 2020 menggambarkan

kualitas keluarga yang berkesetaraan gender dan pemenuhan hak anak melalui pencapaian 5 (lima) dimensi dan 25 indikator pembentuk IKK yaitu:

- a. Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS sebanyak 2 indikator).
- b. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF sebanyak 6 indikator).
- c. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE sebanyak 6 indikator).
- d. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP sebanyak 5 indikator).
- e. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSBB sebanyak 6 indikator).

2. Landasan Hukum

Landasan hukum kebijakan pembangunan kualitas keluarga meliputi:

- a. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- b. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916).
- c. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5080).
- d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
- e. Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573).
- f. Peraturan Presiden Nomor 65 Tahun 2020 tentang Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 133).
- g. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 887).

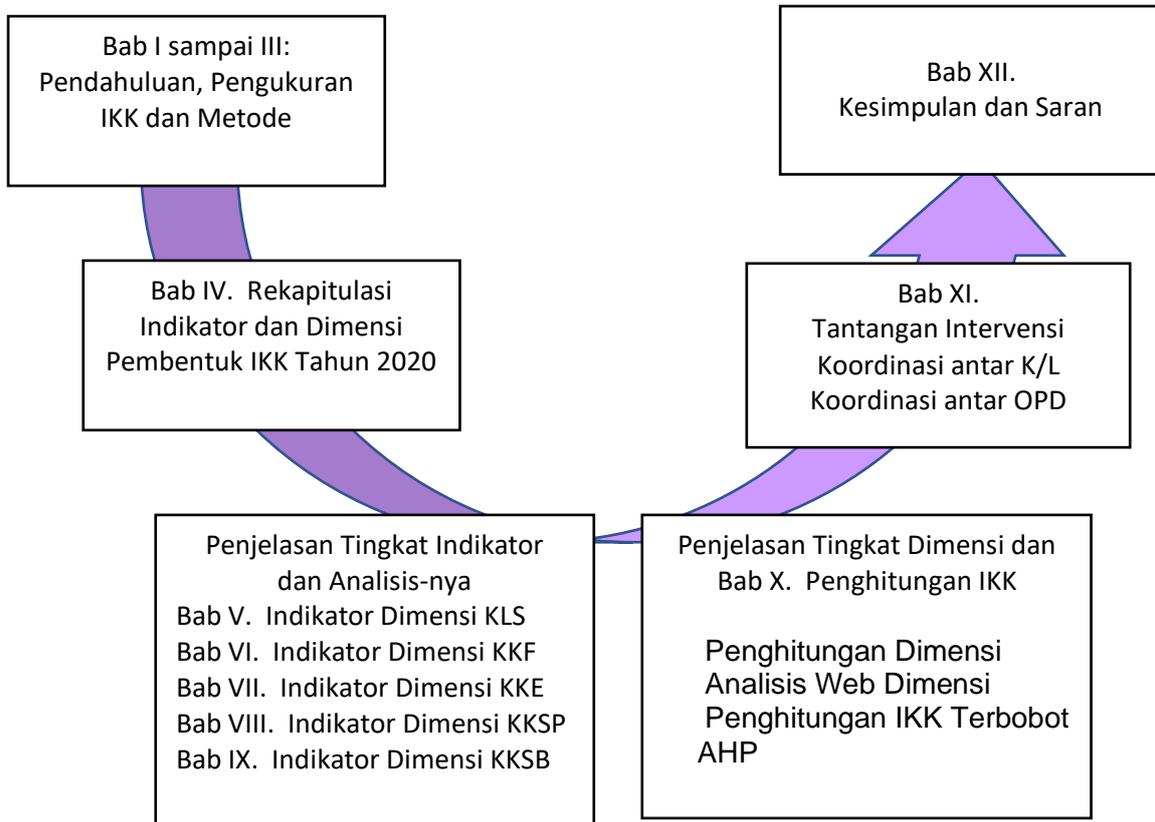
3. Tujuan

Tujuan umum buku ini adalah untuk menyajikan penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2020 per Provinsi di Indonesia. Adapun tujuan khususnya adalah untuk:

- a. merekapitulasi capaian indikator dan dimensi pembentuk IKK Tahun 2020;
- b. menyajikan capaian 25 indikator pembentuk IKK per provinsi Tahun 2020;
- c. menyajikan capaian 5 (lima) dimensi pembentuk IKK per provinsi Tahun 2020;
- d. menyajikan analisis web terhadap capaian kelima dimensi pembentuk IKK per provinsi Tahun 2020; dan
- e. menyajikan penghitungan IKK terbobot AHP per provinsi Tahun 2020.

4. Sistematika Penyajian IKK 2020

Sistematika penyajian IKK Tahun 2020 ditunjukkan pada gambar berikut ini.



Gambar 1.1. Sistematika Penyajian IKK Tahun 2020.

BAB II

PENGUKURAN INDEKS KUALITAS KELUARGA (IKK)

1. Konsep Keluarga

Keluarga sebagai unit sosial-ekonomi terkecil dalam masyarakat yang merupakan landasan dasar dari semua institusi, merupakan kelompok primer yang terdiri dari dua atau lebih orang yang mempunyai jaringan interaksi interpersonal, hubungan darah, hubungan perkawinan, dan adopsi. Keluarga adalah pencetak kualitas sumber daya manusia, lingkungan pertama dan utama dalam pembinaan tumbuh kembang anak, pusat kegiatan penting berbagai aspek kehidupan dalam menanamkan nilai-nilai moral dan pembentukan kepribadian tiap individu dalam masyarakat.

Definisi keluarga dituliskan dalam UU Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 1 angka 6 yang menyatakan bahwa keluarga adalah unit terkecil dalam masyarakat yang terdiri dari suami istri, atau suami, istri dan anaknya, atau ayah dan anaknya, atau ibu dan anaknya. Unit keluarga menjadi unit pengukuran pembangunan kualitas keluarga yang menjadi landasan kualitas ketahanan sosial masyarakat dan menjadi pilar penyangga pembangunan suatu bangsa.

2. Konsep Kualitas Keluarga

Kebijakan kualitas keluarga merujuk pada amanah UU Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah berkaitan dengan salah satu sub-urusan Kemen PPPA tentang kualitas keluarga dalam mewujudkan kesetaraan gender (KG) dan hak anak. Secara formal, definisi keluarga berkualitas merujuk pada UU Nomor 52 Tahun 2009, Pasal 1 angka 10 yang menyatakan bahwa keluarga berkualitas adalah keluarga yang dibentuk berdasarkan perkawinan yang sah dan bercirikan sejahtera, sehat, maju, mandiri, memiliki jumlah anak yang ideal, berwawasan ke depan, bertanggung jawab, harmonis dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa.

Secara konseptual, definisi keluarga berkualitas di atas berkaitan erat dengan definisi ketahanan dan kesejahteraan keluarga yang tercantum dalam UU Nomor 52 Tahun 2009 Pasal 1 angka 11 yaitu kondisi keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuan fisik materil guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dan keluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan kebahagiaan lahir dan batin. Dengan demikian dapat dimaknai bahwa konten kualitas keluarga merupakan agregat dari ketahanan keluarga, perlindungan anak, kesetaraan dan keadilan gender serta partisipasi keluarga dalam masyarakat.

Prinsip-prinsip dalam menyusun Indeks Kualitas Keluarga (IKK) terdiri atas: (1) Bahwa setiap indikator dan dimensi pembentuk IKK mengikuti prinsip SMART (*Simple, Measureable, Attainable, Rational, Timeable*); (2) Penyusunan IKK mengikuti kaidah metode kontrol kualitas alat ukur (reliabilitas dan validitas) yang diuji melakukan survei online dengan menganalisis sebanyak 6507 sampel *non-probability sampling* dari 34 provinsi pada bulan Maret-April Tahun 2021 (Laporan Kemen PPPA, 2021a), (3) Penyusunan IKK merupakan prioritas kebijakan Kemen PPPA-RI sebagai amanah UU Nomor 23 Tahun 2014; dan (4) unit analisis rumah tangga.

3. Sejarah Penghitungan IKK oleh BPS.

Penghitungan IKK sudah tiga kali dilakukan oleh Badan Pusat Statistik (BPS) bekerjasama dengan Kemen PPPA dengan menggunakan data Susenas. Adapun penghitungan indeks tersebut meliputi: (1) Penghitungan Indeks Ketahanan Keluarga (IKK) Tahun 2016 yang terdiri atas 24 indikator dan 6 dimensi (Kemen PPPA & BPS, 2016); (2) Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2019 yang terdiri atas 24 indikator dan 5 dimensi (Kemen PPPA & BPS, 2019); dan (3) Penghitungan Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2020 yang terdiri atas 25 indikator dan 5 dimensi (Kemen PPPA & BPS, 2021).

BAB III

METODE PENGHITUNGAN INDEKS KUALITAS KELUARGA (IKK)

1. Proses Penghitungan IKK Tahun 2020

Proses penghitungan IKK Tahun 2020 melalui proses yang cukup panjang dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a. Kerjasama antara BPS, Kemen PPPA-RI dan Tim dari IPB University pada Tahun 2021 melakukan pemetaan indikator kandidat pembentuk IKK (25 indikator, Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a) yang berasal dari indikator asal (36 indikator, Kemen PPPA-RI, 2021a).
- b. Kandidat indikator pembentuk IKK tersebut sudah diuji keterandalan alat ukur IKK melalui uji reliabilitas dan validitas isi dengan menggunakan pengisian survey online pada bulan Maret s.d April 2021. Jumlah sampel dari metode *non-probability sampling* ini sebanyak 6507 suami atau istri sebagai wakil dari unit keluarganya. Jumlah sampel berasal dari 34 Provinsi di seluruh Indonesia (Kemen PPPA-RI, 2021a).
- c. Kandidat indikator pembentuk IKK yang diuji berawal dari 46 pertanyaan, kemudian di analisis reliabilitas dan validitas isi dan dipilih menjadi 36 indikator yang selanjutnya di-seleksi lagi menjadi 29 indikator terpilih (Kemen PPPA-RI, 2021a).
- d. Berdasarkan 29 indikator terpilih, maka dilakukan pencocokan setiap indikator asal dengan indikator pembentuk (pertanyaan) sekaligus memperhatikan konsep dan definisi serta sumber datanya (Susenas KOR, KP, MSBP dan Modul Hansos) (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).
- e. Indikator pembentuk IKK yang terpilih kemudian ditetapkan rumus persentasenya yang secara detail berupa metadata indikator IKK Desember 2020 tersaji pada Lampiran 1 (Kemen PPPA- RI & BPS, 2021a).
- f. Kesepakatan tim berdasarkan ketersediaan data BPS, jumlah indikator pembentuk IKK adalah 25 indikator terpilih. Berdasarkan metadata indikator IKK, diketahui bahwa indikator berasal dari berbagai sumber survei sebagai berikut: (a) 16 indikator berasal dari Susenas KOR; (b) 2 indikator berasal dari Susenas KP; (c) 6 indikator berasal dari Susenas kuesioner MSBP; (d) 1 indikator berasal dari Susenas Hansos (Lampiran 1) (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).
- g. Unit analisis penghitungan IKK adalah rumah tangga dengan kombinasi berbagai pertanyaan yang ditujukan untuk individu maupun unit rumah tangga seperti rumah tangga secara keseluruhan, Anggota Rumah Tangga (ART) umur 0-17 tahun, semua ART, minimal 1 (satu) ART, ART semua umur, antara orang tua dan anak, anak umur 5-17 tahun, anak umur 7-17 tahun, anak umur 1-17 tahun, anak umur 20-24 tahun, dan perempuan berstatus kawin (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).
- h. Hasil seleksi indikator dikonfirmasi dengan teori keluarga dan prinsip-prinsip penghitungan statistik (Kemen PPPA-RI, 2021a).
- i. Penentuan nilai minimum dan maksimum dilakukan untuk setiap indikator pembentuk IKK (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b).

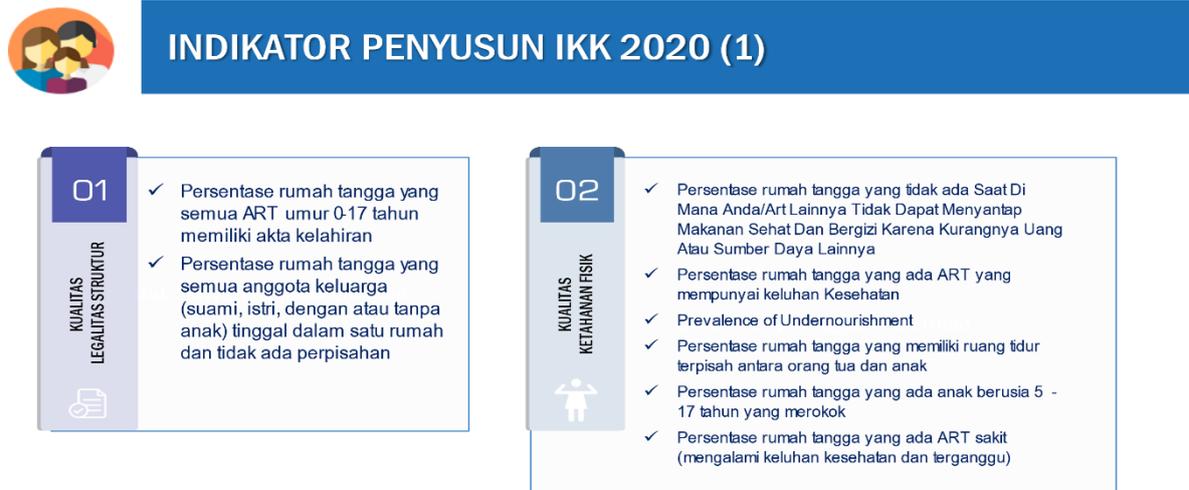
- j. Penentuan bobot tiap dimensi dilakukan dengan menggunakan metode AHP melalui kegiatan *Focus Group Discussion* (FGD) dan pengisian kuesioner oleh 8 birokrat pusat dan daerah serta akademisi (Kemen PPPA-RI, 2021b).
- k. Proses normalisasi indikator pembentuk IKK dilakukan dalam rangka persiapan untuk menyamakan arah (positif atau negatif) dari indikator pembentuk menjadi level komposit dimensi pembentuk (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b).
- l. Menghitung nilai capaian masing-masing dimensi dengan cara menghitung rata-rata indikator pembentuknya untuk level provinsi dan nasional (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b).
- m. Menganalisis web untuk kelima dimensi pembentuk IKK per provinsi untuk melihat capaian kelima dimensi dibandingkan dengan capaian nasional.
- n. Mengkategorikan nilai capaian masing-masing dimensi berdasarkan *cut-off* yang tercantum dalam draft pedoman pembangunan kualitas keluarga (Kemen PPPA-RI, 2021c) untuk level provinsi dan nasional.
- o. Menghitung nilai capaian IKK terbobot AHP untuk level provinsi dan nasional.
- p. Mengkategorikan nilai capaian IKK berdasarkan *cut-off* yang tercantum dalam draft pedoman pembangunan kualitas keluarga (Kemen PPPA-RI, 2021c) untuk level provinsi dan nasional.

2. Dimensi dan Indikator Kualitas Keluarga (IKK) Tahun 2020

Terdapat 25 Indikator dan 5 (lima) dimensi pembentuk IKK Tahun 2020 (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a) adalah:

- a. **Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)** terdiri atas 2 (dua) indikator yaitu memiliki akta kelahiran anak, dan keluarga tinggal bersama.
- b. **Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)** terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu makan makanan sehat bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, ruang tidur terpisah antara orangtua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu.
- c. **Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)** terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi Kesehatan, anak putus sekolah, dan perempuan bekerja.
- d. **Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)** terdiri atas 5 (lima) indikator yaitu kekerasan terhadap anak, anak menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orangtua (indikator double untuk ayah dan ibu).
- e. **Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSBB)** terdiri atas 6 (enam) indikator yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, ada lansia dalam rumah tangga, melakukan kegiatan keagamaan, dan mengakses internet bersama anak dan orang tua.

Secara detail definisi operasional dari masing-masing indikator pembentuk disajikan pada Lampiran 1. Berikut ini disajikan gambar-gambar tentang indikator dan dimensi pembentuk IKK.



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a.

Gambar 3.1. Indikator dan Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) dan Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF).



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a.

Gambar 3.2. Indikator dan Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP).



INDIKATOR PENYUSUN IKK 2020 (3)

05

KUALITAS KETAHANAN SOSIAL-BUDAYA

- ✓ Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak
- ✓ Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap
- ✓ Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial
- ✓ Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+
- ✓ Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan
- ✓ Persentase rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a.

Gambar 3.3. Indikator dan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB).

3. Metadata dan Sumber data

Data yang digunakan untuk mengukur IKK Tahun 2020 berasal dari berbagai sumber data BPS (BPS, 2021a) yaitu dari:

- SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional), KOR 2020.
- SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional), untuk Pencacahan KP 2020 (Konsumsi Pengeluaran).
- SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional), MSBP 2018 (Modul Sosial Budaya dan Pendidikan).
- SUSENAS (Survei Sosial Ekonomi Nasional), Hansos 2020 (Modul Ketahanan Sosial).

Sumber dari masing-masing indikator pembentuk IKK secara detail disajikan metadata dan sumber data pada Lampiran 1.

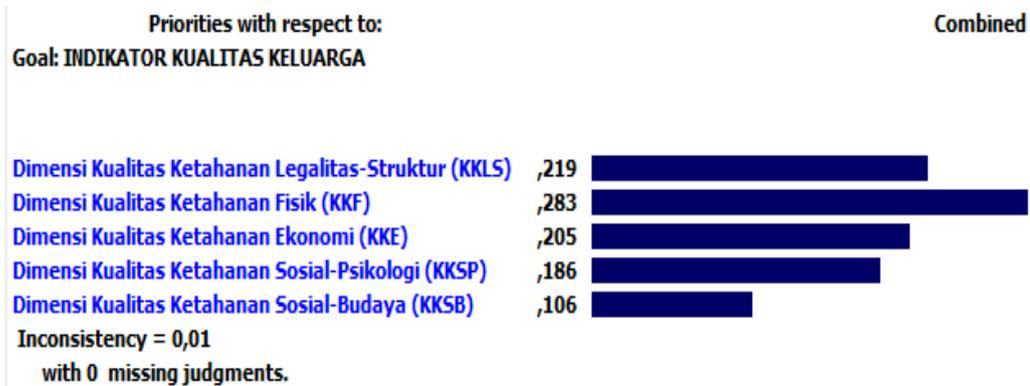
4. Metode Penghitungan Dimensi

Dimensi pembentuk IKK dihitung berdasarkan rata-rata jumlah indikator pembentuk masing-masing dimensi dengan penghitungan sebagai berikut:

- a. Dimensi KLS (Kualitas Legalitas Struktur) terdapat 2 (dua) indikator = Indikator $(1+2)/2$.
- b. Dimensi KKF (Kualitas Ketahanan Fisik) terdapat 6 (enam) indikator = Indikator $(3+4+5+6+7+8)/6$.
- c. Dimensi KKE (Kualitas Ketahanan Ekonomi) terdapat 6 (enam) indikator = Indikator $(9+10+11+12+13+14)/6$.
- d. Dimensi KKSP (Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi) terdapat 5 (lima) indikator = Indikator $(15+16+17+18+19)/5$.
- e. Dimensi KKSBB (Kualitas Ketahanan Sosial Budaya) terdapat 6 (enam) indikator = Indikator $(20+21+22+23+24+25)/6$.

5. Metode Penghitungan IKK dengan Pendekatan Terbobot Berdasarkan AHP.

Pembobotan 29 Indikator asal dari konsep Kualitas Keluarga dilakukan dengan menggunakan analisis AHP (*Analytical Hierarchy Process*) yaitu dengan memberikan kuesioner kepada para pakar atau narasumber dari berbagai *stakeholder* dan dilanjutkan dengan diskusi mendalam (Kemen PPPA-RI, 2021b). AHP ini bertujuan untuk memberikan arahan strategi kebijakan terkait Indikator Kualitas Keluarga. Hasil pembobotan indikator kualitas keluarga tahun 2021 diperoleh dari hasil pengolahan dan penggabungan pendapat para pakar yang terdiri dari birokrat pusat (kementerian/lembaga), birokrat daerah (Dinas provinsi dan kabupaten/kota) serta akademisi Bidang Ilmu Keluarga. Sosialisasi dan pembahasan pengisian kuesioner dilaksanakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD) yang diselenggarakan pada hari Kamis, 16 September 2021. Hasil pembobotan dimensi pembentuk IKK adalah disajikan pada gambar berikut ini.



Sumber: Kemen PPPA-RI, 2021b.

Gambar 3.4. Hasil Pembobotan Dimensi (Seluruh responden)

6. Kategorisasi IKK

IKK dapat dikategorikan sebagai berikut (Kemen PPPA, 2021c):

- a. Indeks Kualitas Keluarga yang kurang responsif gender dan hak anak apabila nilai kurang atau di bawah 50,00.
- b. Indeks Kualitas Keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak apabila nilai antara 50,00 – 75,00.
- c. Indeks Kualitas Keluarga yang responsif gender dan hak anak apabila nilai di atas 75,00.

BAB IV

REKAPITULASI INDIKATOR DAN DIMENSI PEMBENTUK IKK TAHUN 2020

Rekapitulasi atau ringkasan hasil indikator dan dimensi pembentuk IKK menunjukkan posisi suatu provinsi yang mempunyai nilai IKK tertinggi dan terendah untuk setiap indikator pembentuk IKK. Rekapitulasi dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok indikator pembentuk IKK yaitu indikator positif dan indikator negatif. Terdapat 17 indikator positif pembentuk IKK. Nilai tertinggi dari indikator positif berarti bahwa provinsi tersebut berada pada posisi terbaik di tingkat nasional. Sebaliknya, nilai terendah dari indikator positif bermakna bahwa provinsi tersebut berada pada posisi terendah di tingkat nasional.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi untuk indikator positif sebanyak 4 (empat) kali berada di Provinsi Bali. Adapun nilai terendah untuk indikator positif sebanyak 5 (lima) kali berada di Provinsi Papua dan DI Yogyakarta.

Tabel 5.1. Rekapitulasi Indikator Positif Pembentuk IKK Tahun 2020
Beserta Provinsi yang mempunyai Nilai Tertinggi dan Terendah.

No	Indikator	Nilai Tertinggi di Provinsi	Nilai Terendah di Provinsi
1	Akta kelahiran anak	DI Yogyakarta	Maluku Utara
2	Tinggal bersama	Sumatera Selatan	DI Yogyakarta
3	Makanan sehat bergizi	Bali	NTT
4	Ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	Papua	DI Yogyakarta
5	Memiliki rumah	Kalimantan Barat	DKI Jakarta
6	Memiliki penghasilan cukup/ tidak miskin	Bali	Papua
7	Memiliki rekening tabungan	Kalimantan Utara	Papua
8	Memiliki asuransi kesehatan	Aceh	Jambi
9	Perempuan bekerja	Bali	Jawa Barat
10	Bepergian	DI Yogyakarta	Papua
11	Kegiatan anak bersama orangtua (Ayah)	Lampung	DI Yogyakarta
12	Kegiatan anak bersama orangtua (Ibu)	Lampung	DI Yogyakarta
13	Memiliki tempat cuci tangan	Bali	Papua
14	Melakukan kegiatan sosial	DKI Jakarta	NTT
15	Ada lansia dalam rumah tangga	Jawa Tengah	Papua
16	Melakukan kegiatan keagamaan	Papua	DI Yogyakarta
17	Mengakses internet bersama anak dan orang tua	Lampung	Kepulauan Riau

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

- Indikator positif dengan nilai tertinggi bermakna bahwa provinsi tersebut dalam posisi terbaik di tingkat nasional.
- Nilai terendah bermakna bahwa provinsi tersebut dalam posisi terendah di tingkat nasional.

Terdapat 8 (delapan) indikator negatif pembentuk IKK. Nilai tertinggi dari indikator negatif berarti bahwa provinsi tersebut berada pada posisi terendah di tingkat nasional. Sebaliknya, nilai terendah dari indikator negatif bermakna bahwa provinsi tersebut berada pada posisi terbaik di tingkat nasional.

Tabel di bawah ini menunjukkan bahwa nilai tertinggi untuk indikator negatif sebanyak 2 (dua) kali berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun nilai terendah untuk indikator negatif sebanyak 2 (dua) kali berada di Provinsi Papua, Bali dan DKI Jakarta.

Tabel 5.2. Rekapitulasi Indikator Negatif Pembentuk IKK Tahun 2020 Beserta Provinsi yang mempunyai Nilai Tertinggi dan Terendah.

No	Indikator	Nilai Tertinggi di Provinsi	Nilai Terendah di Provinsi
1	Keluhan kesehatan	Nusa Tenggara Barat	Papua
2	Kurang gizi	Maluku	DKI Jakarta
3	Anak merokok	Sulawesi Barat	Bali
4	Sakit hingga terganggu	Nusa Tenggara Barat	Kepulauan Riau
5	Anak putus sekolah	Gorontalo	DI Yogyakarta
6	Kekerasan terhadap anak	DKI Jakarta	Papua
7	Menjadi korban kejahatan	Papua Barat	Bali
8	Perkawinan usia anak	Sulawesi Barat	DKI Jakarta

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

- Indikator negatif dengan nilai tertinggi bermakna bahwa provinsi tersebut dalam posisi terendah di tingkat nasional.
- Nilai terendah bermakna bahwa provinsi tersebut dalam posisi terbaik di tingkat nasional.

Berdasarkan analisis per dimensi pembentuk IKK, diketahui bahwa nilai tertinggi untuk setiap dimensi tersebar di berbagai Provinsi seperti Provinsi Jawa Timur, Kepulauan Riau, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan DKI Jakarta. Adapun nilai terendah untuk tingkatan dimensi sebanyak 3 (kali) berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, secara keseluruhan nilai IKK tahun 2020 tertinggi berada di Provinsi Bali dan terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

Tabel 5.3. Rekapitulasi Dimensi Pembentuk IKK dan IKK Tahun 2020
Beserta Provinsi yang mempunyai Nilai Tertinggi dan Terendah.

No	Dimensi/ IKK	Provinsi Tertinggi	Provinsi Terendah
1	Kualitas Legalitas Struktur	Jawa Timur	Nusa Tenggara Timur
2	Kualitas Ketahanan Fisik	Kepulauan Riau	Nusa Tenggara Timur
3	Kualitas Ketahanan Ekonomi	Bali	Jawa Barat
4	Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi	Kep. Bangka Belitung	Kalimantan Timur
5	Kualitas Ketahanan Sosial Budaya	DKI Jakarta	Nusa Tenggara Timur
6	Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Terbobot AHP	Bali	Nusa Tenggara Timur

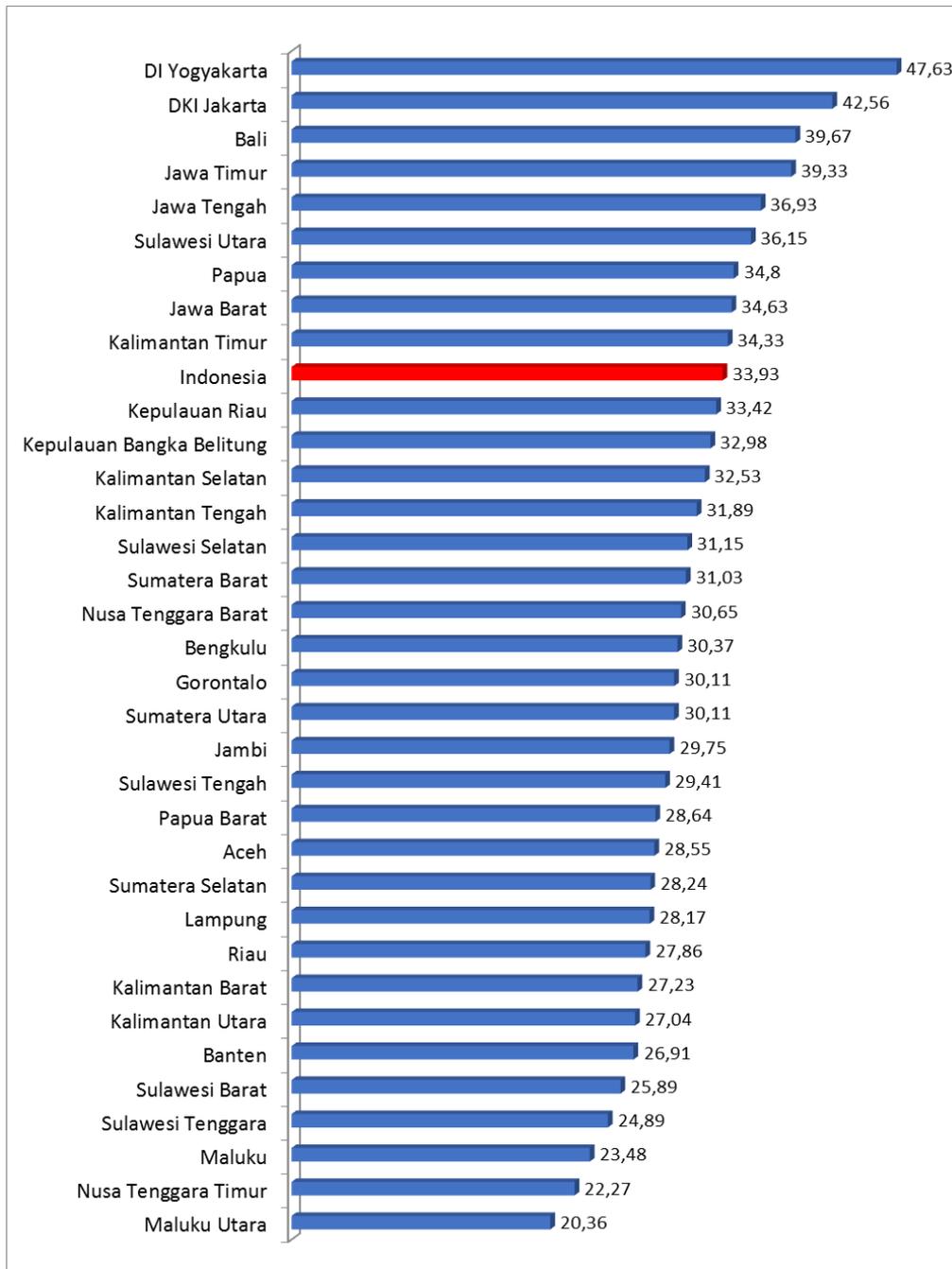
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Secara detail, setiap indikator dan dimensi pembentuk IKK disajikan pada bab-bab selanjutnya.

BAB V

DIMENSI KUALITAS LEGALITAS-STRUKTUR (KLS) TAHUN 2020

1. Akta Kelahiran Anak.



Sumber: Susenas KOR 2020.

Gambar 5.1. Persentase rumah tangga yang semua ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran Tahun 2020.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator akta kelahiran anak merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang semua anggota rumah tangga umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun yang memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari memiliki akta kelahiran yang dimaksud adalah pada saat pencacahan dapat menunjukkan (kode 1) ataupun tidak dapat menunjukkan (kode 2) akta kelahiran (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang memiliki akta kelahiran di Indonesia adalah 33,93 persen. Terdapat 9 (sembilan) provinsi atau 26 persen yang mempunyai persentase rumah tangga memiliki akta kelahiran yang lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya, terdapat 25 (dua puluh lima) provinsi atau 74 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

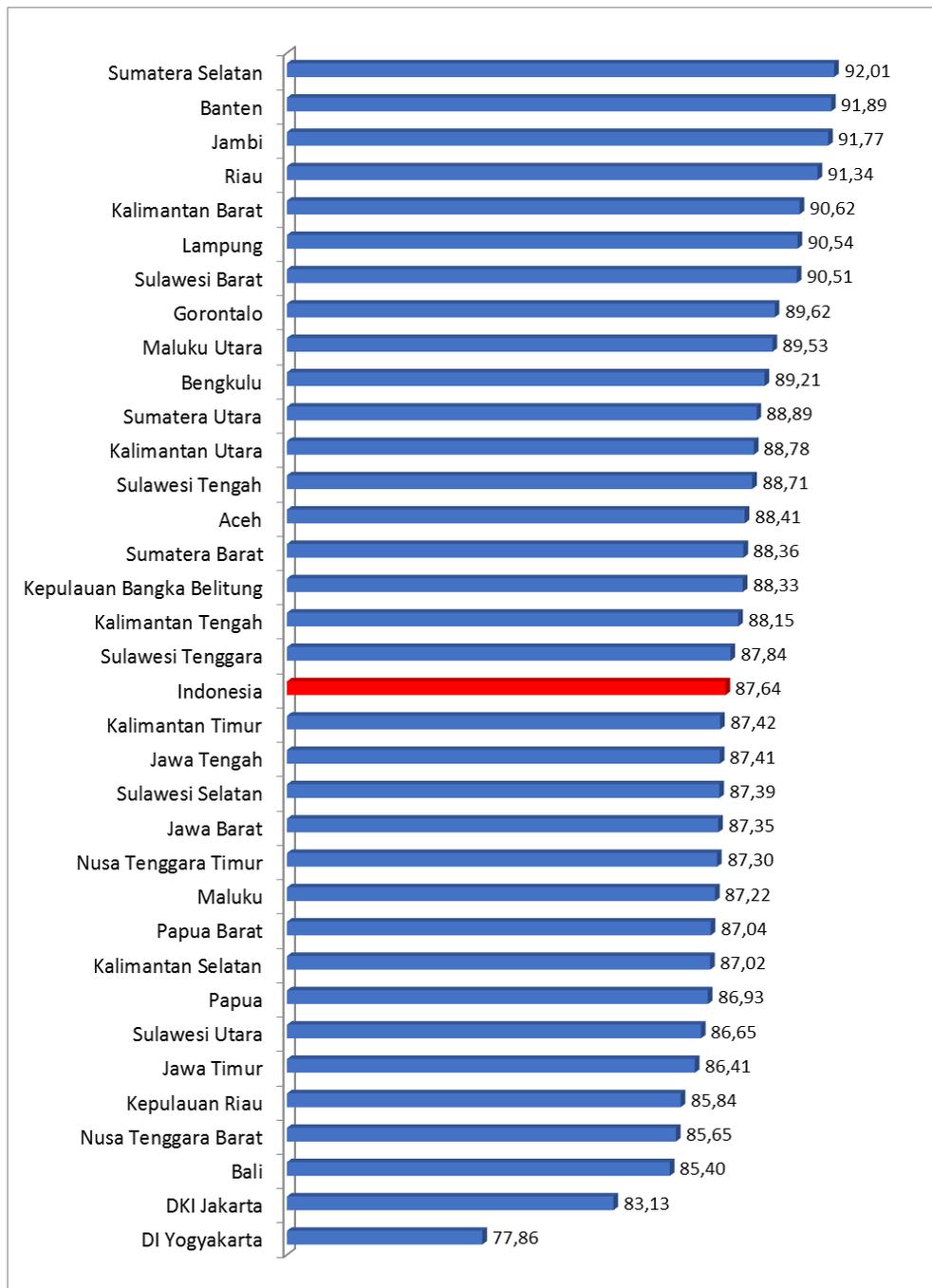
Persentase rumah tangga yang memiliki akta kelahiran tertinggi adalah di Provinsi DI Yogyakarta dan terendah di Provinsi Maluku Utara. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang memiliki akta kelahiran adalah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur dan Jawa Tengah, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Maluku Utara, Nusa Tenggara Timur, Maluku, Sulawesi Tenggara dan Sulawesi Barat.

2. Tinggal Bersama.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator tinggal bersama merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal terdapat suami-istri tinggal bersama/suami-istri-anak kandung tinggal bersama/ibu-anak kandung tinggal bersama terhadap total rumah tangga. Sebagai tambahan keterangan adalah termasuk dalam unit analisis jika salah satu kondisi terpenuhi (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Persentase rumah tangga yang keluarganya tinggal bersama di Indonesia adalah 87,64 persen. Terdapat 18 provinsi atau 53 persen yang mempunyai persentase rumah tangga tinggal bersama yang lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 16 provinsi atau 47 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang tinggal bersama tertinggi adalah di Provinsi Sumatera Selatan dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai persentase rumah tangga tinggal Bersama adalah Provinsi Sumatera Selatan, Banten, Jambi, Riau dan Kalimantan Barat, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau, Nusa Tenggara Barat, Bali, DKI Jakarta dan DI Yogyakarta.



Sumber: Susenas 2020.

Gambar 5.2. Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan Tahun 2020.

BAB VI

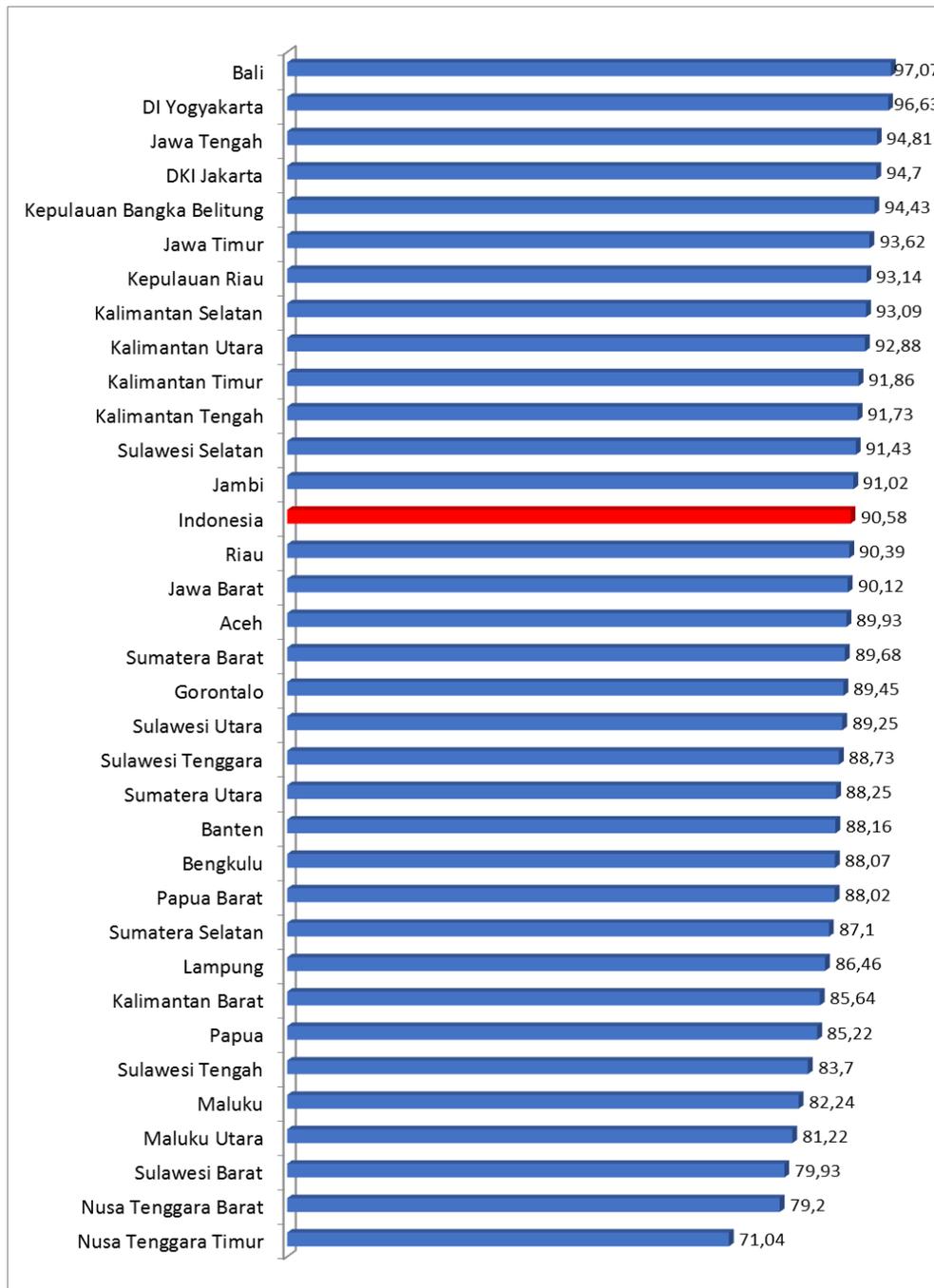
DIMENSI KUALITAS KETAHANAN FISIK (KKF) TAHUN 2020

1. Makanan Sehat Bergizi.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator makanan sehat bergizi merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang tidak ada saat di mana anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang selama setahun terakhir tidak ada saat dimana ART tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya terhadap total rumah tangga (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang makan makanan sehat bergizi di Indonesia adalah 90,58 persen. Terdapat 13 Provinsi atau 38 persen yang mempunyai persentase rumah tangga makan makanan sehat bergizi yang lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 21 provinsi atau 62 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang makan makanan sehat bergizi tertinggi adalah di Provinsi Bali dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 5 (lima) Provinsi tertinggi yang mempunyai persentase rumah tangga yang makan makanan sehat bergizi adalah Provinsi Bali, DI Yogyakarta, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Kepulauan Bangka Belitung, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Sulawesi Barat, Maluku Utara dan Maluku.



Sumber: Susenas 2020.

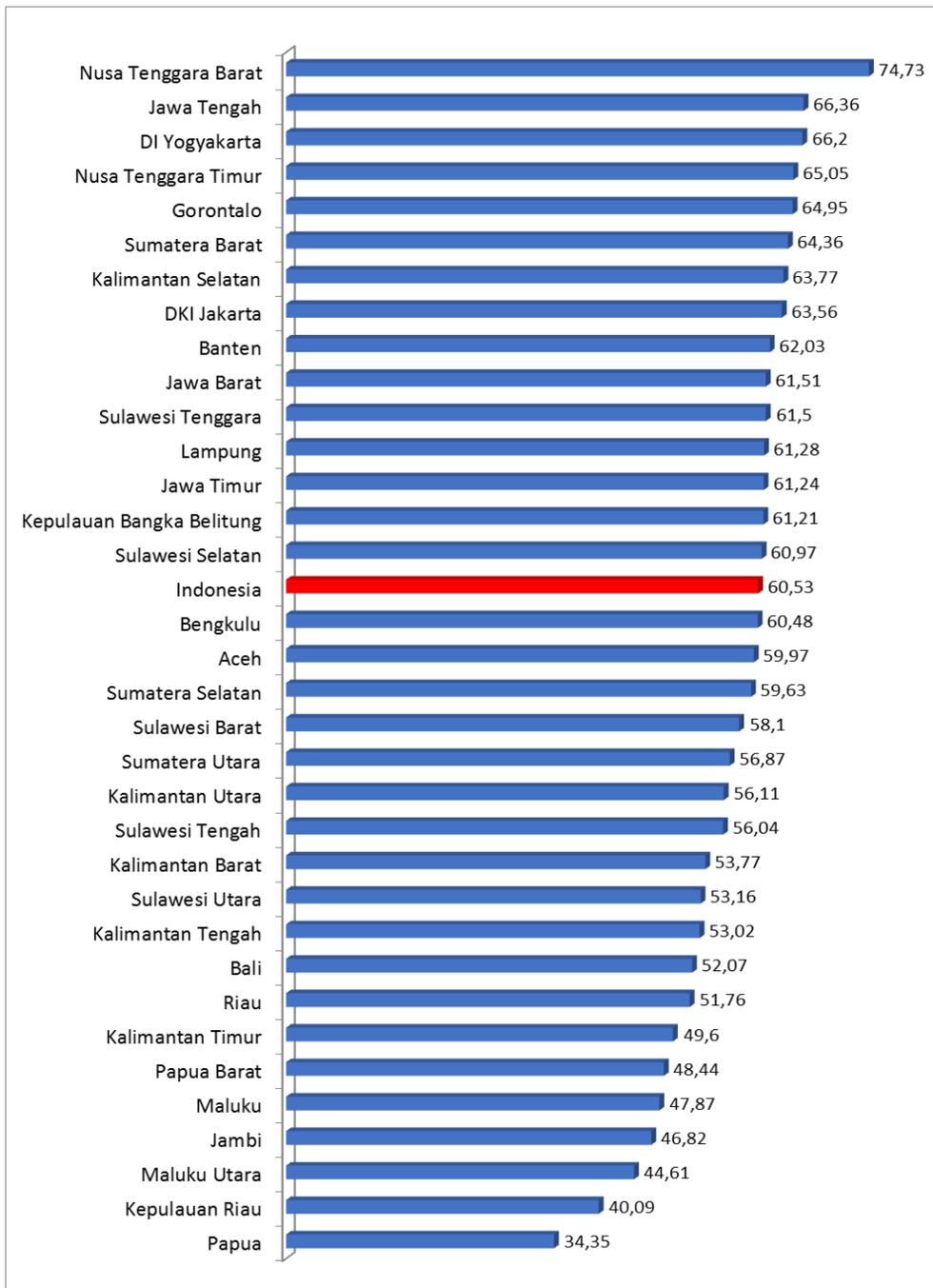
Gambar 6.1. Persentase rumah tangga yang tidak ada saat di mana anda/ART lainnya tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya Tahun 2020.

2. Keluhan Kesehatan.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator keluhan kesehatan merupakan indikator negatif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada ART mempunyai keluhan kesehatan. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir terhadap total rumah tangga (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang mengalami keluhan kesehatan keluarga di Indonesia adalah 60,53 persen. Terdapat 15 provinsi atau 44 persen yang mempunyai persentase keluhan kesehatan keluarga yang lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 19 provinsi atau 56 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang mengalami keluhan kesehatan tertinggi adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terendah di Provinsi Papua. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai persentase rumah tangga mengalami keluhan kesehatan adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta, Nusa Tenggara Timur dan Gorontalo, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Papua, Kepulauan Riau, Maluku Utara, Jambi dan Maluku.



Sumber: Susenas 2020.

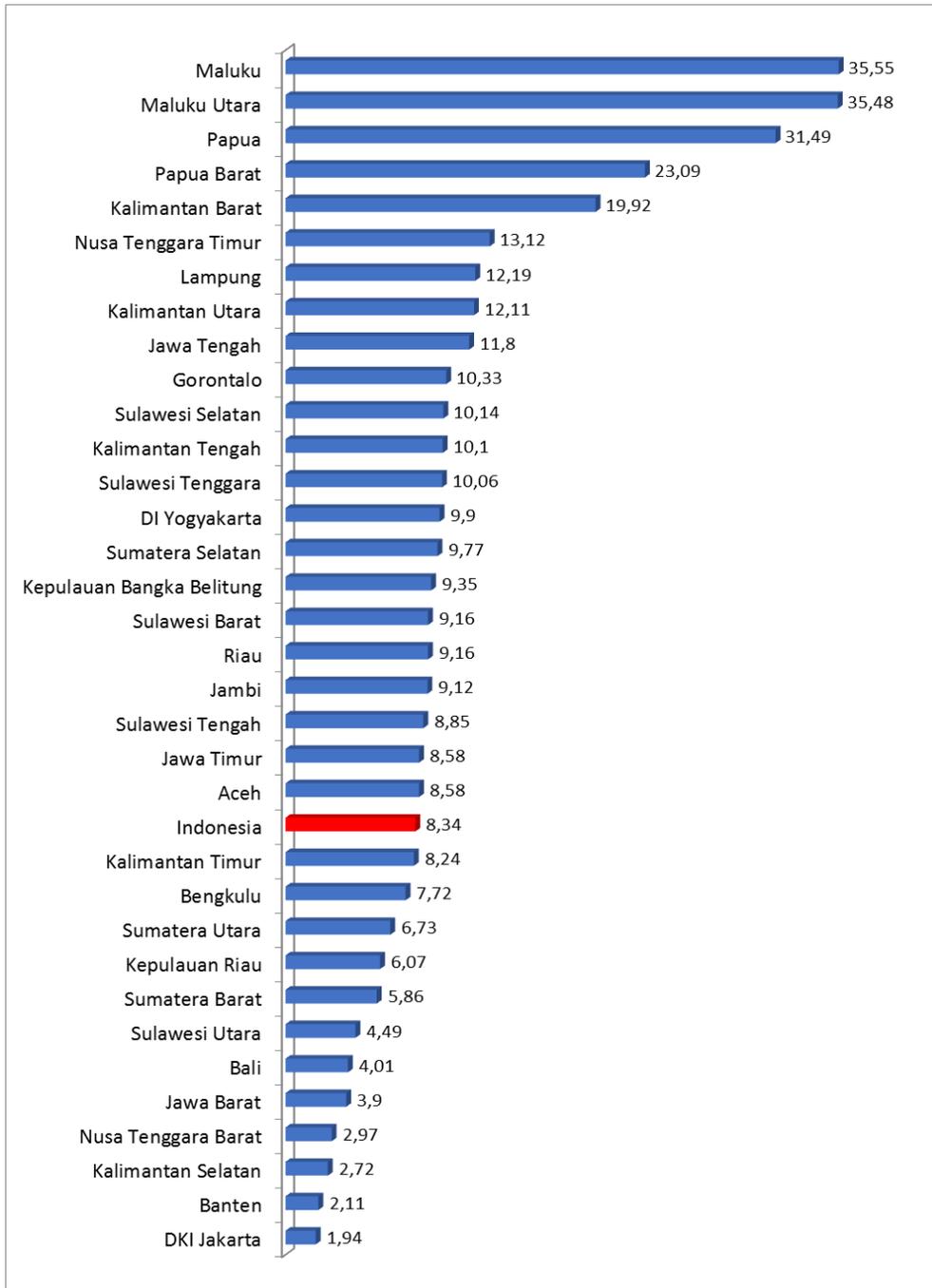
Gambar 6.2. Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan Tahun 2020.

3. Prevalensi Kurang Gizi.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KP 2020. Indikator prevalensi kurang gizi merupakan indikator negatif yang ditunjukkan oleh data *prevalence of undernourishment* (PoU) untuk semua umur. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat (di bawah MDER) terhadap total penduduk. Adapun definisi operasional dari kurang gizi yang dimaksud adalah merujuk pada MDER (*Minimum Dietary Energy Requirement*) adalah *cut-off point* kebutuhan minimum kalori pada PoU yang sudah memperhitungkan struktur anggota rumah tangga sehingga akan berbeda untuk setiap orang sesuai dengan umur, jenis kelamin dan aktivitas fisiknya (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa prevalensi kurang gizi di Indonesia adalah 8,34 persen. Terdapat 22 provinsi atau 65 persen yang mempunyai prevalensi kurang gizi yang lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 12 provinsi atau 35 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Prevalensi kurang gizi tertinggi adalah di Provinsi Maluku dan terendah di Provinsi DKI Jakarta. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai prevalensi kurang gizi adalah Provinsi Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat dan Kalimantan Barat, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi DKI Jakarta, Banten, Kalimantan Selatan, Nusa Tenggara Barat dan Jawa Barat.



Sumber: Susenas 2020.

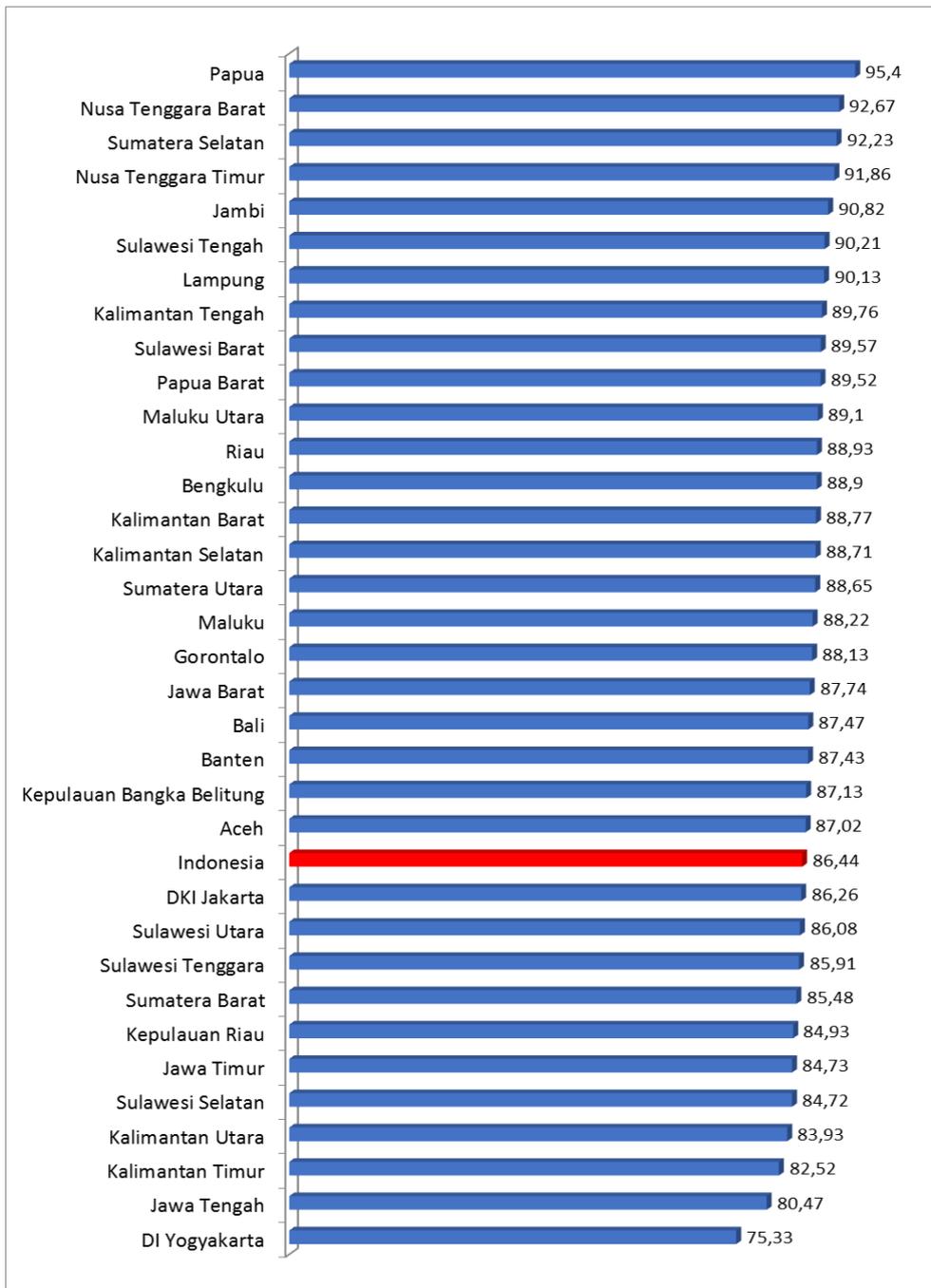
Gambar 6.3. Prevalensi kurang gizi untuk semua umur Tahun 2020.

4. Ruang Tidur Terpisah antara Orang Tua dan Anak.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas MSBP 2018. Indikator ruang tidur terpisah antara orangtua dan anak merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur di rumah pada saat pencacahan terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari ruang tidur terpisah yang dimaksud adalah dianggap memiliki lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur baik dengan tempat tidur/kasur (kode 1) maupun tanpa tempat tidur/kasur (kode 2) (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang memiliki tempat tidur terpisah antara orangtua dan anak di Indonesia adalah 86,44 persen. Terdapat 23 provinsi atau 68 persen rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 11 provinsi atau 32 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Rumah tangga yang memiliki tempat tidur terpisah antara orangtua dan anak tertinggi adalah di Provinsi Papua dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang rumah tangganya memiliki tempat tidur terpisah antara orangtua dan anak adalah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Timur dan Jambi, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta, Jawa Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Utara dan Sulawesi Selatan.



Sumber: Susenas MSBP 2018.

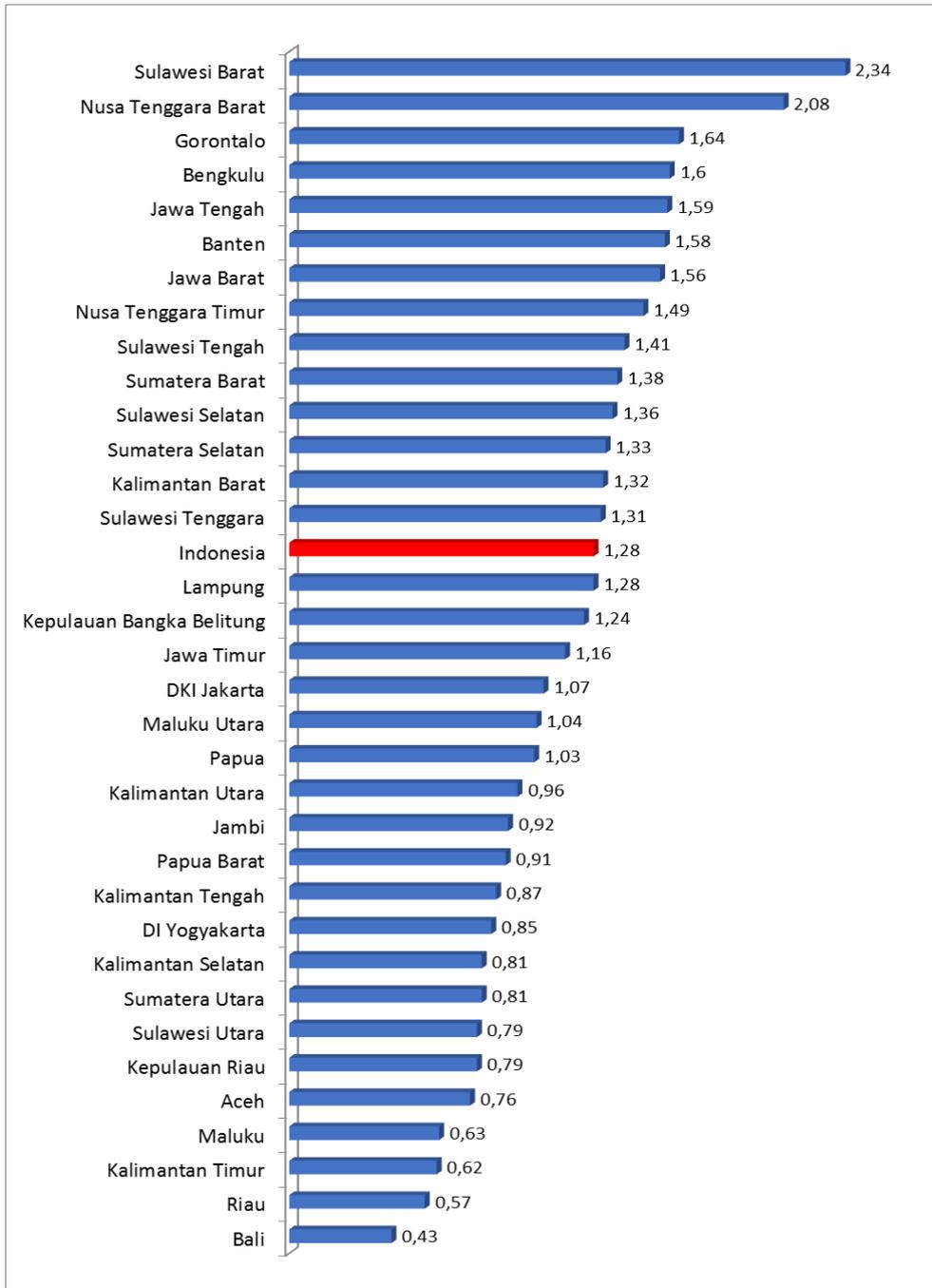
Gambar 6.4. Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak Tahun 2018.

5. Anak Merokok.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator anak merokok merupakan indikator negatif yang ditunjukkan oleh persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 5-17 tahun merokok tembakau dalam sebulan terakhir terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari kategori merokok yang dimaksud adalah baik dilakukan setiap hari (kode 1) maupun tidak setiap hari (kode 2). Termasuk kategori merokok setiap hari jika seseorang yang biasanya merokok setiap hari namun karena sakit, sehari tidak merokok (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang ada anak merokok di Indonesia adalah 1,28 persen. Terdapat 14 provinsi atau 41 persen rumah tangga yang ada anak merokok lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 20 provinsi atau 59 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang ada anak merokok tertinggi adalah di Provinsi Sulawesi Barat dan terendah di Provinsi Bali. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang ada anak merokok adalah Provinsi Sulawesi Barat, Nusa Tenggara Barat, Gorontalo, Bengkulu, dan Jawa Tengah, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Bali, Riau, Kalimantan Timur, Maluku dan Aceh.



Sumber: Susenas 2020.

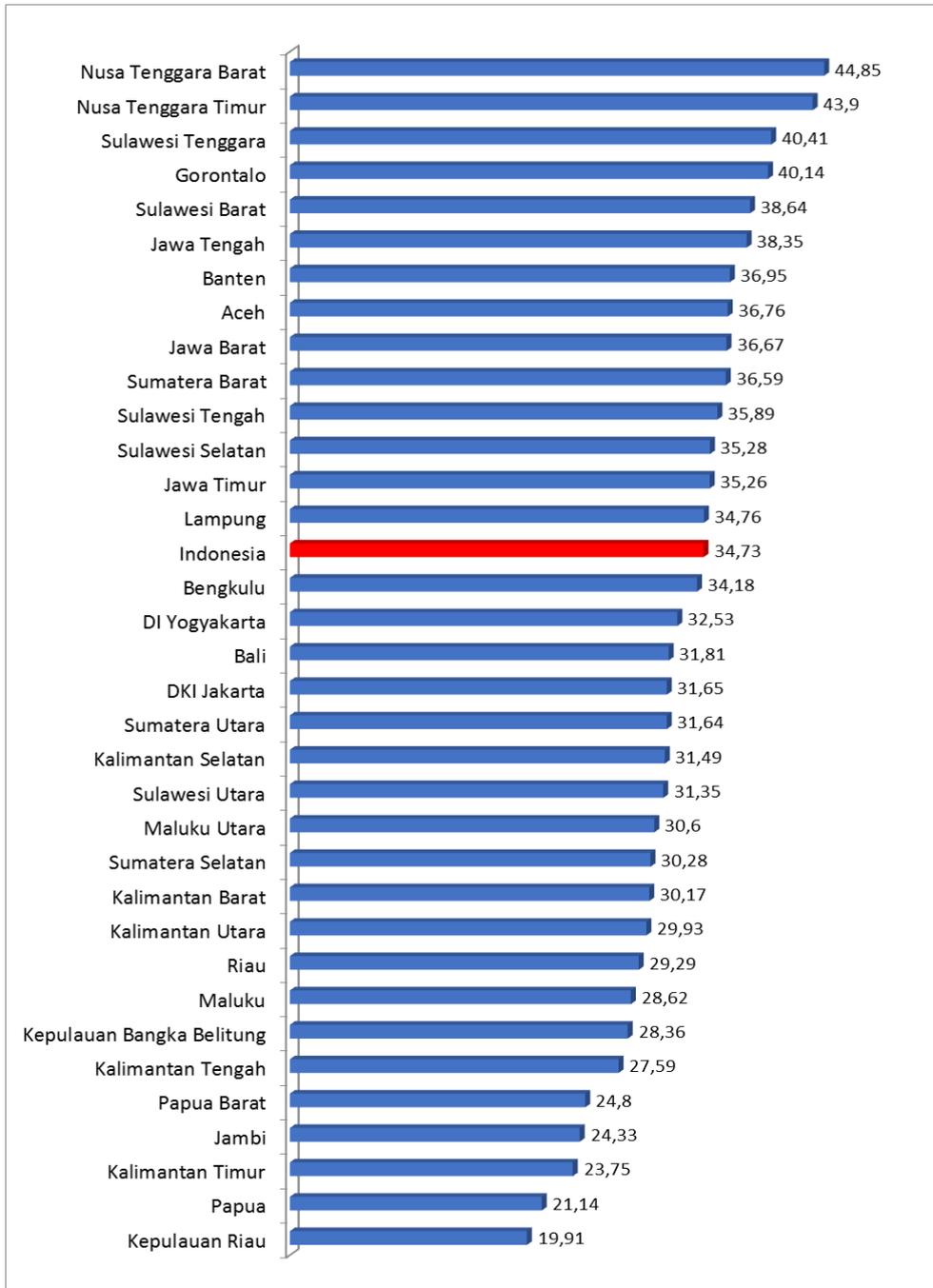
Gambar 6.5. Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun merokok Tahun 2020.

6. Sakit Hingga Terganggu.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator sakit hingga terganggu merupakan indikator negatif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya). Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya (sakit) dalam sebulan terakhir terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari aktivitas yang dimaksud meliputi pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase anggota rumah tangga sakit hingga terganggu di Indonesia adalah 34,73 persen. Terdapat 14 provinsi atau 41 persen rumah tangga yang anggota rumah tangga sakit hingga terganggu lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 20 provinsi atau 59 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Rumah tangga yang anggota rumah tangga sakit hingga terganggu tertinggi adalah di Provinsi Nusa Tenggara Barat dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang anggota rumah tangga sakit hingga terganggu adalah Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Gorontalo dan Sulawesi Barat, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau, Papua, Kalimantan Timur, Jambi dan Papua Barat.



Sumber: Susenas 2020.

Gambar 6.6. Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu) Tahun 2020.

BAB VII

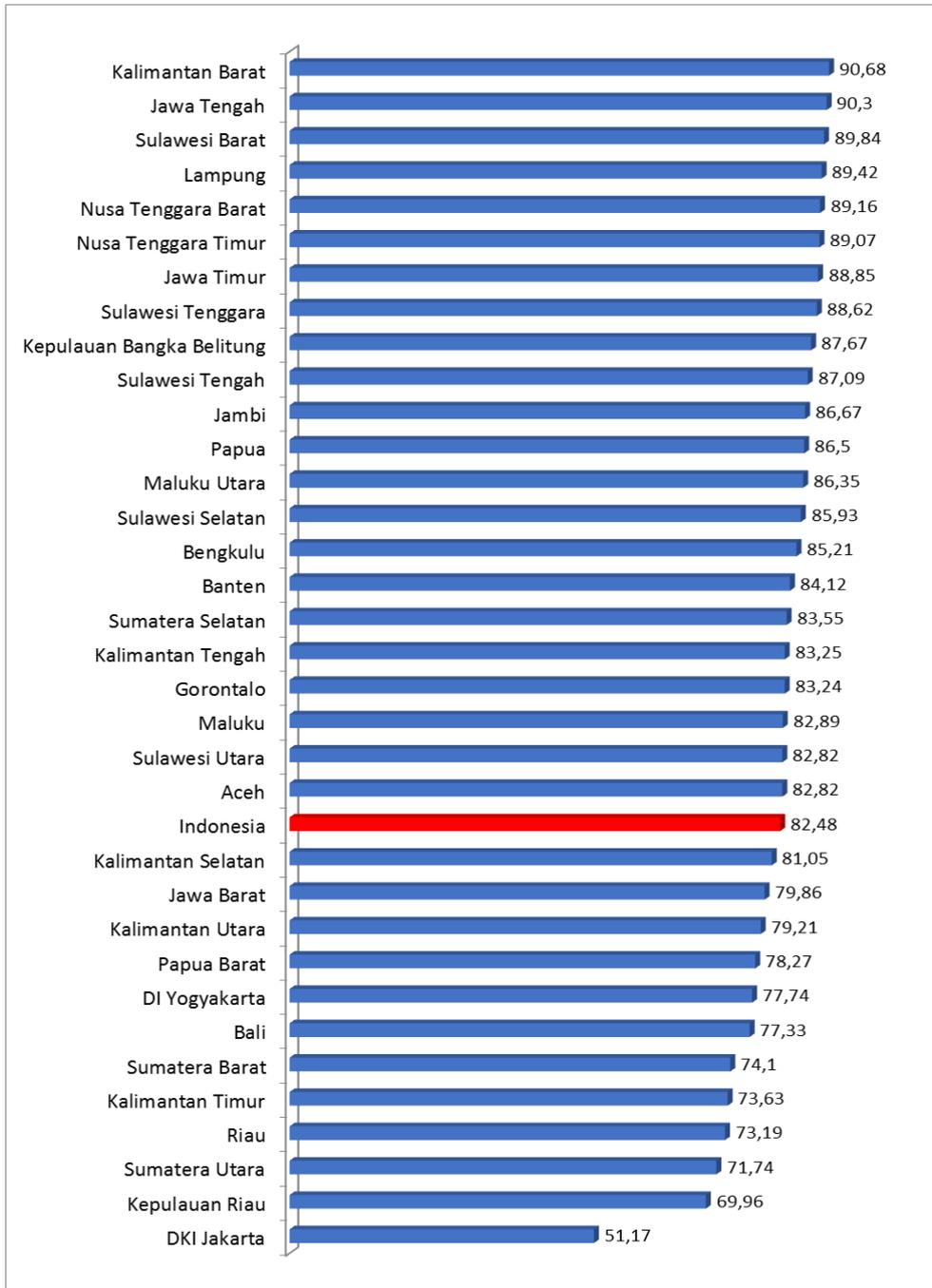
DIMENSI KUALITAS KETAHANAN EKONOMI (KKE) DAN INDIKATORNYA TAHUN 2020

1. Memiliki Rumah.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator memiliki rumah merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang memiliki rumah. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki rumah terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari memiliki rumah yang dimaksud adalah termasuk jika status bangunan tempat tinggal yang ditempati adalah milik sendiri, dan KRT/pasangan/anaknya memiliki rumah lain selain rumah yang ditempati saat ini (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase memiliki rumah di Indonesia adalah 82,48 persen. Terdapat 22 provinsi atau 65 persen rumah tangga yang memiliki rumah lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 12 provinsi atau 35 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Rumah tangga yang memiliki rumah tertinggi adalah di Provinsi Kalimantan Barat dan terendah di Provinsi DKI Jakarta. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang memiliki rumah adalah Provinsi Kalimantan Barat, Jawa Tengah, Sulawesi Barat, Lampung dan Nusa Tenggara Barat dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Utara, Riau dan Kalimantan Timur.



Sumber: Susenas 2020.

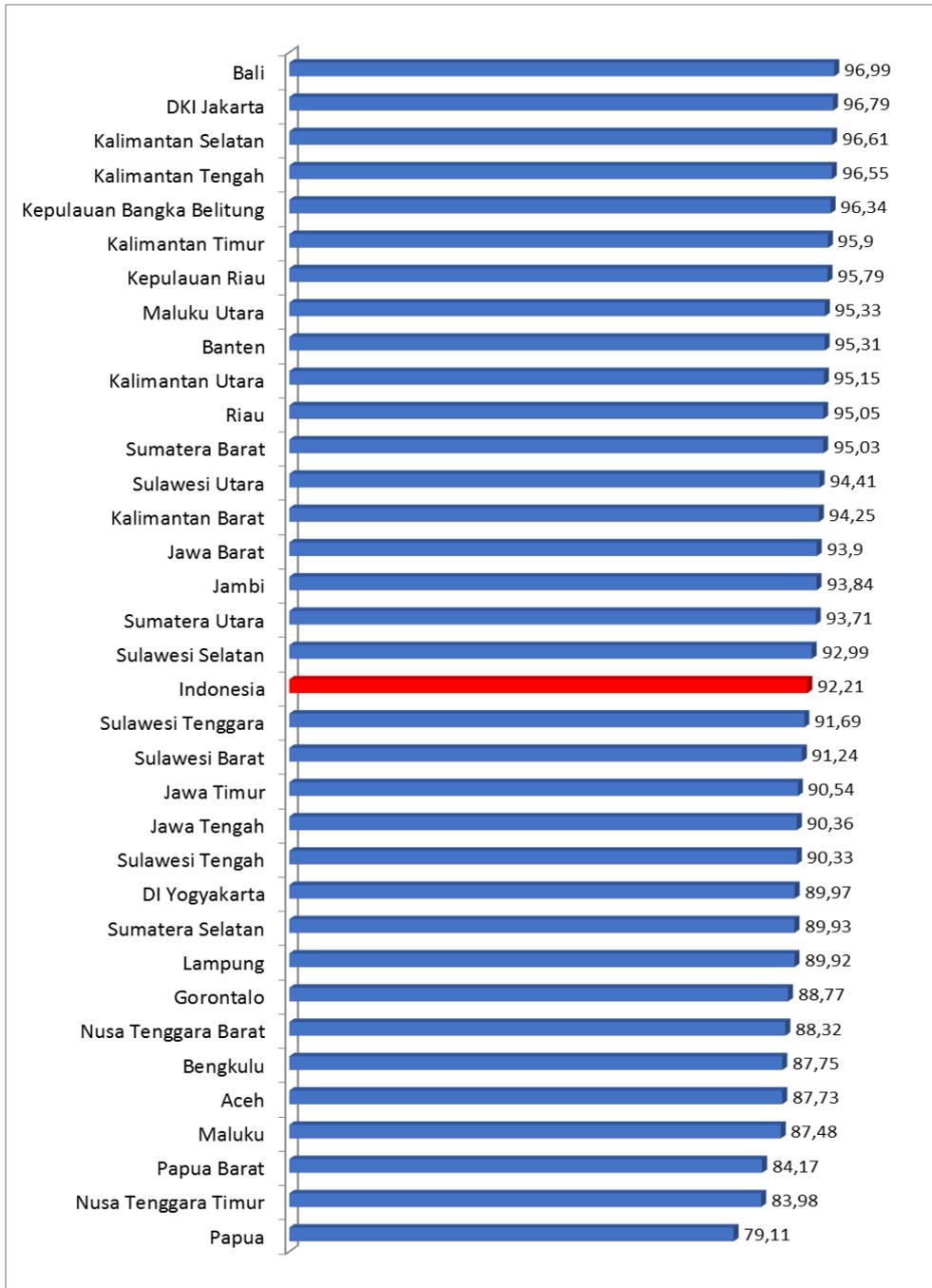
Gambar 7.1. Persentase rumah tangga yang memiliki rumah Tahun 2020.

2. Tidak Miskin.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KP 2020. Indikator tidak miskin dimaknai sebagai kecukupan penghasilan rumah tangga dalam memenuhi kebutuhan hidupnya yang merupakan indikator positif dan ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang tidak miskin di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi terhadap total rumah tangga di masing-masing kabupaten/kota dan provinsi (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga mempunyai penghasilan cukup di Indonesia adalah 92,21 persen. Terdapat 18 provinsi atau 53 persen rumah tangga yang mempunyai penghasilan cukup lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 16 provinsi atau 47 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Rumah tangga yang mempunyai penghasilan cukup tertinggi adalah di Provinsi Bali dan terendah di Provinsi Papua. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai penghasilan cukup adalah Provinsi Bali, DKI Jakarta, Kalimantan Selatan, Kalimantan Tengah dan Kepulauan Bangka Belitung dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Papua Barat, Maluku dan Aceh.



Sumber: Susenas 2020.

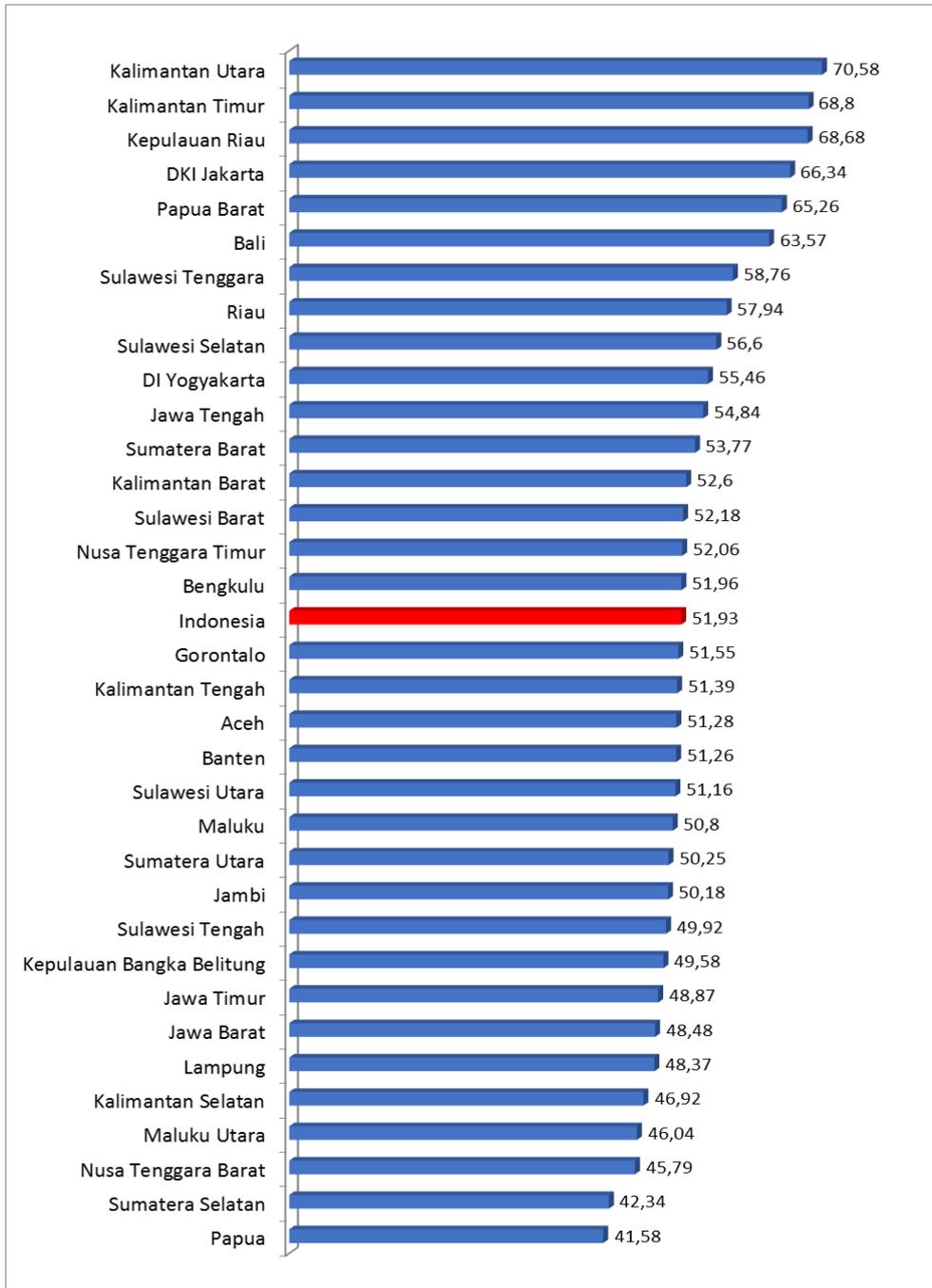
Gambar 7.2. Persentase rumah tangga tidak miskin Tahun 2020.

3. Memiliki Rekening Tabungan.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator memiliki rekening tabungan merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 10 tahun keatas yang berstatus kawin dan memiliki rekening tabungan terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari memiliki rekening tabungan yang dimaksud adalah baik atas nama sendiri/bersama-sama di lembaga keuangan (perbankan, koperasi). Seseorang dikatakan memiliki rekening tabungan di bank jika memiliki nomor rekening meskipun rekening tabungan tersebut kosong. Keikutsertaan tabungan tidak harus sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, yang penting responden masih dapat mengakses tabungannya (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga memiliki rekening tabungan di Indonesia adalah 51,93 persen. Terdapat 16 provinsi atau 47 persen rumah tangga yang memiliki rekening tabungan lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 18 provinsi atau 53 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Rumah tangga yang memiliki rekening tabungan tertinggi adalah di Provinsi Kalimantan Utara dan terendah di Provinsi Papua. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang memiliki rekening tabungan adalah Provinsi Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Papua Barat, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Papua, Sumatera Selatan, Nusa Tenggara Barat, Maluku Utara dan Kalimantan Selatan.



Sumber: Susenas 2020.

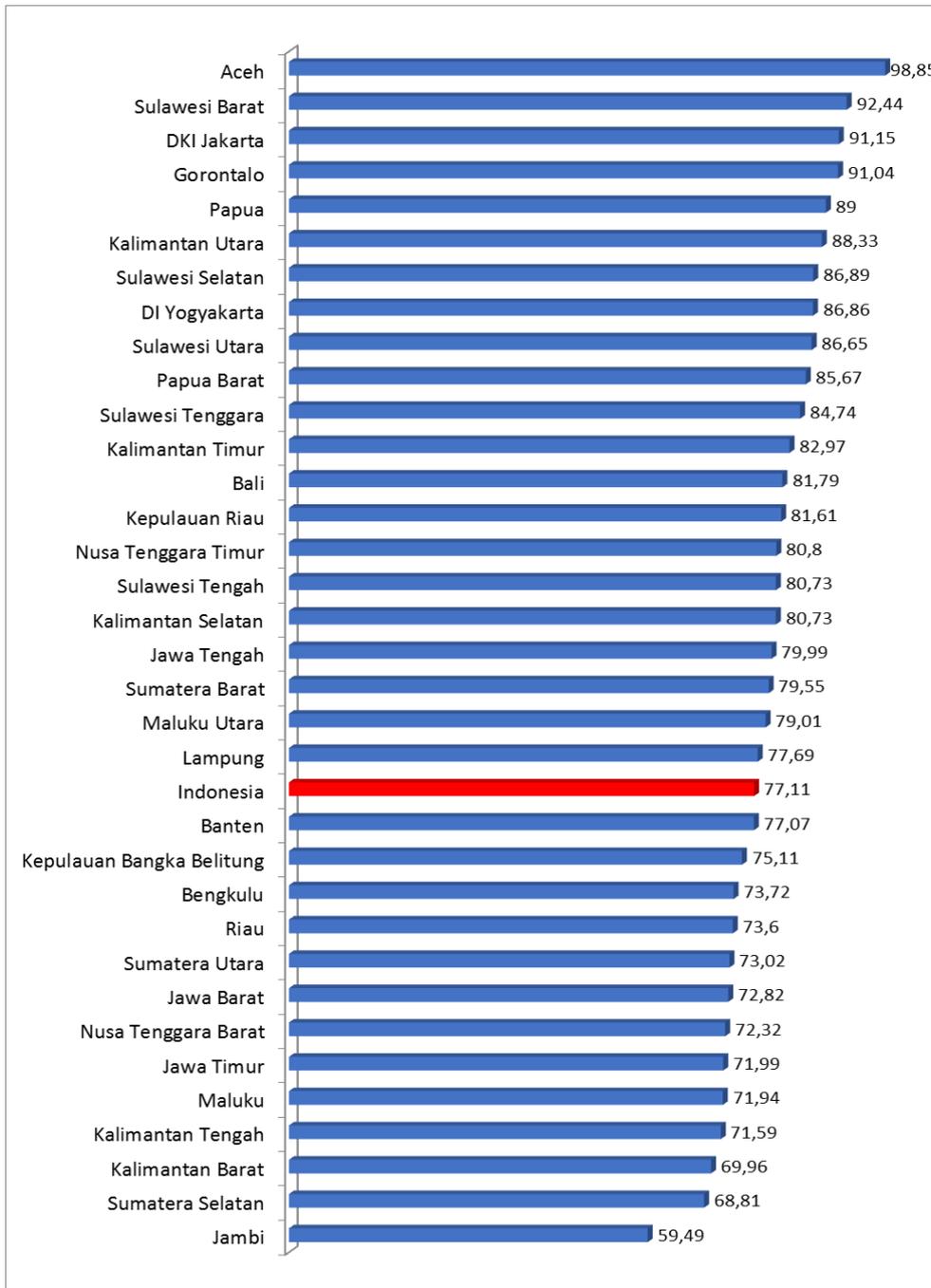
Gambar 7.3. Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan Tahun 2020.

4. Memiliki Asuransi Kesehatan.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator memiliki asuransi kesehatan merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya). Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki jaminan kesehatan pada saat pencacahan terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari jaminan kesehatan yang dimaksud meliputi BPJS-PBI, BPJS Non PBI, jamkesda, asuransi swasta, perusahaan/ kantor. Termasuk unit analisis jika minimal memiliki 1 jenis jaminan Kesehatan (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga memiliki asuransi kesehatan di Indonesia adalah 77,11 persen. Terdapat 21 provinsi atau 62 persen rumah tangga yang memiliki asuransi kesehatan lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 13 provinsi atau 38 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Rumah tangga yang memiliki asuransi kesehatan tertinggi adalah di Provinsi Aceh dan terendah di Provinsi Jambi. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang memiliki asuransi kesehatan adalah Provinsi Aceh, Sulawesi Barat, DKI Jakarta, Gorontalo, dan Papua, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Jambi, Sumatera Selatan, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah dan Maluku.



Sumber: Susenas 2020.

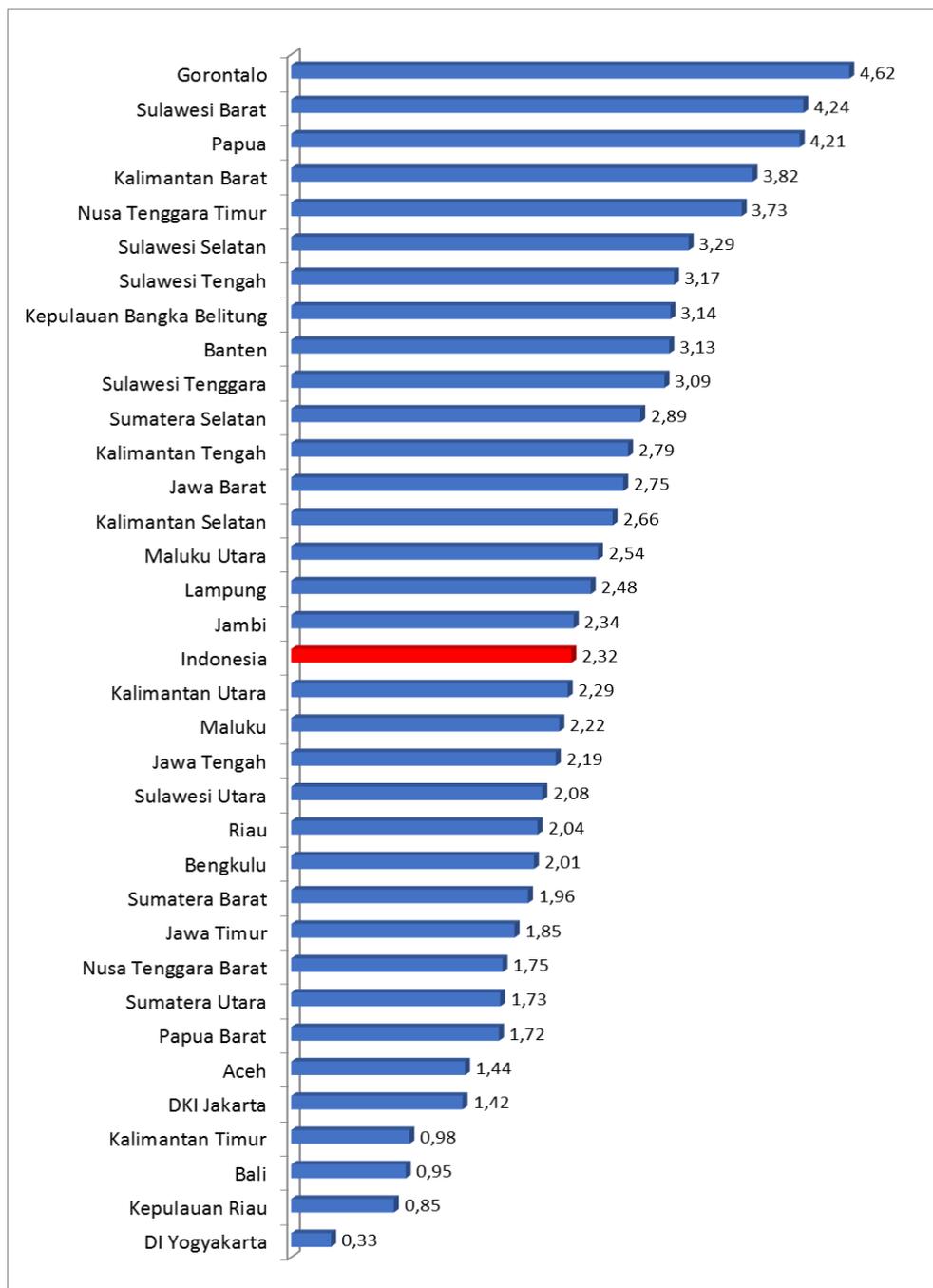
Gambar 7.4. Persentase rumah tangga yang ada ART memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya) Tahun 2020.

5. Anak Putus Sekolah.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator anak putus sekolah merupakan indikator negatif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 anak berumur 7-17 tahun yang putus sekolah terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari putus sekolah yang dimaksud adalah jika pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi dan pada tahun ajaran sebelum pencacahan masih bersekolah. Batas umur 7-17 digunakan karena usia mulai bersekolah adalah 7 tahun (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang ada anak putus sekolahnya di Indonesia adalah 2,32 persen. Terdapat 17 provinsi atau 50 persen rumah tangga yang ada anak putus sekolah lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 17 provinsi atau 50 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang ada anak putus sekolah tertinggi adalah di Provinsi Gorontalo dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang ada anak putus sekolah adalah Provinsi Gorontalo, Sulawesi Barat, Papua, Kalimantan Barat dan Nusa Tenggara Timur dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Bali, Kalimantan Timur dan DKI Jakarta.



Sumber: Susenas 2020.

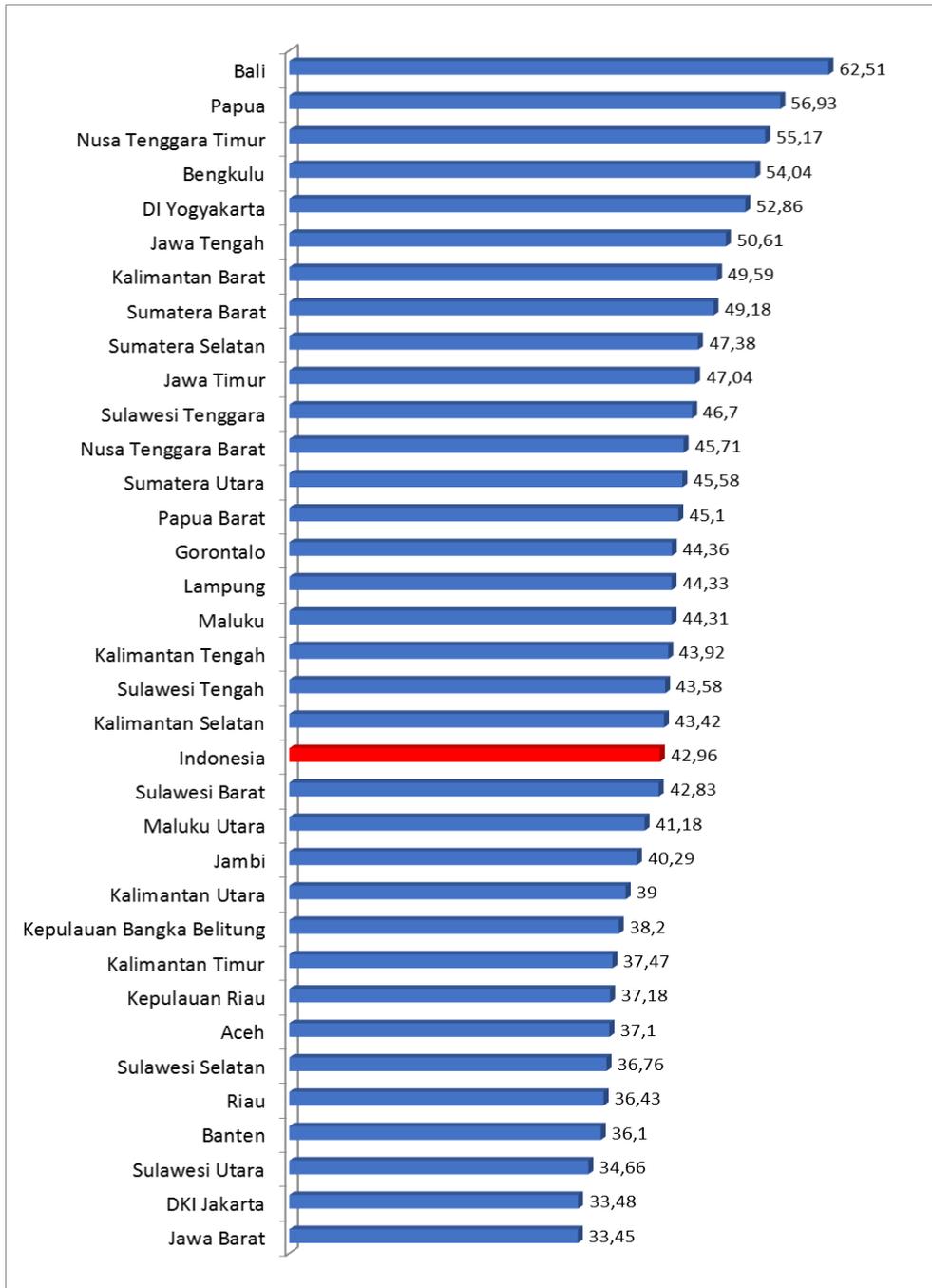
Gambar 7.5. Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah Tahun 2020.

6. Perempuan Bekerja

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator perempuan bekerja merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin bekerja. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART perempuan berstatus kawin yang bekerja seminggu terakhir terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari bekerja yang dimaksud adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga dengan perempuan bekerja di Indonesia adalah 42,96 persen. Terdapat 20 provinsi atau 59 persen rumah tangga yang ada perempuan bekerja lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 14 provinsi atau 41 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang ada perempuan bekerja tertinggi adalah di Provinsi Bali dan terendah di Provinsi Jawa Barat. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang perempuan bekerja adalah Provinsi Bali, Papua, Nusa Tenggara Timur, Bengkulu dan DI Yogyakarta dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Jawa Barat, DKI Jakarta, Sulawesi Utara, Banten dan Riau.



Sumber: Susenas 2020.

Gambar 7.6. Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja Tahun 2020.

BAB VIII

DIMENSI KUALITAS KETAHANAN SOSIAL-PSIKOLOGI (KKSP)

TAHUN 2020

1. Kekerasan Terhadap Anak.

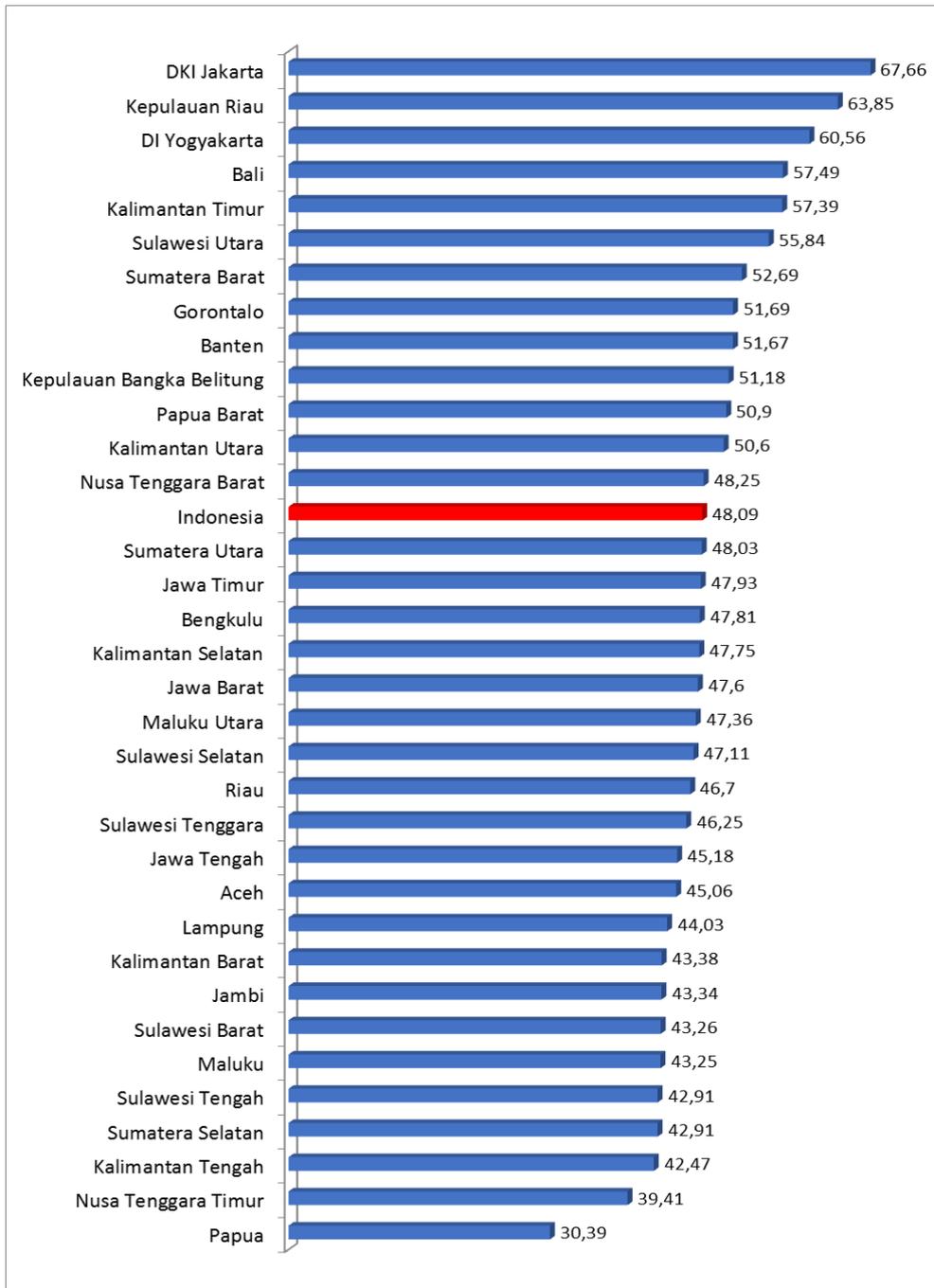
Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas Modul Hansos 2020 yang dalam perhitungannya menjadi 2 (dua) indikator. Indikator kekerasan terhadap anak merupakan indikator negatif yang ditunjukkan oleh data proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang terdapat kejadian kekerasan terhadap anak berumur 1-17 tahun dalam setahun terakhir terhadap jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 1-17 tahun.

Adapun definisi operasional dari kejadian kekerasan terhadap anak meliputi (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a):

1. Memberikan tugas/pekerjaan kepada anak yang melakukan kesalahan. Kode C.
 2. Memanggilnya bodoh, pemalas, tidak berguna, mengatakan tidak sayang lagi, atau sebutan lain yang sejenis. Kode D.
 3. Membentak atau menakutinya. Kode E.
 4. Mengurung atau meninggalkan anak sendirian dalam kamar/ruang tertentu. Kode F.
 5. Mendorong/mengguncang badannya. Kode G.
 6. Mencubit atau menjewer. Kode H.
 7. Menampar, memukul, menjambak atau menendang. Kode I.
- Termasuk dalam unit analisis jika terdapat anak yang mengalami minimal 1 jenis kekerasan.

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang melakukan kekerasan terhadap anak di Indonesia adalah 48,09 persen. Terdapat 13 provinsi atau 38 persen rumah tangga yang ada kekerasan terhadap anak lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 21 provinsi atau 62 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang ada kekerasan terhadap anak tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta dan terendah di Provinsi Papua. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang ada kekerasan terhadap anak adalah Provinsi DKI Jakarta, Kepulauan Riau, DI Yogyakarta, Bali dan Kalimantan Timur, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Papua, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sumatera Selatan dan Sulawesi Tengah.



Sumber: Susenas Modul Hansos 2020.

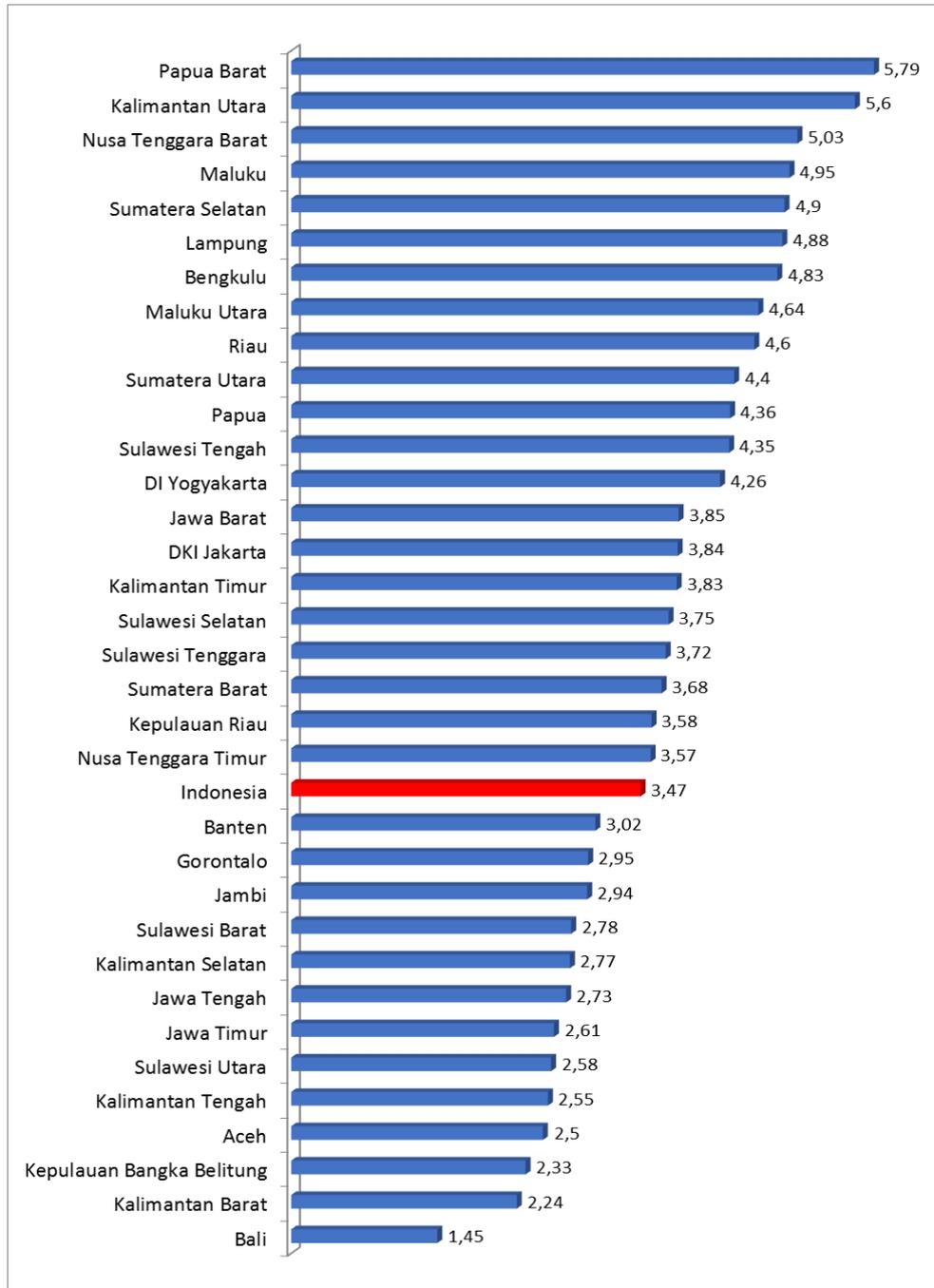
Gambar 8.1. Persentase Rumah Tangga yang Ada Kekerasan terhadap anak Tahun 2020.

2. Menjadi Korban Kejahatan.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator menjadi korban kejahatan merupakan indikator negatif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART pernah menjadi korban kejahatan pada tahun sebelumnya terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari korban kejahatan yang dimaksud adalah penganiayaan, pencurian dengan kekerasan, pelecehan seksual, atau lainnya. Definisi dari korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga menjadi korban kejahatan di Indonesia adalah 3,47 persen. Terdapat 21 provinsi atau 62 persen rumah tangga yang korban kejahatan lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 13 provinsi atau 38 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga menjadi korban kejahatan tertinggi adalah di Provinsi Papua Barat dan terendah di Provinsi Bali. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang ada ART menjadi korban kejahatan adalah Provinsi Papua barat, Kalimantan Utara, Nusa Tenggara Barat, Maluku, dan Sumatera Selatan, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Bali, Kalimantan Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Aceh dan Kalimantan Tengah.



Sumber: Susenas 2020.

Gambar 8.2. Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan Tahun 2020.

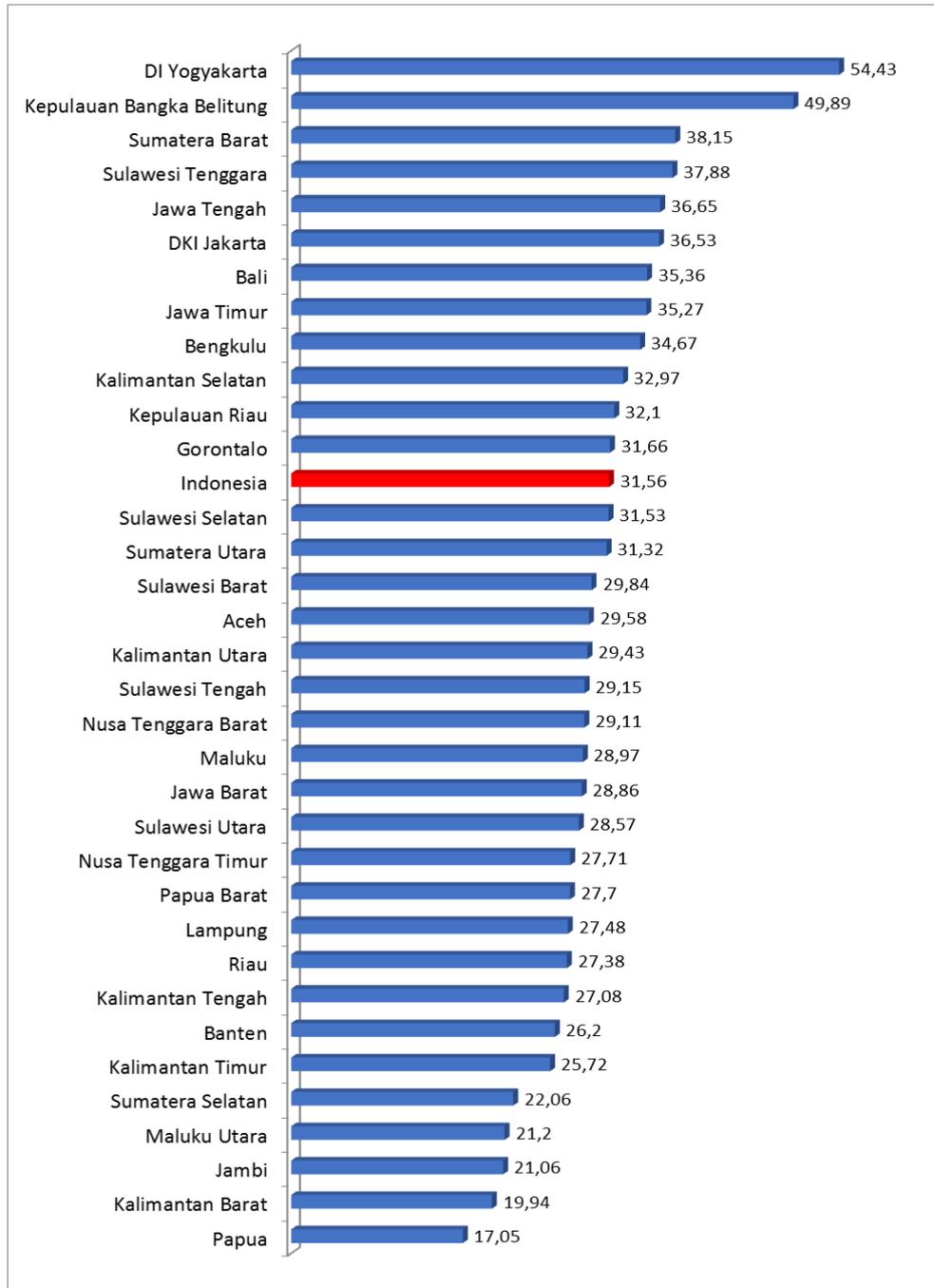
3. Bepergian.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator bepergian merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART pernah bepergian yang tidak untuk sekolah atau bekerja secara rutin pada tahun sebelumnya terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari bepergian yang dimaksud meliputi (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a):

1. Ke Obyek wisata komersial.
2. Menginap di akomodasi komersial.
3. Menempuh jarak lebih dari 100 km pulang dan pergi.

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga yang bepergian di Indonesia adalah 31,56 persen. Terdapat 12 provinsi atau 35 persen rumah tangga yang bepergian lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 22 provinsi atau 65 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga bepergian tertinggi adalah di Provinsi DI Yogyakarta dan terendah di Provinsi Papua. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang ada ART bepergian selama setahun terakhir adalah Provinsi DI Yogyakarta, Kepulauan Bangka Belitung, Sumatera Barat, Sulawesi Tenggara dan Jawa Tengah dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Papua, Kalimantan Barat, Jambi, Maluku Utara dan Sumatera Selatan.



Sumber: Susenas 2020.

Gambar 8.3. Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir Tahun 2020.

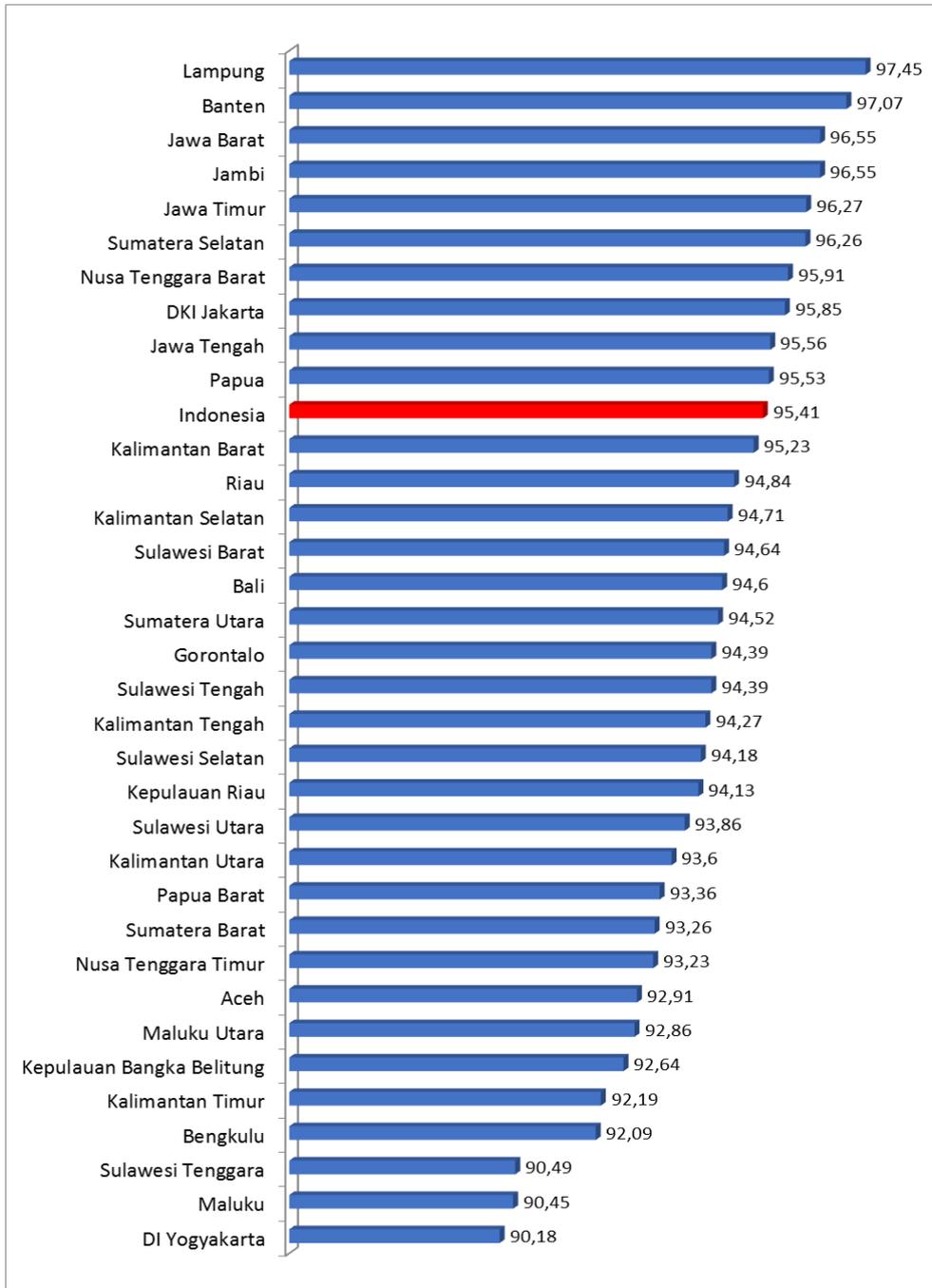
4. Kegiatan Anak Bersama Orangtua

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas MSBP 2018. Indikator kegiatan anak bersama orang tua (ayah) merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang semua ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun melakukan kegiatan bersama orang tua/wali dalam seminggu terakhir terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari kegiatan yang dimaksud meliputi (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a):

1. Makan/belajar makan.
2. Menonton TV.
3. Belajar/membaca buku.
4. Dibacakan buku cerita/diceritakan dongeng.
5. Beribadah/bedoa.
6. Berbincang-bincang/ngobrol.
7. Bermain/rekreasi/olahraga.
8. Bermain games.
9. Mengakses internet.
10. Mengurus rumah tangga.
11. Membantu menambah penghasilan.

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang ada kegiatan anak bersama orang tua di Indonesia adalah 95,41 persen. Terdapat 10 provinsi atau 29 persen rumah tangga yang kegiatan anak bersama orang tua lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 24 provinsi atau 71 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang ada kegiatan anak bersama orang tua tertinggi adalah di Provinsi Lampung dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi kegiatan anak bersama orang tua adalah Provinsi Lampung, Banten, Jawa Barat, Jambi dan Jawa Timur, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta, Maluku, Sulawesi Tenggara, Bengkulu dan Kalimantan Timur.



Sumber: Susenas MSBP 2018.

Gambar 8.4. Persentase rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua Tahun 2018.

BAB IX

DIMENSI KUALITAS KETAHANAN SOSIAL-BUDAYA (KKSBB)

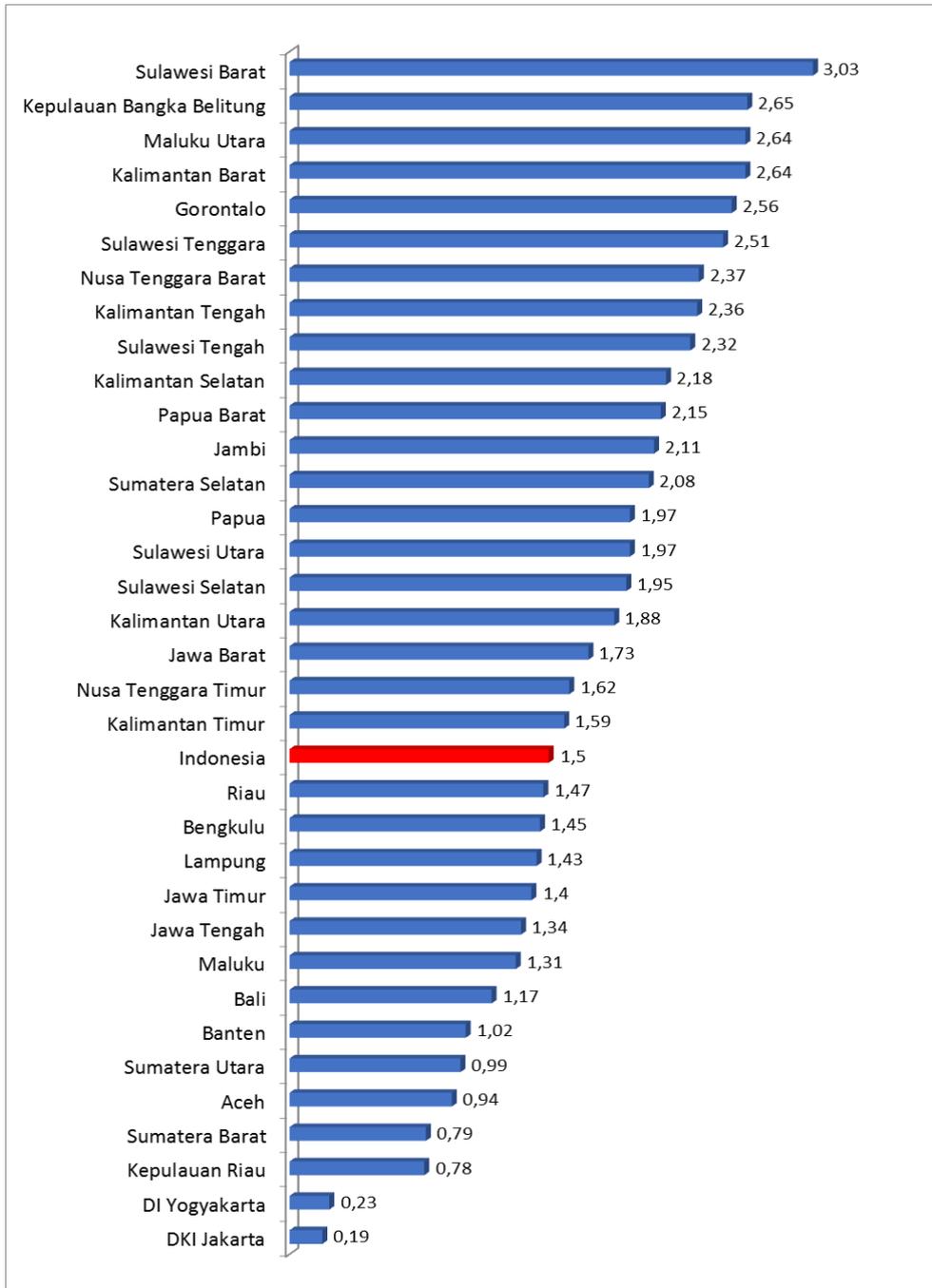
TAHUN 2020

1. Perkawinan Usia Anak.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator perkawinan usia anak yang digunakan dalam penghitungan IKK ini adalah kejadian perkawinan anak dalam rumah tangga. Sehingga nilainya berbeda dengan indikator perkawinan anak yang digunakan untuk pengukuran indeks lainnya, seperti IPA, IPHA maupun IPKA. Indikator ini merupakan indikator negatif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 kejadian perkawinan anak terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari kejadian perkawinan anak adalah terdapat perempuan berumur 20-24 tahun yang umur perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang ada kejadian perkawinan usia anak di Indonesia adalah 1,5 persen. Terdapat 20 provinsi atau 59 persen rumah tangga yang perkawinan usia anak lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 14 provinsi atau 41 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang ada perkawinan usia anak tertinggi adalah di Provinsi Sulawesi Barat dan terendah di Provinsi DKI Jakarta. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi perkawinan usia anak adalah Provinsi Sulawesi Barat, Kepulauan Bangka Belitung, Maluku Utara, Kalimantan Barat dan Gorontalo, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi DKI Jakarta, DI Yogyakarta, Kepulauan Riau, Sumatera Barat dan Aceh.



Sumber: Susenas 2020.

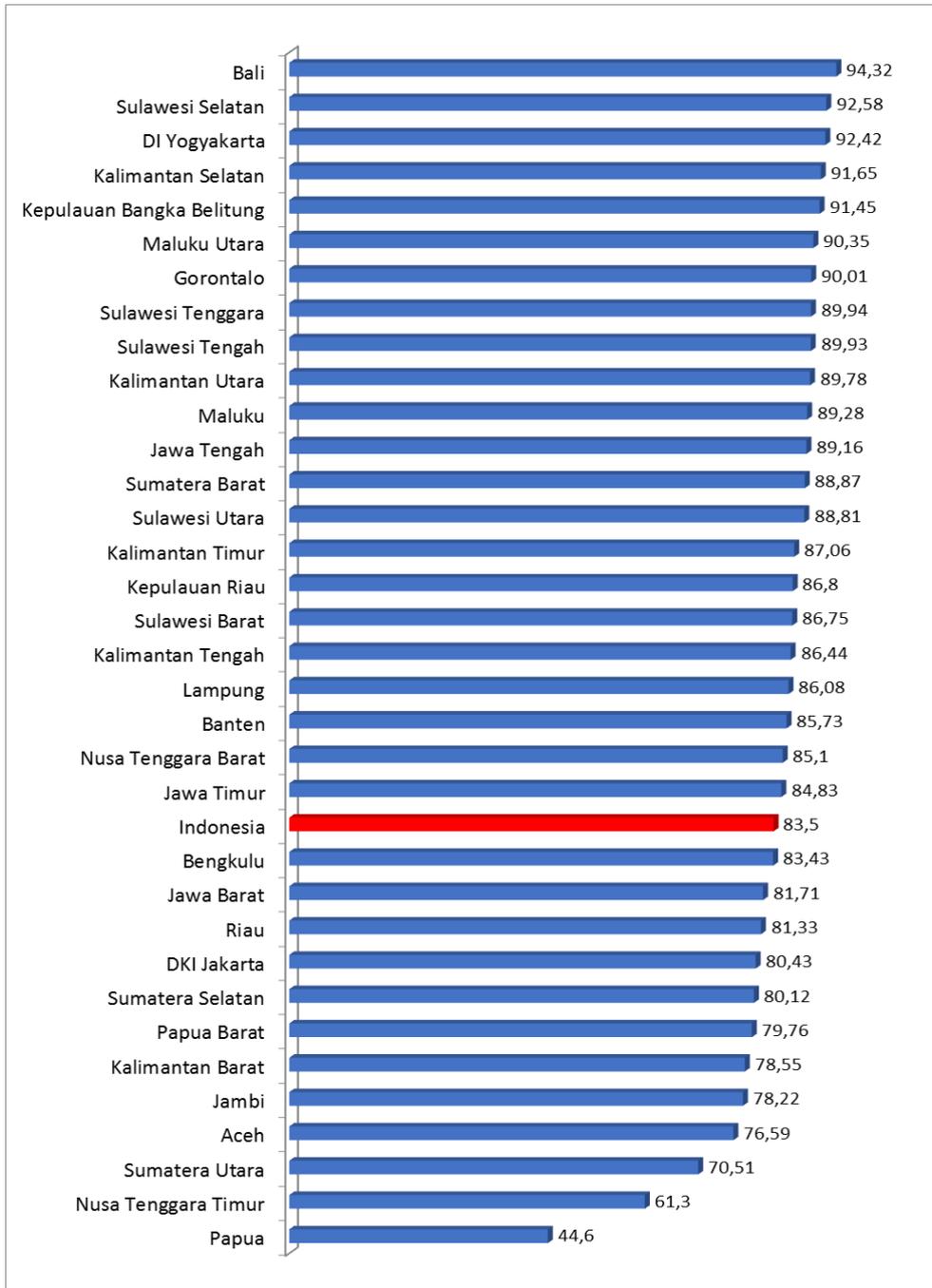
Gambar 9.1. Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak Tahun 2020.

2. Memiliki Tempat Cuci Tangan.

Data indikator ini diambil dari kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator memiliki tempat cuci tangan merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari tempat cuci tangan tetap meliputi baik yang ada di dalam rumah (kode 1) maupun di luar rumah (kode 2) (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan di Indonesia adalah 83,5 persen. Terdapat 22 provinsi atau 65 persen rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 12 provinsi atau 35 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tertinggi adalah di Provinsi Bali dan terendah di Provinsi Papua. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang memiliki tempat cuci tangan adalah Provinsi Bali, Sulawesi Selatan, DI Yogyakarta, Kalimantan Selatan dan Kepulauan Bangka Belitung dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Papua, Nusa Tenggara timur, Sumatera Utara, Aceh dan Jambi.



Sumber: Susenas 2020.

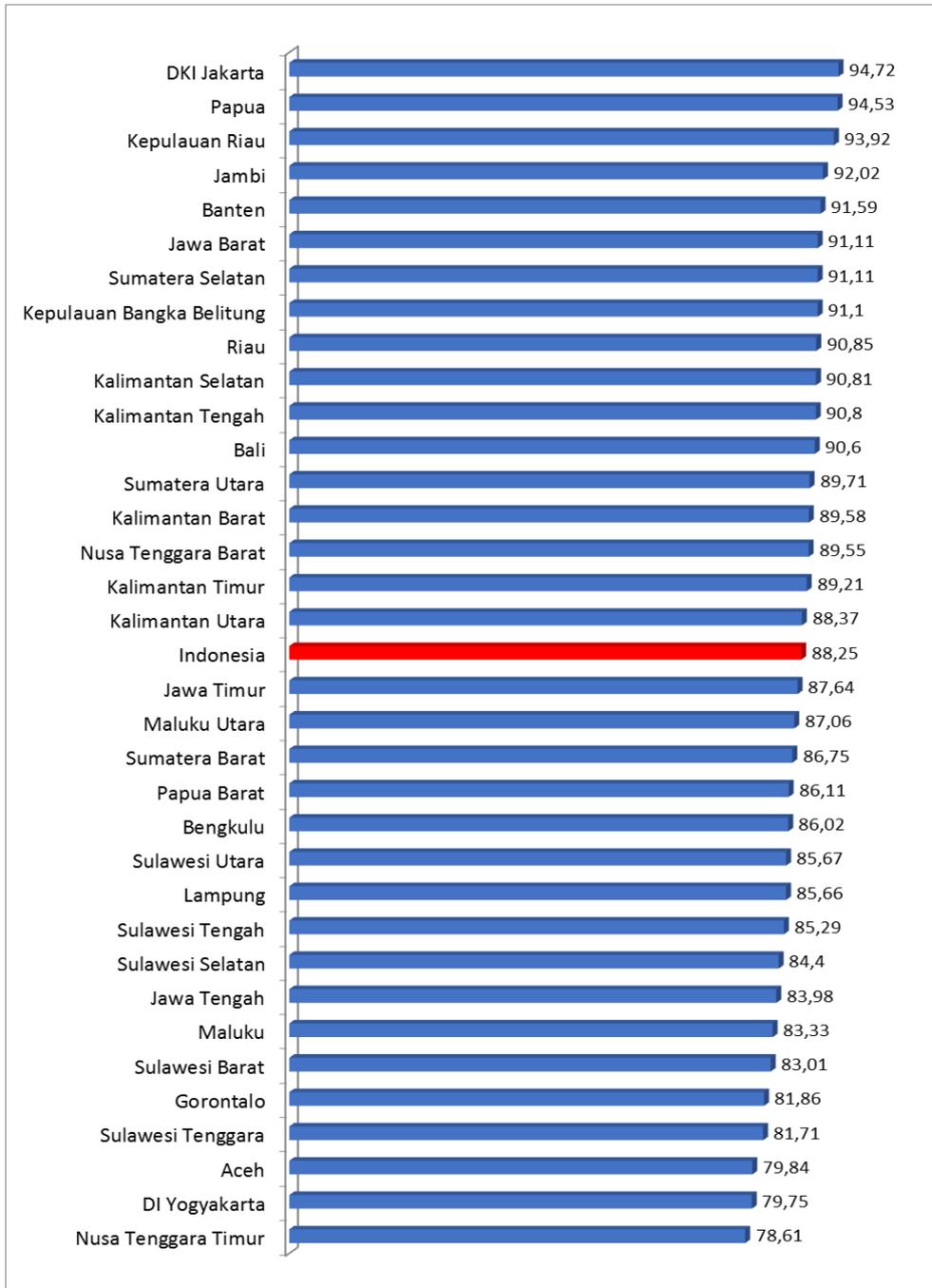
Gambar 9.2. Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap Tahun 2020.

3. Melakukan Kegiatan Sosial.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas MSBP 2018. Indikator melakukan kegiatan sosial merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari kegiatan sosial kemasyarakatan yang dimaksud meliputi kegiatan keagamaan, keterampilan, olahraga/permainan, gotong royong, arisan, kematian, sosial lainnya. Adapun lingkungan sekitar yang dimaksud adalah RT/RW/dusun/desa (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang melakukan kegiatan sosial di Indonesia adalah 88,25 persen. Terdapat 17 provinsi atau 50 persen rumah tangga yang melakukan kegiatan sosial lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 17 provinsi atau 50 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang melakukan kegiatan sosial tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang melakukan kegiatan sosial adalah Provinsi DKI Jakarta, Papua, Kepulauan Riau, Jambi dan Banten, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, DI Yogyakarta, Aceh, Sulawesi Tenggara dan Gorontalo.



Sumber: Susenas MSBP 2018.

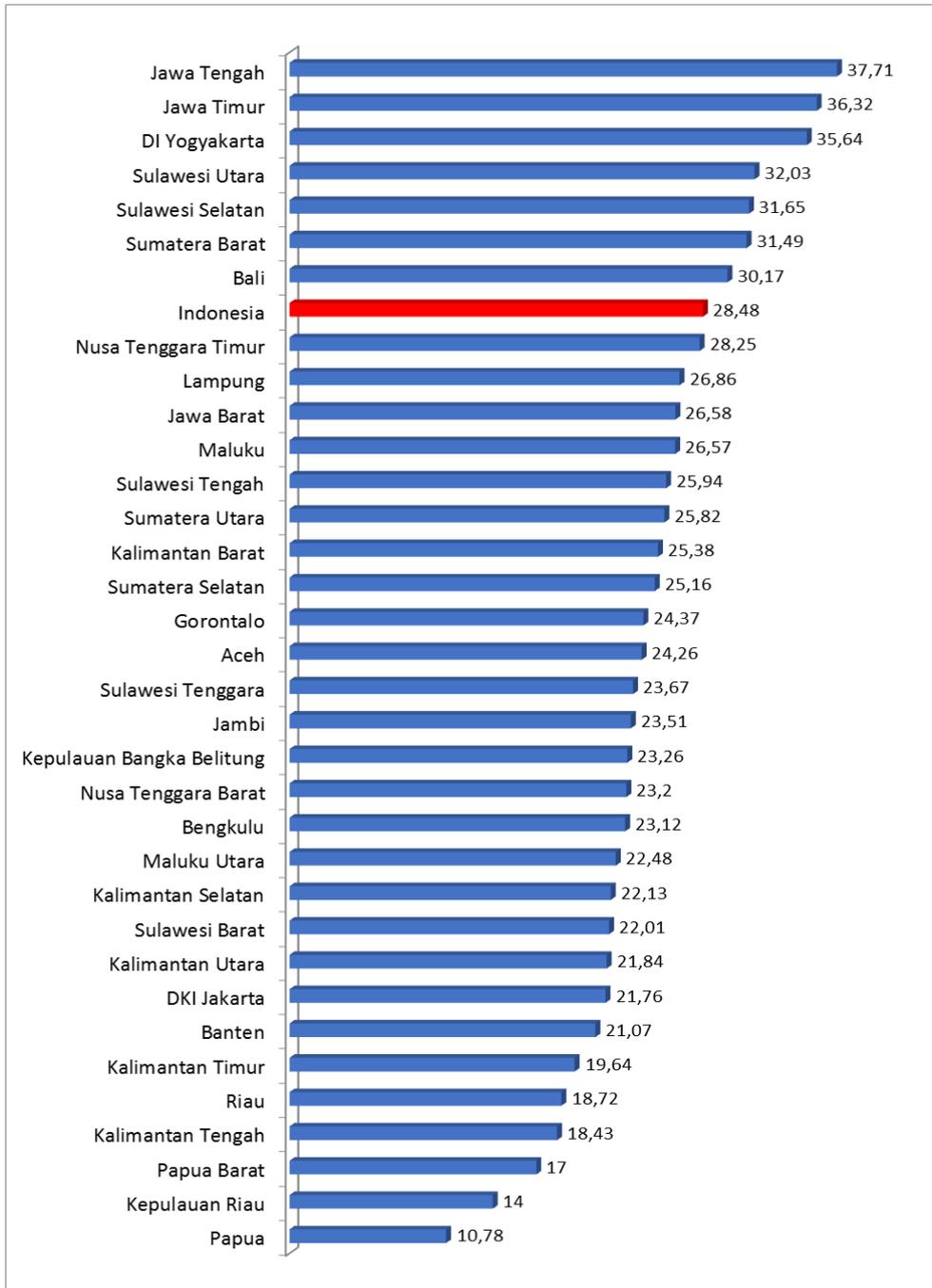
Gambar 9.3. Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial Tahun 2018.

4. Ada Lansia Dalam Rumah Tangga.

Data indikator ini diambil dari kuesioner Susenas KOR 2020. Indikator ada lansia dalam rumah tangga merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 60 tahun ke atas terhadap total rumah tangga (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga lansia di Indonesia adalah 28,48 persen. Terdapat 7 provinsi atau 21 persen rumah tangga yang ada anggota rumah tangga lansia lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 27 provinsi atau 79 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang ada anggota rumah tangga lansia tertinggi adalah di Provinsi Jawa Tengah dan terendah di Provinsi Papua. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang ada anggota rumah tangga lansia adalah Provinsi Jawa Tengah, Jawa Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Utara dan Sulawesi Selatan, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Papua, Kepulauan Riau, Papua Barat, Kalimantan Tengah dan Riau.



Sumber: Susenas 2020.

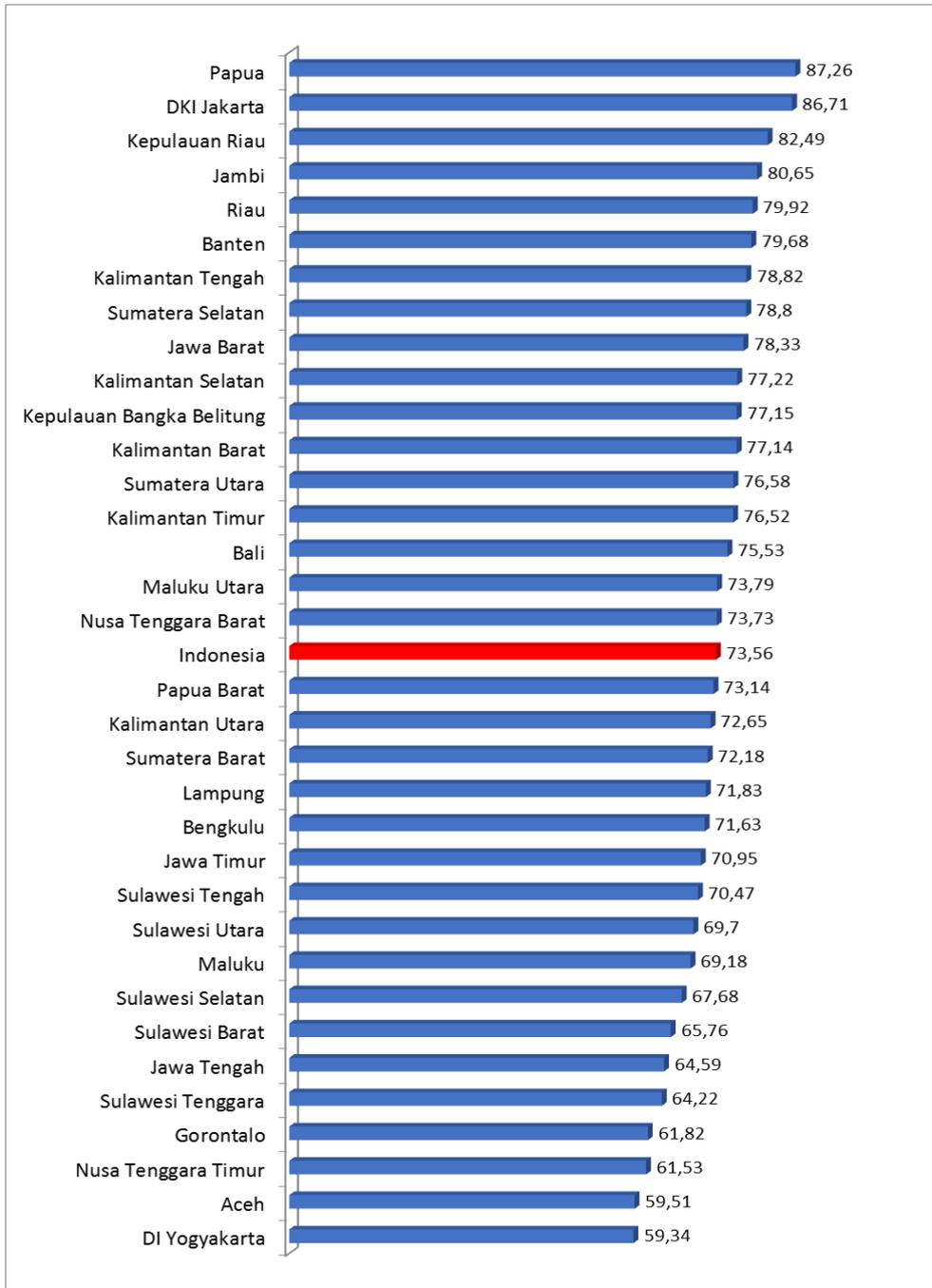
Gambar 9.4. Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+ Tahun 2020

5. Melakukan Kegiatan Keagamaan.

Data indikator ini diambil dari sumber kuesioner Susenas MSBP 2018. Indikator melakukan kegiatan keagamaan merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh data persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART melakukan kegiatan keagamaan dilingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap total rumah tangga. Adapun definisi operasional dari kegiatan keagamaan yang dimaksud tidak termasuk ibadah yang wajib dan rutin dilaksanakan, misalnya solat jum'at, kebaktian di gereja, dsb. Lingkungan sekitar yang dimaksud adalah RT/RW/dusun/desa (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan di Indonesia adalah 73,56 persen. Terdapat 17 provinsi atau 50 persen rumah tangga yang melakukan kegiatan keagamaan lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 17 provinsi atau 50 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan tertinggi adalah di Provinsi Papua dan terendah di Provinsi DI Yogyakarta. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang melakukan kegiatan keagamaan adalah Provinsi Papua, DKI Jakarta, Kepulauan Riau, Jambi dan Riau, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi DI Yogyakarta, Aceh, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo dan Sulawesi Tenggara.



Sumber: Susenas MSBP 2018.

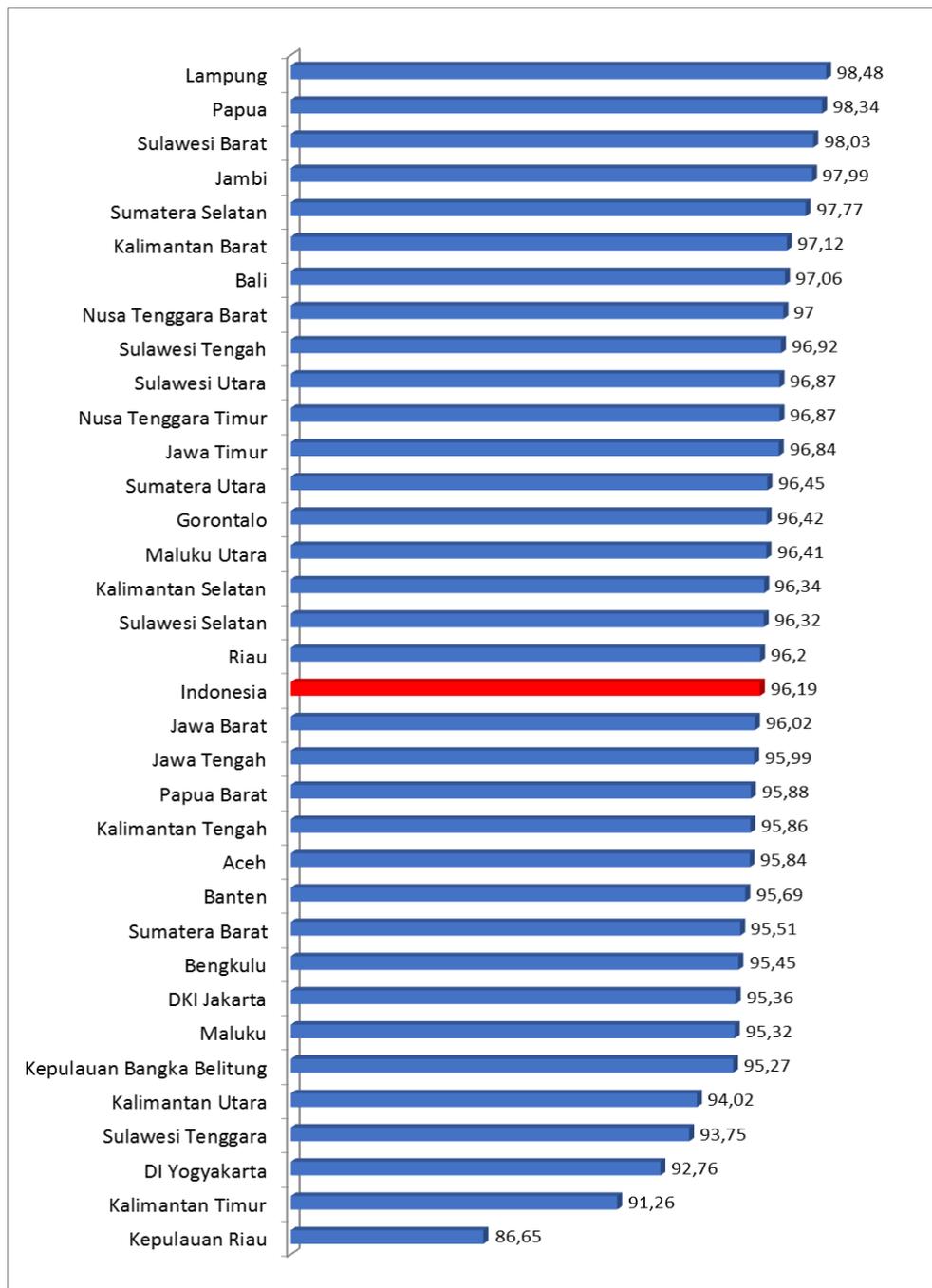
Gambar 9.5. Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan Tahun 2018.

6. Mengakses Internet Bersama Anak dan Orang Tua.

Data indikator ini diambil dari kuesioner Susenas MSBP 2018. Indikator mengakses internet bersama anak dan orang tua merupakan indikator positif yang ditunjukkan oleh persentase rumah tangga yang semua ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet. Rumus penghitungannya adalah perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun yang mengakses internet bersama orang tua/wali dalam seminggu terakhir terhadap total rumah tangga (Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a).

Diketahui bahwa persentase rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet di Indonesia adalah 96,19 persen. Terdapat 18 provinsi atau 53 persen rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet lebih tinggi dari Indonesia, dan sisanya terdapat 16 provinsi atau 47 persen yang lebih rendah dari Indonesia.

Persentase rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet tertinggi adalah di Provinsi Lampung dan terendah di Provinsi Kepulauan Riau. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet adalah Provinsi Lampung, Papua, Sulawesi Barat, Jambi dan Sumatera Selatan, dan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Kepulauan Riau, Kalimantan Timur, DI Yogyakarta, Sulawesi Tenggara, dan Kalimantan Utara.



Sumber: Susenas MSBP 2018.

Gambar 9.6. Persentase rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet Tahun 2018.

BAB X

INDEKS KUALITAS KELUARGA (IKK) TAHUN 2020

1. Penghitungan Capaian Per Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020.

Penghitungan dimensi didasarkan atas rata-rata nilai indikator yang ada di dalam suatu dimensi. Pada penghitungan indeks per dimensi pembentuk IKK di Indonesia, dimensi dengan indeks tertinggi adalah KKS (72,22) dan terendah adalah dimensi KLS (65,31). Di Provinsi Aceh, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (71,49) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (61,97). Di Provinsi Sumatera Utara, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (72,51) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (63,67). Provinsi Sumatera Barat, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKS (73,91) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (63,83). Di Provinsi Riau, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (74,48) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (63,38). Di Provinsi Jambi, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (77,01) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (64,64). Provinsi Sumatera Selatan, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKS (73,17) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (63,85). Di Provinsi Bengkulu, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (70,62) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (62,93). Di Provinsi Lampung, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKS (72,29) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (63,90). Di Provinsi Kep. Bangka Belitung, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (72,06) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (65,30). Di Provinsi Kepulauan Riau, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (78,00) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (59,79).

Di Provinsi DKI Jakarta, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (78,59) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (61,37). Di Provinsi Jawa Barat, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKS (73,22) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (65,38). Di Provinsi Jawa Tengah, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (73,55) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKF (65,11). Di Provinsi DI Yogyakarta, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (74,18) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (64,09). Di Provinsi Jawa Timur, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKS (74,51) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (67,68). Di Provinsi Banten, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKS (73,86) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (64,22).

Di Provinsi Bali, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKS (77,21) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKS (64,11). Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKS (70,40) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (60,71). Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (69,65) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (55,98).

Di Provinsi Kalimantan Barat, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (70,96) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (63,26). Di Provinsi Kalimantan Tengah, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (74,68) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (64,27). Di Provinsi Kalimantan Selatan, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (72,98) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (63,59). Di Provinsi Kalimantan Timur, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (73,92) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKSP (57,93). Di Provinsi Kalimantan Utara, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (74,83) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (61,20).

Di Provinsi Sulawesi Utara, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (72,82) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKSP (61,29). Di Provinsi Sulawesi Tengah, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (70,17) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (62,95). Di Provinsi Sulawesi Selatan, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (71,10) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (62,91). Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (73,45) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (58,56). Di Provinsi Gorontalo, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (68,58) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKSP (63,72). Di Provinsi Sulawesi Barat, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (71,55) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (62,11).

Di Provinsi Maluku, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKSBB (69,20) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (56,83). Di Provinsi Maluku Utara, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKE (70,37) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (56,84). Di Provinsi Papua Barat, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (73,01) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KKSP (60,43). Di Provinsi Papua, dimensi pembentuk IKK dengan indeks tertinggi adalah KKF (76,73) dan nilai indeks terendah adalah dimensi KLS (65,24).

Tabel 10.1. Penghitungan capaian per dimensi pembentuk IKK Tahun 2020.

No	Provinsi	Capaian Per Dimensi Tahun 2020					Capaian Dimensi	
		1: KLS	2: KKF	3: KKE	4: KKSP	5: KKSBB	Nomor Tertinggi	Nomor Terendah
1	Aceh	61,97	70,13	71,49	63,99	63,49	3 (KKE)	1 (KLS)
2	Sumatera Utara	63,67	72,51	67,86	64,06	71,75	2 (KKF)	1 (KLS)
3	Sumatera Barat	63,83	68,28	71,12	64,15	73,91	5 (KKSBB)	1 (KLS)
4	Riau	64,49	74,48	68,21	63,38	71,68	2 (KKF)	4 (KKSP)
5	Jambi	66,40	77,01	67,50	64,64	73,29	2 (KKF)	4 (KKSP)
6	Sumatera Selatan	65,48	72,33	66,07	63,85	73,17	5 (KKSBB)	4 (KKSP)
7	Bengkulu	64,21	70,04	70,62	62,93	68,76	3 (KKE)	4 (KKSP)
8	Lampung	63,90	69,59	70,00	66,22	72,29	5 (KKSBB)	1 (KLS)

No	Provinsi	Capaian Per Dimensi Tahun 2020					Capaian Dimensi	
		1: KLS	2: KKF	3: KKE	4: KKSP	5: KKSBB	Nomor Tertinggi	Nomor Terendah
9	Kep. Ba-Bel	65,30	72,06	69,86	68,41	71,33	2 (KKF)	1 (KLS)
10	Kepulauan Riau	63,04	78,00	72,62	59,79	68,01	2 (KKF)	4 (KKSP)
11	DKI Jakarta	67,25	72,07	68,30	61,37	77,61	5 (KKSBB)	4 (KKSP)
12	Jawa Barat	65,54	69,91	66,02	65,38	73,22	5 (KKSBB)	4 (KKSP)
13	Jawa Tengah	67,38	65,11	73,55	68,25	72,04	3 (KKE)	2 (KKF)
14	DI Yogyakarta	65,66	66,11	74,18	64,09	68,75	3 (KKE)	4 (KKSP)
15	Jawa Timur	68,18	69,49	70,46	67,68	74,51	5 (KKSBB)	4 (KKSP)
16	Banten	64,34	69,51	68,90	64,22	73,86	5 (KKSBB)	4 (KKSP)
17	Bali	67,39	75,67	78,59	64,11	77,21	3 (KKE)	4 (KKSP)
18	NTB	60,71	64,79	69,02	64,15	70,40	5 (KKSBB)	1 (KLS)
19	NTT	55,98	63,85	69,65	64,78	61,58	3 (KKE)	1 (KLS)
20	Kalimantan Barat	63,26	69,93	70,96	63,53	70,44	3 (KKE)	1 (KLS)
21	Kal-Teng	64,27	74,68	70,14	65,07	70,26	2 (KKF)	1 (KLS)
22	Kal-Sel	63,59	72,98	70,33	65,63	72,50	2 (KKF)	1 (KLS)
23	Kalimantan Timur	65,39	73,92	73,70	57,93	67,84	2 (KKF)	4 (KKSP)
24	Kalimantan Utara	61,20	70,88	74,83	61,35	68,92	3 (KKE)	1 (KLS)
25	Sulawesi Utara	65,98	72,82	70,73	61,29	71,70	2 (KKF)	4 (KKSP)
26	Sulawesi Tengah	62,95	70,17	69,50	64,79	69,47	2 (KKF)	1 (KLS)
27	Sulawesi Selatan	62,91	68,53	71,10	64,43	70,84	3 (KKE)	1 (KLS)
28	Sul-Tra	58,56	67,24	73,45	63,61	63,22	3 (KKE)	1 (KLS)
29	Gorontalo	64,43	67,23	68,58	63,72	64,58	3 (KKE)	4 (KKSP)
30	Sulawesi Barat	62,11	66,76	71,55	65,89	65,01	3 (KKE)	1 (KLS)
31	Maluku	56,83	68,69	67,35	61,05	69,20	5 (KKSBB)	1 (KLS)
32	Maluku Utara	56,84	68,43	70,37	59,59	69,14	3 (KKE)	1 (KLS)
33	Papua Barat	60,61	73,01	70,85	60,43	65,71	2 (KKF)	4 (KKSP)
34	Papua	65,24	76,73	66,35	65,59	67,07	2 (KKF)	1 (KLS)
35	INDONESIA	65,31	69,72	69,71	65,32	72,22	5 (KKSBB)	1 (KLS)

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

1,2,3,4,5 adalah nomor dimensi yang menunjukkan nilai tertinggi atau terendah.

Di Indonesia dimensi kualitas ketahanan sosial budaya merupakan dimensi pembentuk IKK dengan urutan tertinggi, sedangkan dimensi kualitas legalitas keluarga merupakan dimensi pembentuk IKK dengan urutan terendah. Pada dimensi kualitas legalitas struktur, terdapat 18 provinsi (52,94%) dengan urutan terendah di Indonesia. Pada dimensi kualitas ketahanan fisik, terdapat 12 provinsi (35,29%) menjadi urutan tertinggi dan 1 provinsi (0,29%) menjadi urutan terendah di Indonesia. Pada dimensi kualitas ketahanan ekonomi, terdapat 12 provinsi (35,19%) menjadi urutan tertinggi di Indonesia. Pada dimensi kualitas ketahanan sosial psikologi, terdapat 15 provinsi (43,23%) menjadi urutan terendah di Indonesia. Pada dimensi kualitas ketahanan sosial budaya, terdapat 10 provinsi (29,41%) menjadi urutan tertinggi di Indonesia.

Tabel 10.2. Rekapitulasi Urutan Tertinggi dan Terendah Dimensi Pembentuk IKK Per Provinsi

No	Dimensi	Urutan Capaian Tertinggi	Urutan Capaian Terendah	Urutan di Indonesia	
		Jumlah Provinsi (%)	Jumlah Provinsi (%)	Tertinggi	Terendah
1	Kualitas Legalitas Struktur	0 (0,00)	18 (52,94)		V
2	Kualitas Ketahanan Fisik	12 (35,29)	1 (0,29)	-	-
3	Kualitas Ketahanan Ekonomi	13 (38,24)	0 (0,00)		
4	Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi	0 (0,00)	15 (43,23)		
5	Kualitas Ketahanan Sosial Budaya	9 (26,47)	0 (0,00)	V	

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

Urutan Tertinggi dan urutan terendah tidak harus berpasangan pada provinsi yang sama.

Berdasarkan hasil rekapitulasi kategorisasi IKK per dimensi Tahun 2020, dapat diketahui bahwa semua dimensi pembentuk IKK di Indonesia termasuk dalam Kategori 2 yaitu **“Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak”**.

Tabel 10.3. Rekapitulasi Kategorisasi IKK Berdasarkan Dimensi Untuk Provinsi dan Indonesia Tahun 2020.

No	Nama Dimensi	Kategori Capaian Dimensi Jumlah Provinsi (%)			Kategori IKK Indonesia
		1	2	3	
1	Kualitas Legalitas- Struktur	0	34 (100,00)	0 (0,00)	2
2	Kualitas Ketahanan Fisik	0	30 (88,24)	4 (11,76)	2
3	Kualitas Ketahanan Ekonomi	0	33 (97,06)	1 (2,94)	2
4	Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	0	34 (100,00)	0 (0,00)	2
5	Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya	0	32 (94,12)	2 (5,88)	2

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

Kategori 1= Kualitas keluarga yang kurang responsif gender dan hak anak (IKK < 50,00).

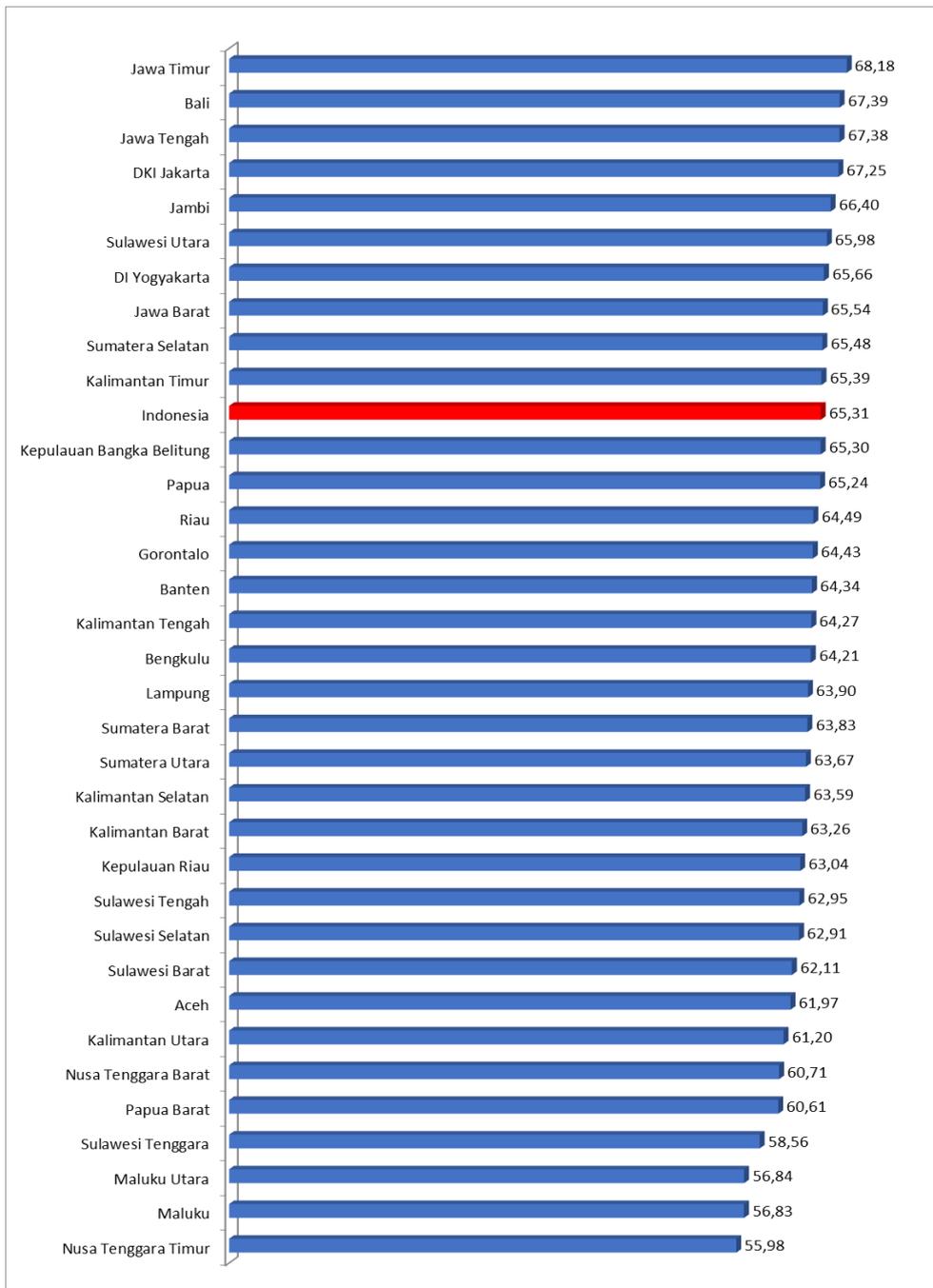
Kategori 2= Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak (50,00 < IKK ≤ 75,00).

Kategori 3= Kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak (IKK > 75,00).

a. Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) Tahun 2020

Nilai dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS) pada Tahun 2020 di Indonesia adalah 65,31. Terdapat 10 provinsi atau 29 persen yang mempunyai nilai dimensi KLS yang lebih tinggi dari Indonesia. Sisanya, terdapat 24 provinsi atau 71 persen yang mempunyai nilai dimensi KLS yang lebih rendah dari Indonesia.

Nilai dimensi KLS tertinggi adalah di Provinsi Jawa Timur dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Adapun 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai nilai dimensi KLS adalah Provinsi Jawa Timur, Bali, Jawa Tengah, DKI Jakarta dan Jambi, sedangkan 5 (lima) provinsi terendah adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Sulawesi Tenggara dan Papua Barat.



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.1a. Dimensi KLS pembentuk IKK Tahun 2020.

Berikut ini disajikan tabel kategori provinsi berdasarkan dimensi kualitas legalitas-struktur. Berdasarkan data kategorisasi provinsi berdasarkan dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS), dapat diketahui bahwa semua provinsi di Indonesia mempunyai indeks dengan kriteria kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak.

Tabel 10.4. Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)

No	Kategori Kualitas Keluarga	Jumlah Provinsi (n)	Persen
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	0	0,00
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	34	100,00
3	Responsif Gender dan Hak Anak	0	0,00
No	Kategori Kualitas Keluarga	Nama Provinsi	
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	Tidak ada	
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	Semua provinsi	
3	Responsif Gender dan Hak Anak	Tidak ada	

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

Kategori 1= Kualitas keluarga yang kurang responsif gender dan hak anak ($IKK < 50,00$).

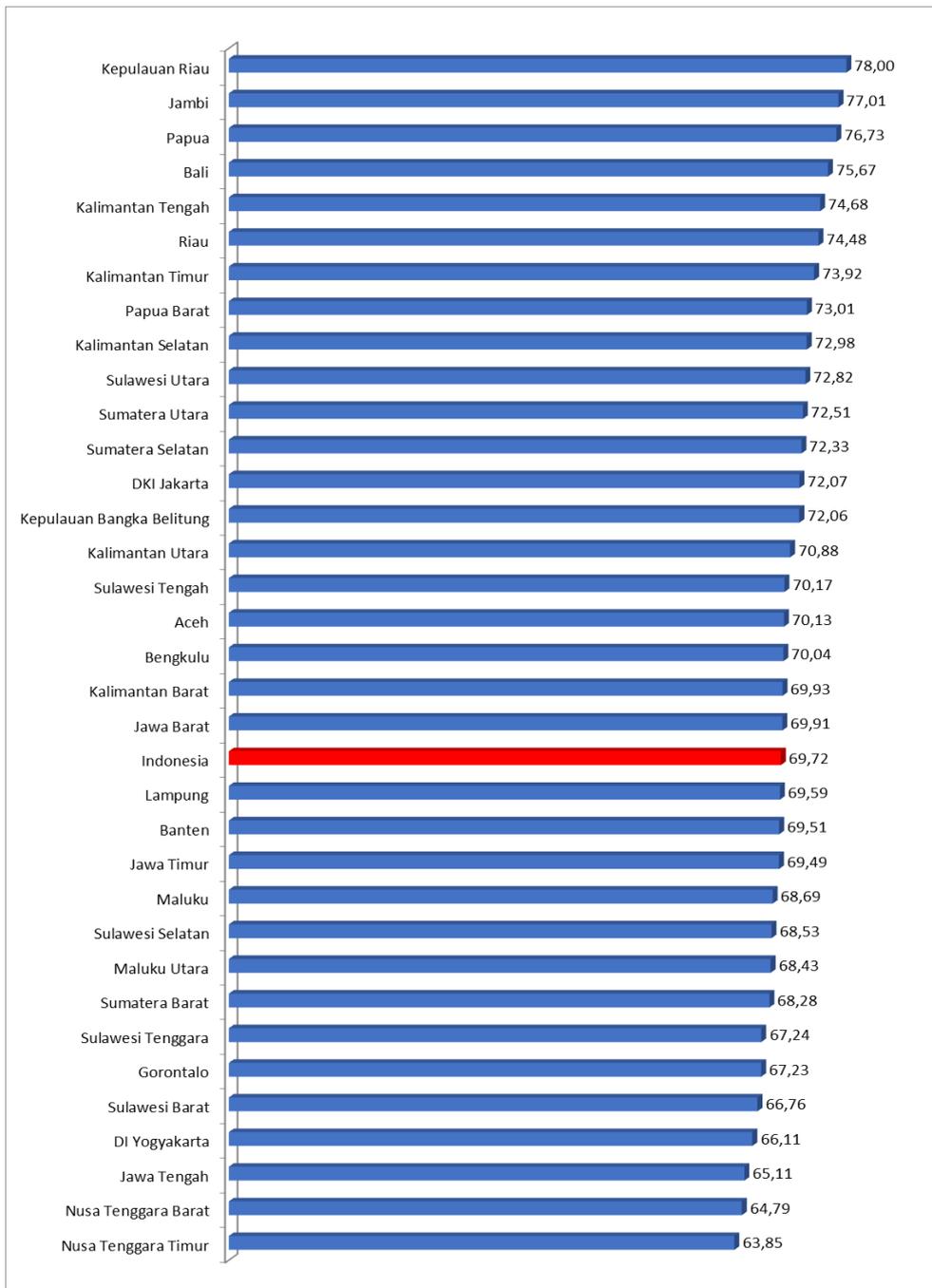
Kategori 2= Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak ($50,00 < IKK \leq 75,00$).

Kategori 3= Kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak ($IKK > 75,00$).

b. Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) Tahun 2020

Nilai dimensi kualitas ketahanan fisik (KKF) pada tahun 2020 di Indonesia adalah 69,72. Terdapat 20 provinsi atau 59 persen yang mempunyai nilai dimensi KKF yang lebih tinggi dari Indonesia. Sisanya, terdapat 14 provinsi atau 41 persen yang mempunyai nilai dimensi KKF yang lebih rendah dari Indonesia.

Nilai dimensi KKF tertinggi adalah di Provinsi Kepulauan Riau dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai nilai dimensi KKF adalah Provinsi Kepulauan Riau, Jambi, Papua, Bali dan Kalimantan Tengah. Adapun 5 (lima) provinsi terendah yang mempunyai nilai KKF adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Nusa Tenggara Barat, Jawa Tengah, DI Yogyakarta dan Sulawesi Barat.



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.1b. Dimensi KKF pembentuk IKK Tahun 2020.

Berikut ini disajikan tabel kategori provinsi berdasarkan dimensi kualitas ketahanan fisik.

Tabel 10.5. Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF).

No	Kategori Kualitas Keluarga	Jumlah Provinsi (n)	Persen
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	0	0,00
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	30	88,24
3	Responsif Gender dan Hak Anak	4	11,76
No	Kategori Kualitas Keluarga	Nama Provinsi	
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	Tidak Ada	
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	30 provinsi	
3	Responsif Gender dan Hak Anak	Kepulauan Riau, Jambi, Papua dan Bali	

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

Kategori 1= Kualitas keluarga yang kurang responsif gender dan hak anak ($IKK < 50,00$).

Kategori 2= Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak ($50,00 < IKK \leq 75,00$).

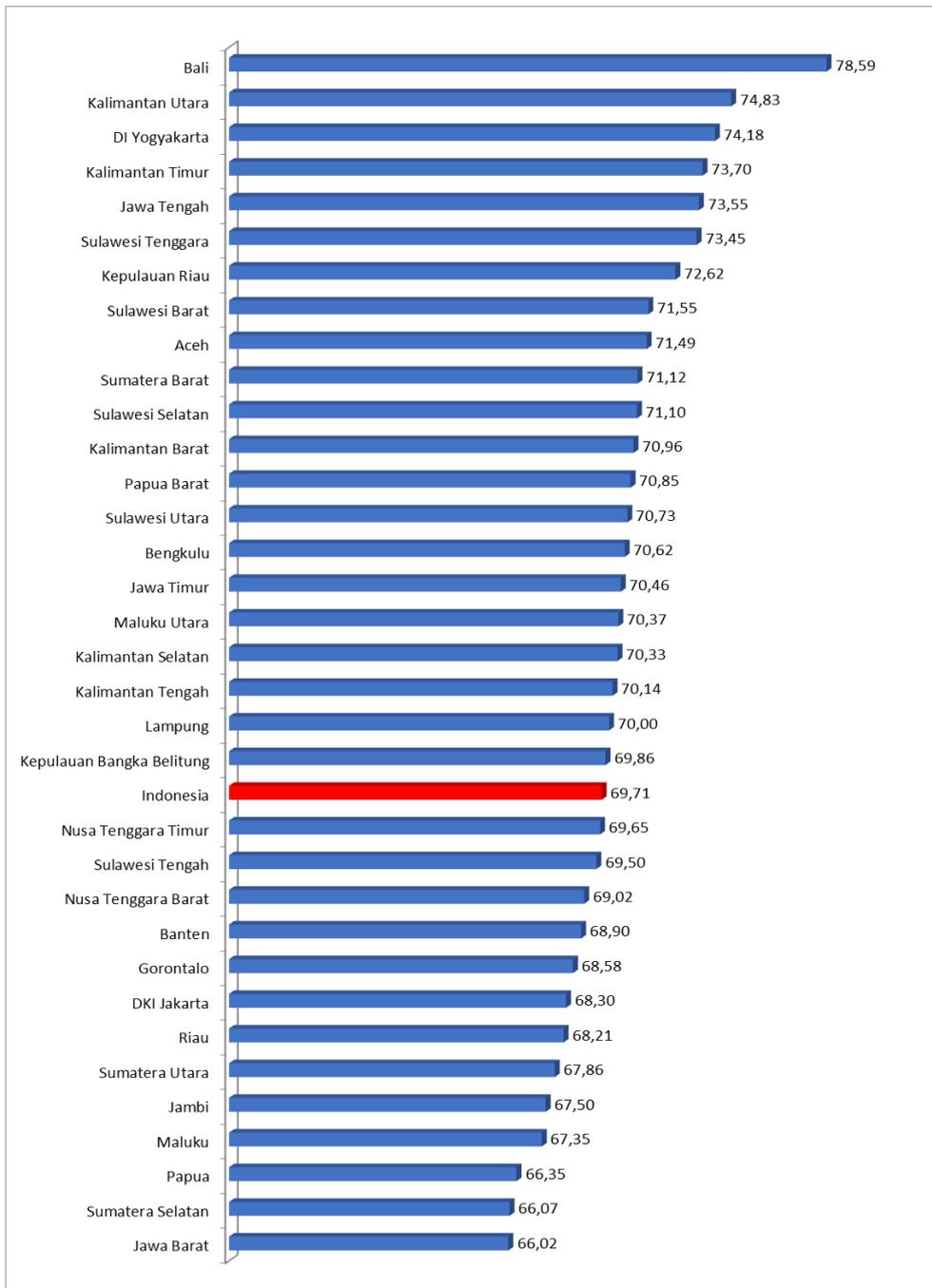
Kategori 3= Kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak ($IKK > 75,00$).

Berdasarkan data kategorisasi provinsi **Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)**, dapat diketahui bahwa terdapat 30 provinsi (88%) dari seluruh provinsi di Indonesia mempunyai indeks dengan kriteria kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak dan 4 provinsi (12%) dengan kriteria kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak.

c. Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) Tahun 2020.

Nilai dimensi kualitas ketahanan ekonomi (KKE) pada tahun 2020 di Indonesia adalah 69,71. Terdapat 21 provinsi atau 62 persen yang mempunyai nilai dimensi KKE yang lebih tinggi dari Indonesia. Sisanya, terdapat 13 provinsi atau 38 persen yang mempunyai nilai dimensi KKE yang lebih rendah dari Indonesia.

Nilai dimensi KKE tertinggi adalah di Provinsi Bali dan terendah di Provinsi Jawa Barat. Terdapat 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai nilai dimensi KKE adalah Provinsi Bali, Kalimantan Utara, DI Yogyakarta, Kalimantan Timur dan Jawa Tengah. Adapun 5 (lima) provinsi terendah yang mempunyai nilai KKE adalah Provinsi Jawa Barat, Sumatera Selatan, Papua, Maluku dan Jambi.



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.1c. Dimensi KKE pembentuk IKK Tahun 2020.

Berikut ini disajikan tabel kategori provinsi berdasarkan dimensi kualitas ketahanan ekonomi. Berdasarkan data kategorisasi provinsi **Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)**, dapat diketahui bahwa terdapat 33 provinsi (97%) dari seluruh provinsi di Indonesia mempunyai

indeks dengan kriteria kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak dan 1 provinsi (3%) dengan kriteria kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak.

Tabel 10.6. Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)

No	Kategori Kualitas Keluarga	Jumlah Provinsi (n)	Persen
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	0	0,00
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	33	97,06
3	Responsif Gender dan Hak Anak	1	2,94
No	Kategori Kualitas Keluarga	Nama Provinsi	
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	Tidak ada	
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	33 provinsi	
3	Responsif Gender dan Hak Anak	Bali	

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

Kategori 1= Kualitas keluarga yang kurang responsif gender dan hak anak ($IKK < 50,00$).

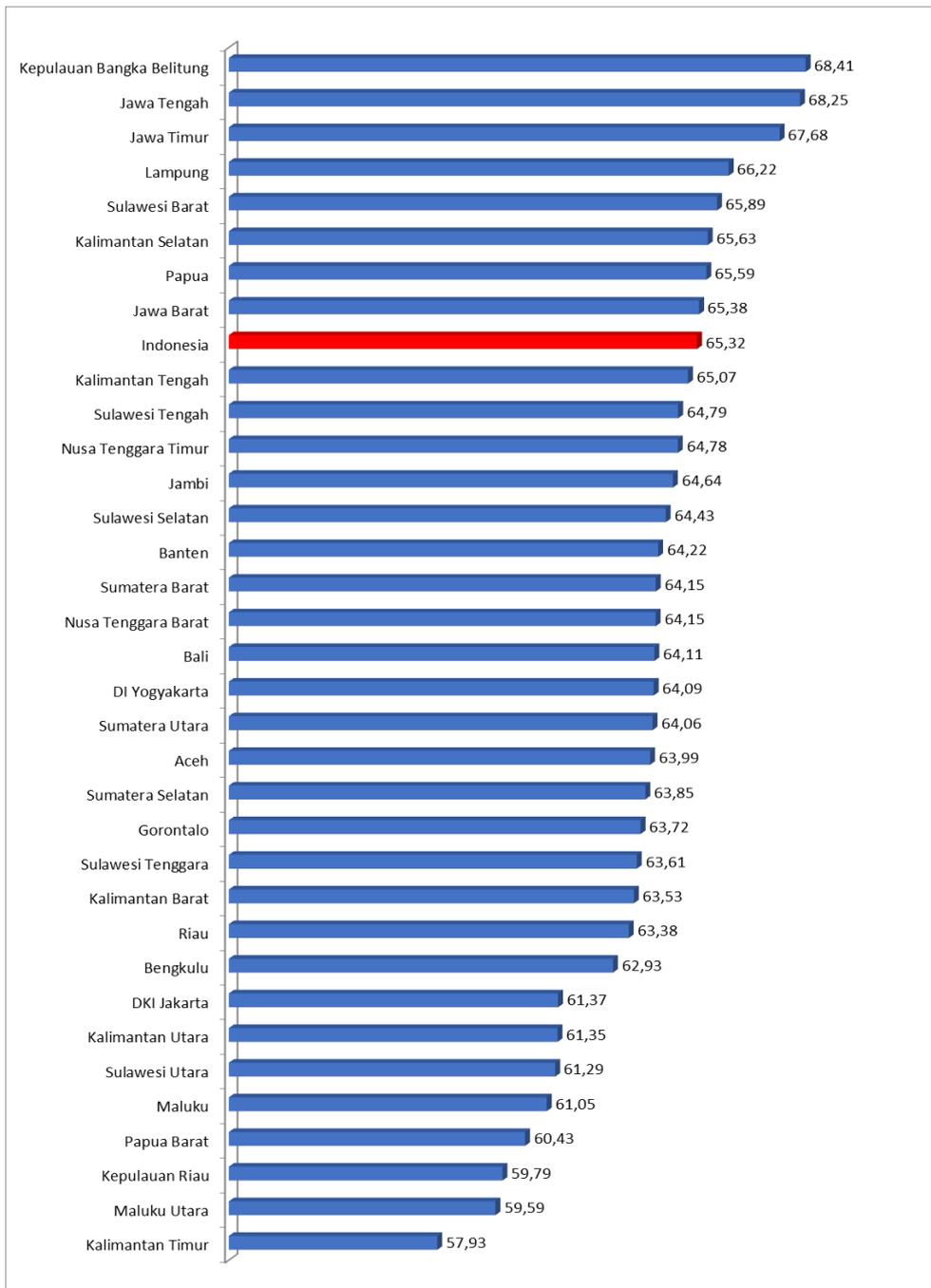
Kategori 2= Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak ($50,00 < IKK \leq 75,00$).

Kategori 3= Kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak ($IKK > 75,00$).

d. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) Tahun 2020

Nilai dimensi kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) pada tahun 2020 di Indonesia adalah 65,32. Terdapat 8 provinsi atau 24 persen yang mempunyai nilai dimensi KKSP yang lebih tinggi dari Indonesia. Sisanya, terdapat 26 provinsi atau 76 persen yang mempunyai persentase dimensi KKSP yang lebih rendah dari Indonesia.

Nilai dimensi KKSP tertinggi adalah di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung dan terendah di Provinsi Kalimantan Timur. Terdapat 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai nilai dimensi KKSP adalah Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, Jawa Tengah, Jawa Timur, Lampung dan Sulawesi Barat. Adapun 5 (lima) provinsi terendah yang mempunyai nilai dimensi KKSP adalah Provinsi Kalimantan Timur, Maluku Utara, Kepulauan Riau, Papua Barat dan Maluku.



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.1d. Dimensi KKSP pembentuk IKK Tahun 2020.

Berikut ini disajikan tabel kategori provinsi berdasarkan dimensi kualitas ketahanan sosial-psikologi. Berdasarkan data kategorisasi provinsi dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP), dapat diketahui bahwa semua provinsi di Indonesia mempunyai indeks dengan kriteria kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak.

Tabel 10.7. Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP).

No	Kategori Kualitas Keluarga	Jumlah Provinsi (n)	Persen
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	0	0,00
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	34	100,00
3	Responsif Gender dan Hak Anak	0	0,00
No	Kategori Kualitas Keluarga	Nama Provinsi	
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	Tidak ada	
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	Semua provinsi	
3	Responsif Gender dan Hak Anak	Tidak ada	

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

Kategori 1= Kualitas keluarga yang kurang responsif gender dan hak anak ($IKK < 50,00$).

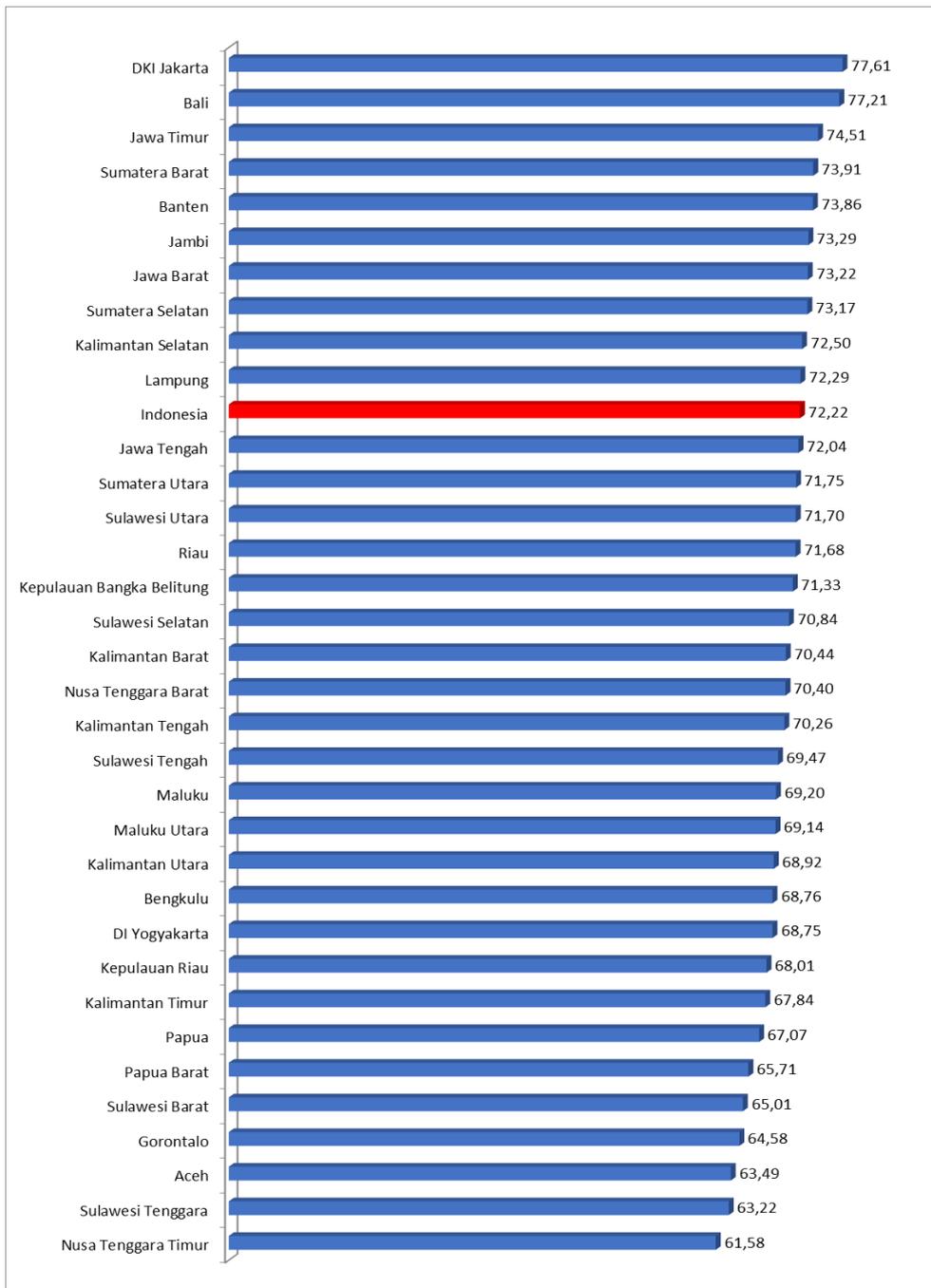
Kategori 2= Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak ($50,00 < IKK \leq 75,00$).

Kategori 3= Kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak ($IKK > 75,00$).

e. Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB) Tahun 2020

Nilai dimensi kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB) pada tahun 2020 di Indonesia adalah 72,22. Terdapat 10 provinsi atau 29 persen yang mempunyai nilai dimensi KKSB yang lebih tinggi dari Indonesia. Sisanya, terdapat 24 provinsi atau 71 persen yang mempunyai nilai dimensi KKSB yang lebih rendah dari Indonesia.

Nilai dimensi KKSB tertinggi adalah di Provinsi DKI Jakarta dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai nilai dimensi KKSB adalah Provinsi DKI Jakarta, Bali, Jawa Timur, Sumatera Barat dan Banten. Adapun 5 (lima) provinsi terendah yang mempunyai nilai dimensi KKSB adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Tenggara, Aceh, Gorontalo dan Sulawesi Barat.



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.1e. Dimensi KCSB pembentuk IKK untuk Indonesia Tahun 2020.

Berikut ini disajikan tabel kategori provinsi berdasarkan dimensi kualitas ketahanan sosial-budaya. Berdasarkan data kategorisasi provinsi Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KCSB), dapat diketahui bahwa terdapat 32 provinsi (94%) dari seluruh provinsi di Indonesia mempunyai indeks dengan kriteria kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak dan 2 provinsi (6%) dengan kriteria kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak.

Tabel 10.8. Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSb).

No	Kategori	Jumlah Provinsi (n)	Persen
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	0	0,00
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	32	94,12
3	Responsif Gender dan Hak Anak	2	5,88
No	Kategori Kualitas Keluarga	Nama Provinsi	
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	Tidak ada	
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	Selain 2 provinsi Kategori 3	
3	Responsif Gender dan Hak Anak	DKI Jakarta dan Bali	

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

Kategori 1= Kualitas keluarga yang kurang responsif gender dan hak anak ($IKK < 50,00$).

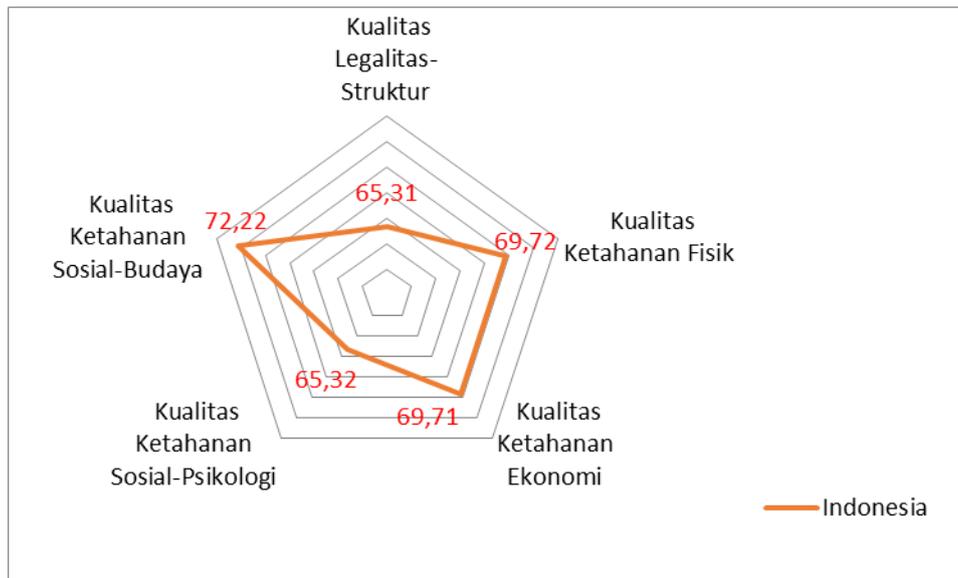
Kategori 2= Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak ($50,00 < IKK \leq 75,00$).

Kategori 3= Kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak ($IKK > 75,00$).

2. Analisis Web Per Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020.

a. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Indonesia Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK yaitu dimensi KLS, KKF, KKE, KKSP dan KKSb di tingkat Indonesia dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di tingkat Indonesia, dimensi KKSb menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada tingkat Indonesia urutannya adalah dimensi Kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb), Kualitas ketahanan fisik (KKF), kualitas ketahanan ekonomi KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas legalitas-struktur (KLS).



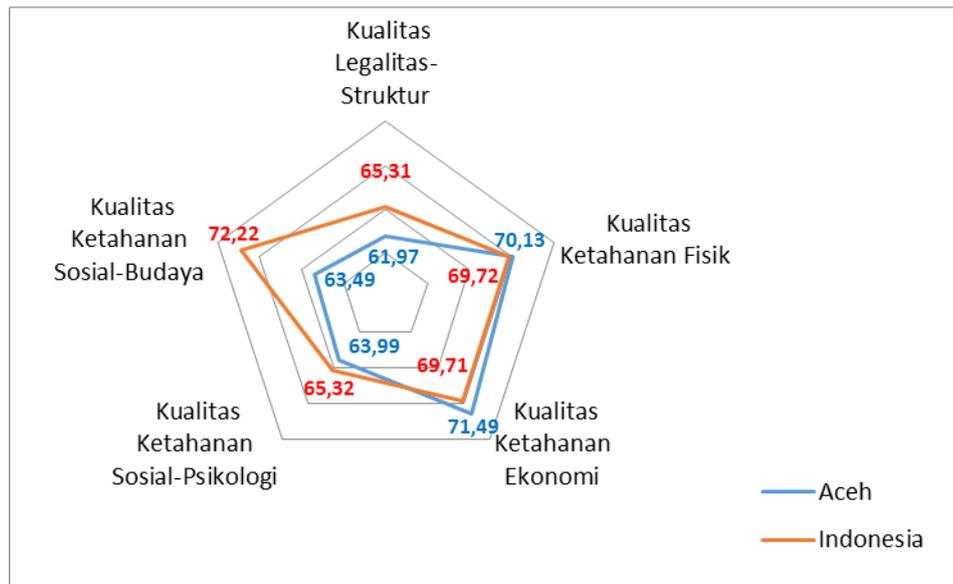
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2a. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Indonesia Tahun 2020.

b. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Aceh Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Aceh yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSBB) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Aceh, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKF, KKSP, KKSBB dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Aceh dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSBB dan KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKF dan KKE di atas Indonesia.



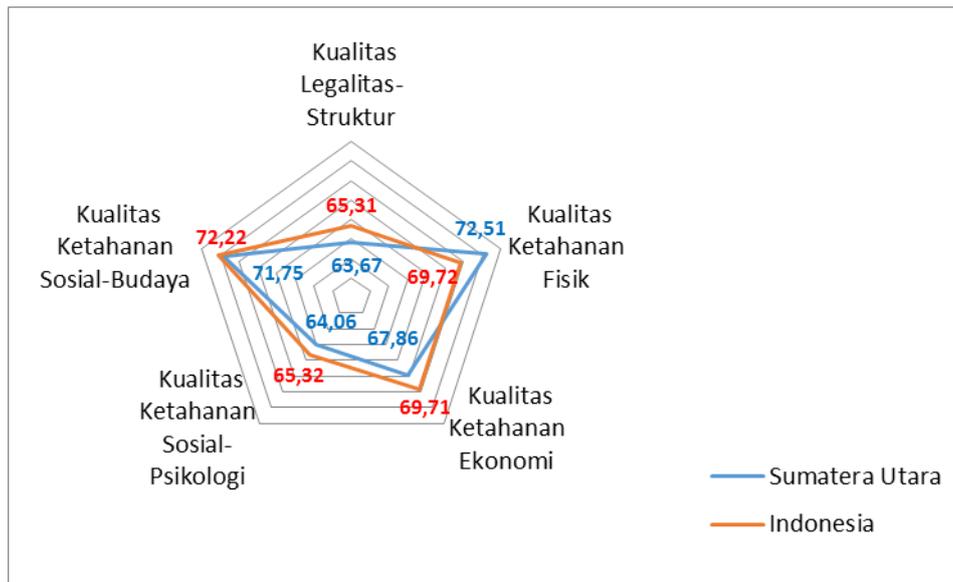
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2b. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Aceh Tahun 2020

c. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sumatera Utara yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSBB) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Sumatera Utara, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKSBB, KKE, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sumatera Utara dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSBB, KKE dan KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKF di atas Indonesia.



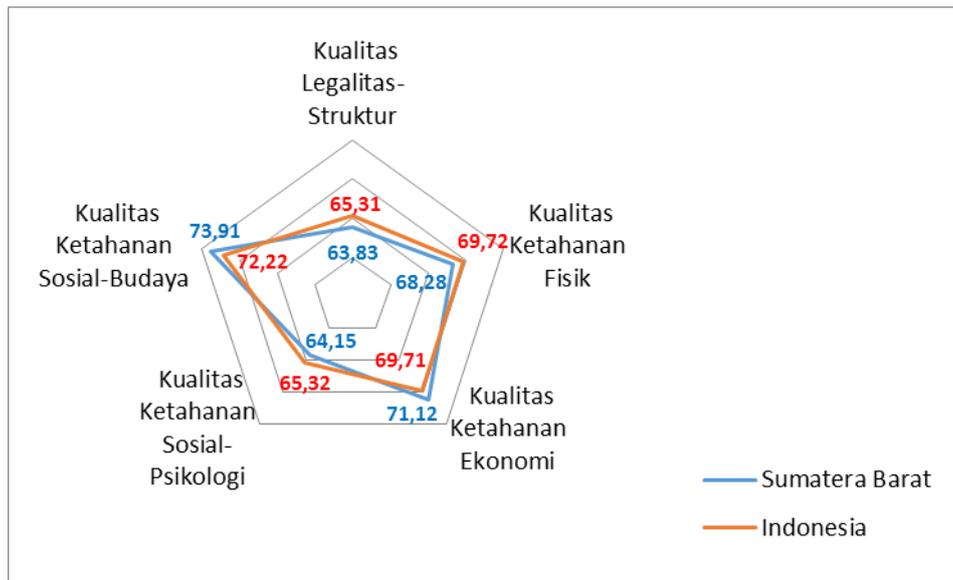
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2c. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK di Provinsi Sumatera Utara Tahun 2020

d. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sumatera Barat yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSBB) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Sumatera Barat, dimensi KKSBB menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKSBB, KKE, KKF, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sumatera Barat dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSP dan KKF berada dibawah Indonesia, dimensi KKSBB dan KKE di atas Indonesia.



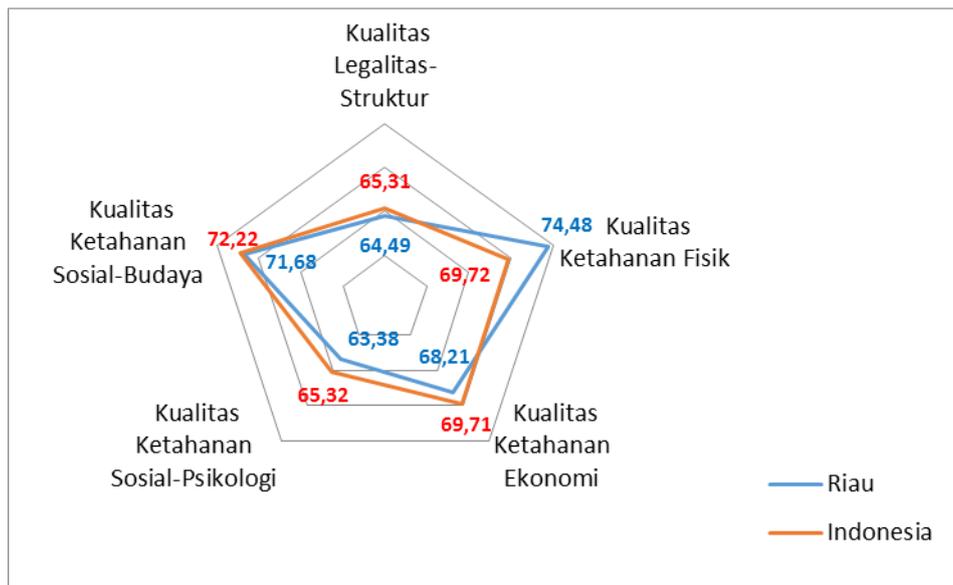
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2d. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sumatera Barat Tahun 2020

e. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Riau Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Riau yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Riau, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKSB, KKE, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Riau dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSB, KKSP dan KKE berada dibawah Indonesia, dimensi KKF di atas Indonesia.



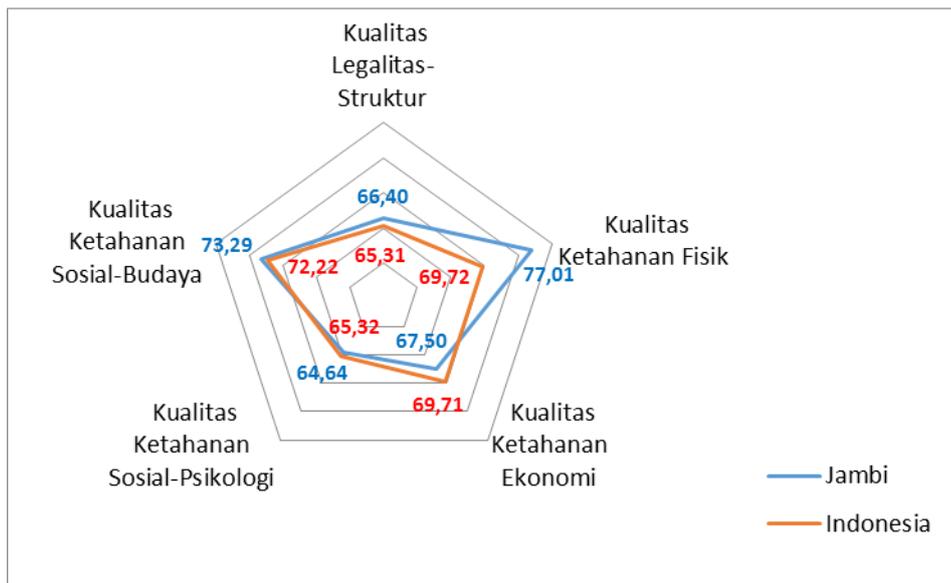
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2e. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Riau Tahun 2020

f. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jambi Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Jambi yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psiologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak, sedangkan dimensi Kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Jambi, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKSb, KKE, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Jambi dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KKE dan KKSP berada di bawah Indonesia, dimensi KLS, KKSb, KKSP dan KKF diatas Indonesia.



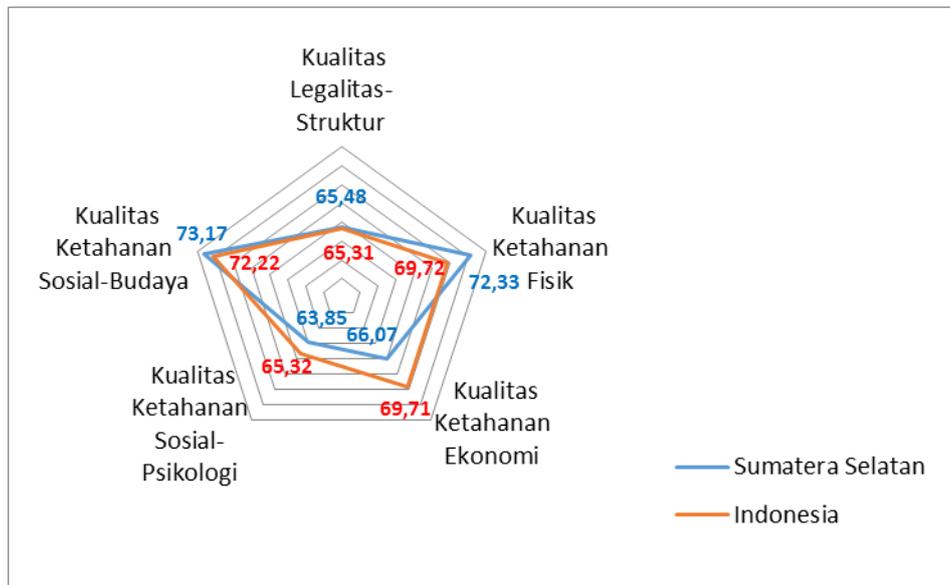
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2f. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jambi Tahun 2020

g. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sumatera Selatan yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Sumatera Selatan, dimensi KKSB menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKSB, KKF, KKE, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sumatera Selatan dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KKSP dan KKE berada dibawah Indonesia, dimensi KLS, KKSB dan KKF diatas Indonesia.



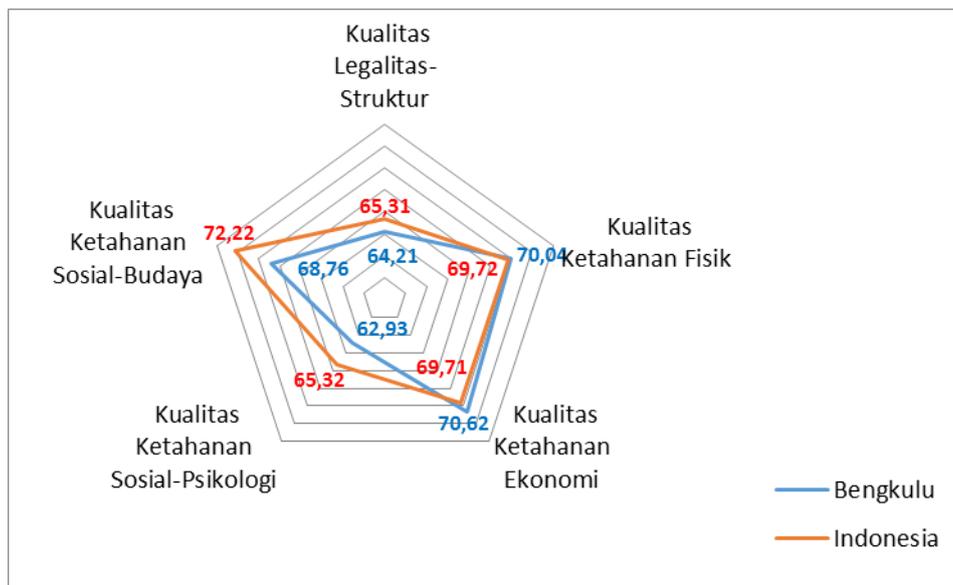
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2g. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2020

h. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Bengkulu Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Bengkulu yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Bengkulu, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKF, KKSB, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Bengkulu dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSB dan KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKE dan KKF di atas Indonesia.



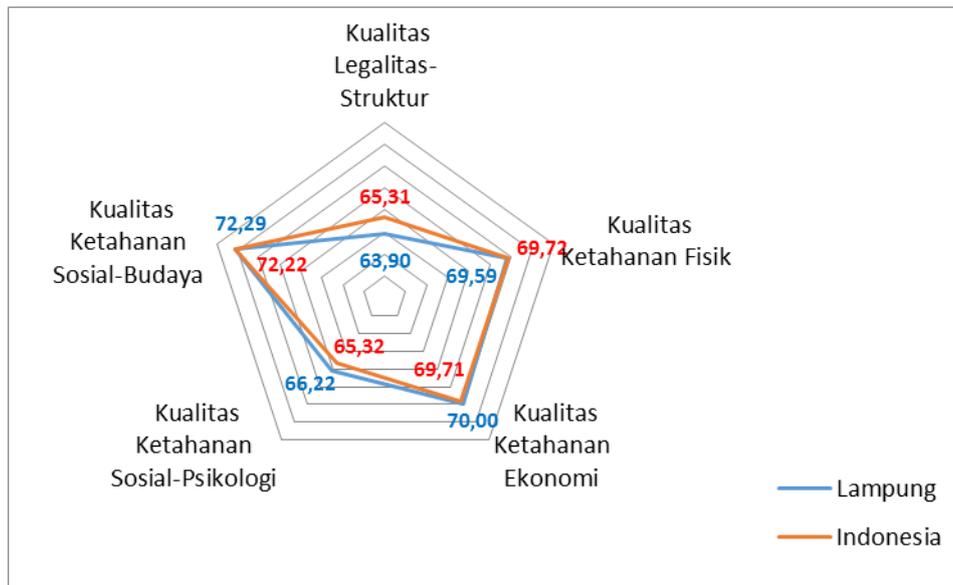
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2h. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Bengkulu Tahun 2020

i. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Lampung Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Lampung yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Lampung, dimensi KKSB menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKSB, KKE, KKF, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Lampung dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian KLS dan KKF berada dibawah Indonesia, dimensi KKSB, KKSP dan KKE di atas Indonesia.



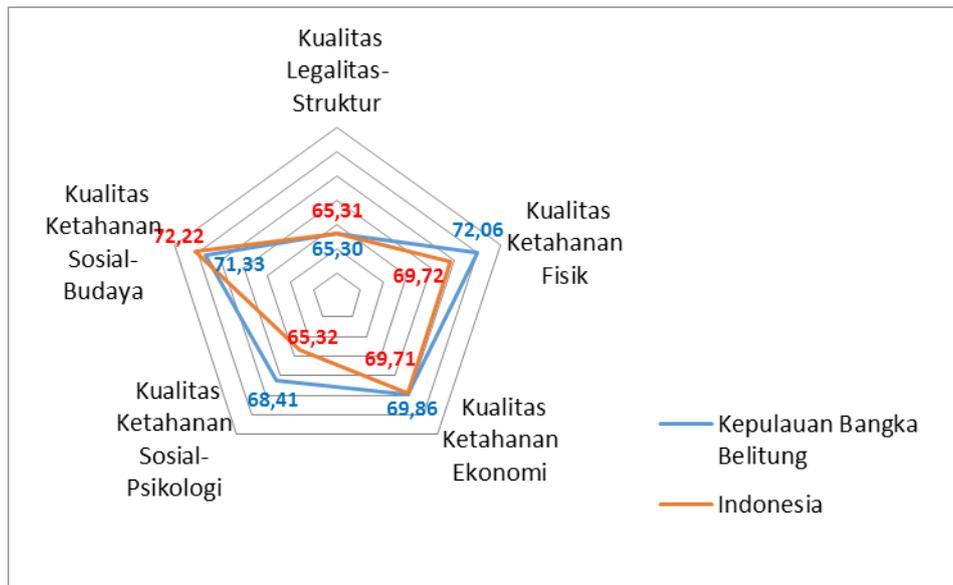
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2i. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Lampung Tahun 2020

j. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kep. Bangka Belitung Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Bangka Belitung yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSBB) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Bangka Belitung, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKSBB, KKE, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Bangka Belitung dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian KLS dan KKSBB berada dibawah Indonesia, dimensi KKF, KKSP dan KKE di atas Indonesia.



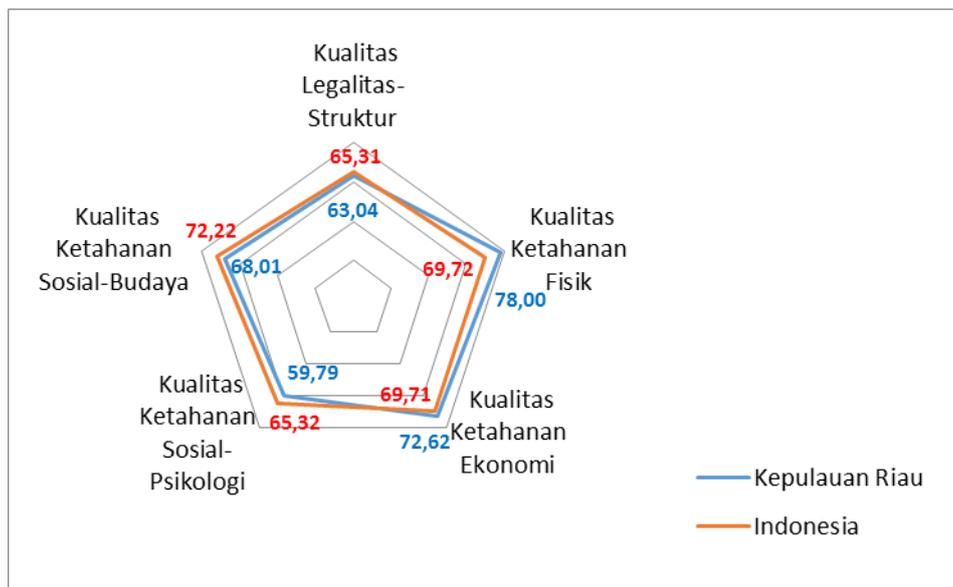
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2j. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kepulauan Bangka Belitung Tahun 2020

k. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kepulauan Riau yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psiologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak, sedangkan dimensi Kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Kepulauan Riau, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKE, KKSB, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kepulauan Riau dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSB, dan KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKE dan KKF di atas Indonesia.



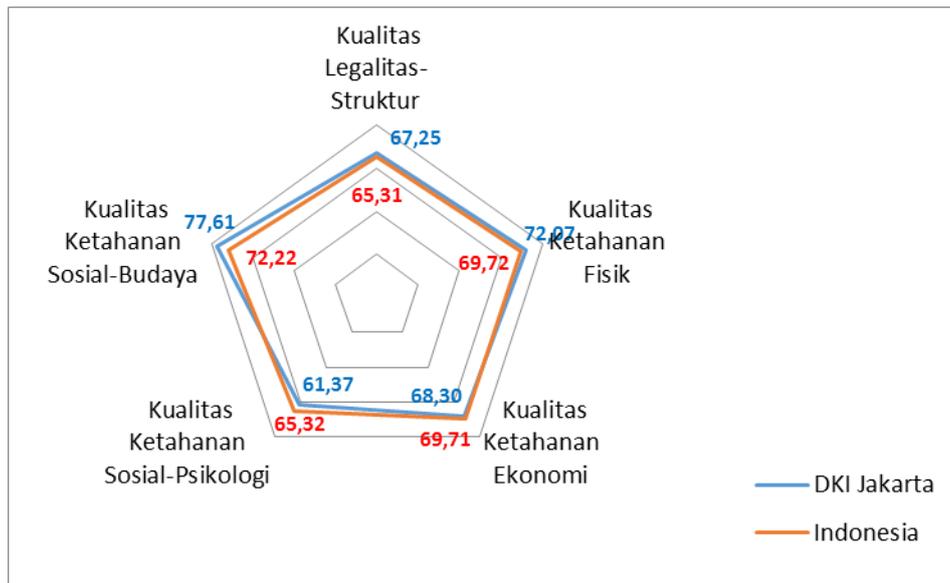
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2k. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2020

I. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi DKI Jakarta yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak, sedangkan dimensi kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSBB) dalam kategori kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak. Di Provinsi DKI Jakarta, dimensi KKSBB menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKSBB, KKF, KKE, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi DKI Jakarta dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KKSP dan KKE berada dibawah Indonesia, dimensi KKSBB, KLS dan KKF di atas Indonesia.



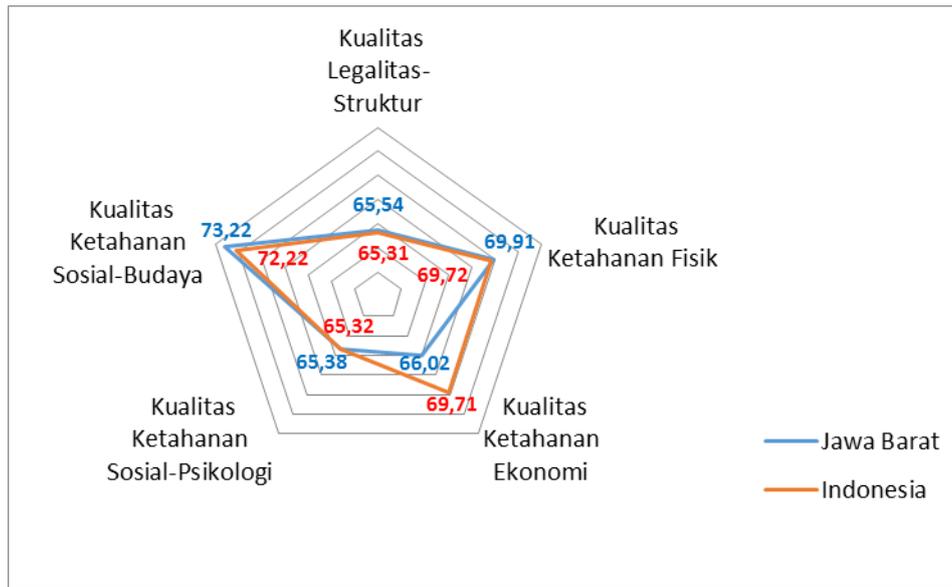
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2l. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi DKI Jakarta Tahun 2020

m. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Jawa Barat yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial- psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial- budaya (KKSb) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Jawa Barat, dimensi KKSb menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKSb, KKF, KKE, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Jawa Barat dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian KKE berada dibawah Indonesia, dimensi KLS, KKSb, KKSP, KKF di atas Indonesia.



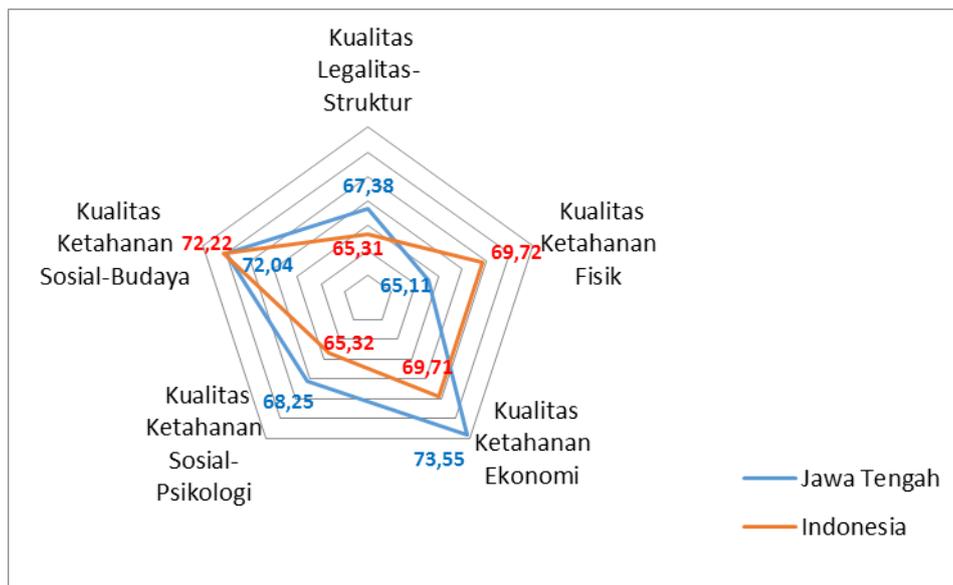
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2m. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jawa Barat Tahun 2020

n. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Jawa Tengah yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Jawa Tengah, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKF menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKSb, KKSP, KLS dan KKF.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Jawa Tengah dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian KKSb dan KKF berada di bawah Indonesia, dimensi KLS, KKSP, KKE diatas Indonesia.



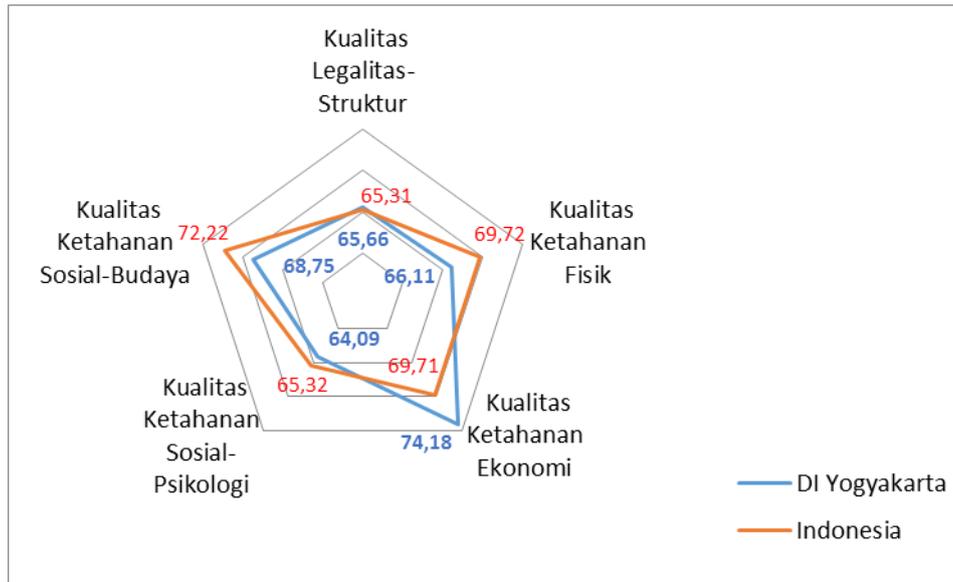
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2n. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020

o. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi DI Yogyakarta yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi DI Yogyakarta, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKSb, KKF, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi DI Yogyakarta dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian KKSb, KKSP, KLS dan KKF berada dibawah Indonesia, dimensi KKE dan KLS di atas Indonesia.



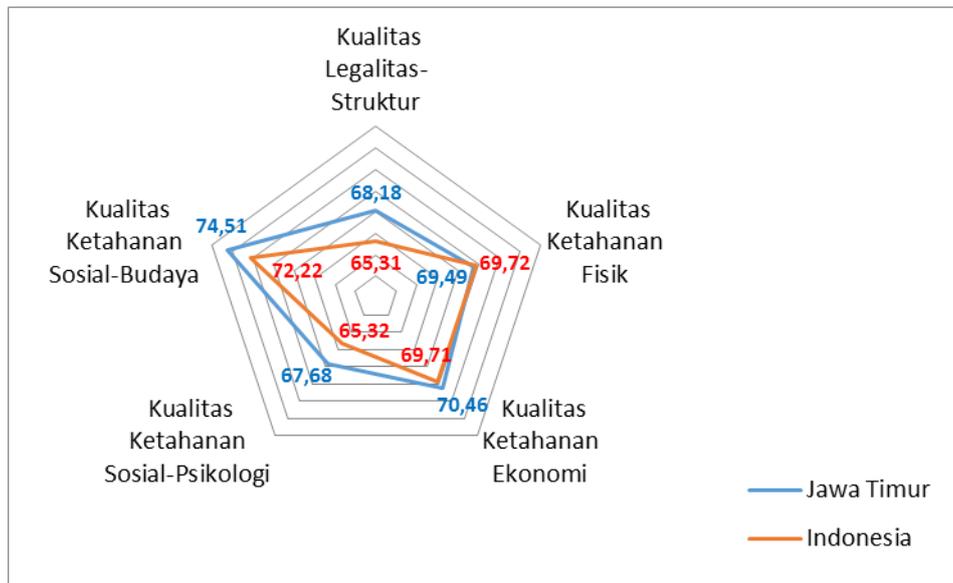
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2o. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi DI Yogyakarta Tahun 2020

p. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Jawa Timur yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Jawa Timur, dimensi KKSb menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKSb, KKE, KKF, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Jawa Timur dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian KKF berada dibawah Indonesia, dimensi KLS, KKSb, KKSP dan KKE di atas Indonesia.



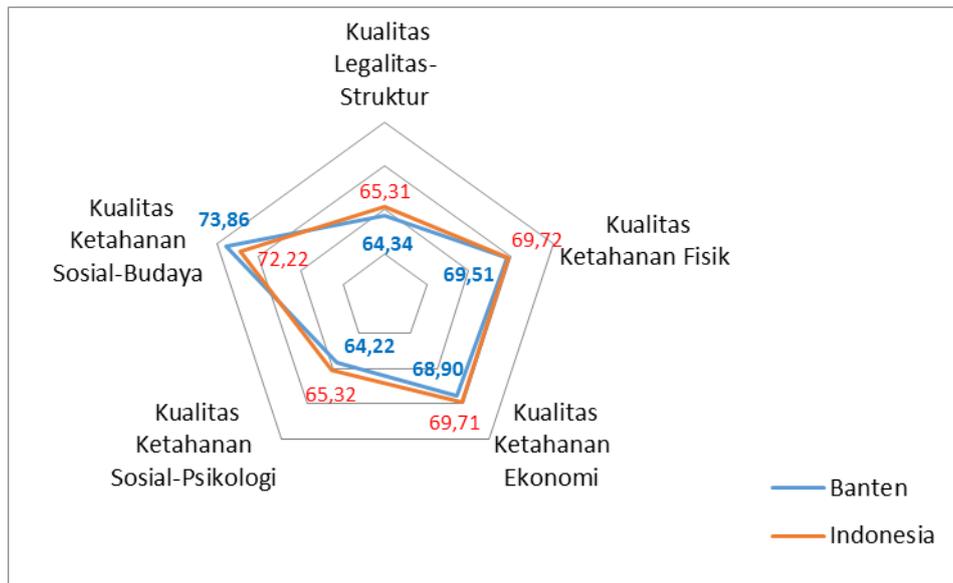
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2p. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Jawa Timur Tahun 2020

q. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Banten Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Banten yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psiologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Banten, dimensi KKSb menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKSb, KKF, KKE, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Banten dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian KKF, KLS, KKSP dan KKE berada dibawah Indonesia, dimensi KKSb diatas Indonesia.



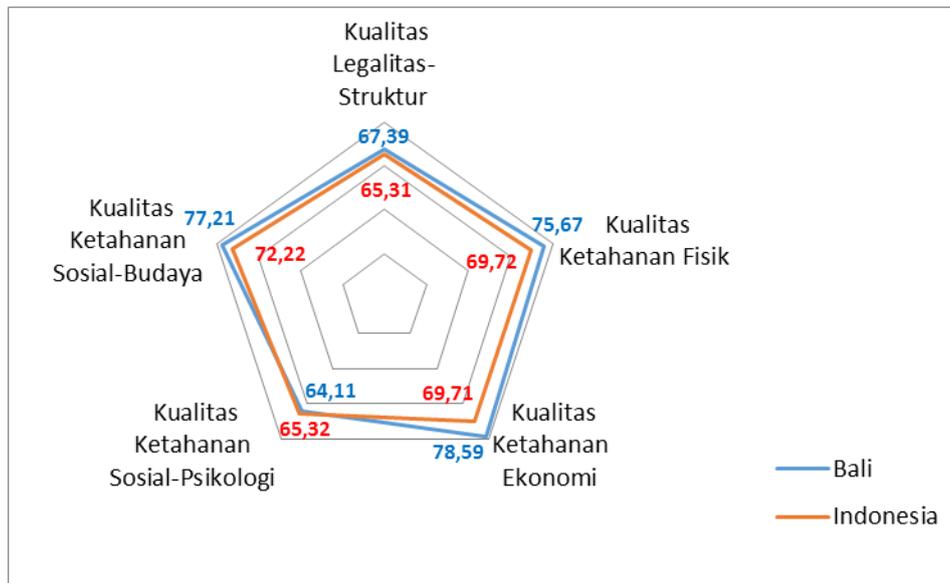
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2q. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Banten Tahun 2020

r. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Bali Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Bali yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak, sedangkan dimensi kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Bali, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKSb, KKF, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Bali dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKSb, KKE, KLS dan KKF di atas Indonesia.



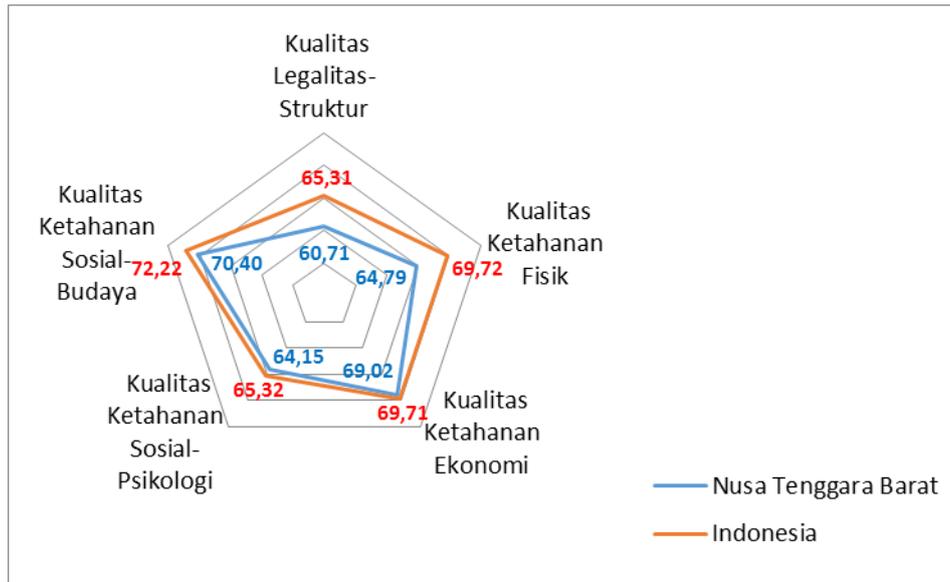
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2r. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Bali Tahun 2020

s. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Nusa Tenggara Barat yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Nusa Tenggara Barat, dimensi KKSb menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKSb, KKE, KKF, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Nusa Tenggara Barat dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian semua dimensi KKSb, KKF, KLS, KKSP dan KKE berada dibawah Indonesia.



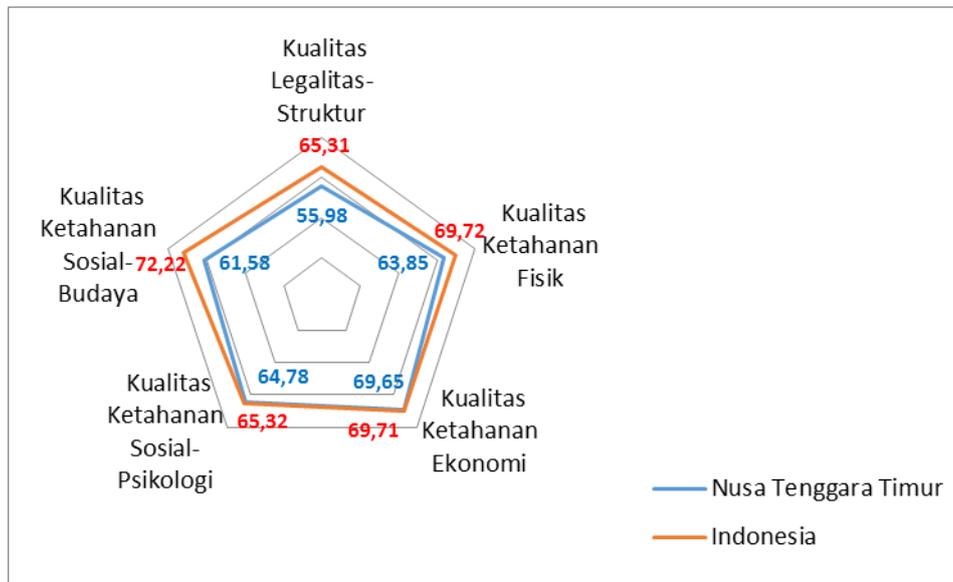
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2s. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020

t. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa kelima dimensi pembentuk IKK di Provinsi Nusa Tenggara Timur yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan fisik (KKF), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Nusa Tenggara Timur, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKSP, KKF, KKSb, dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Nusa Tenggara Timur dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian semua dimensi KKSb, KKF, KLS, KKSP dan KKE berada dibawah Indonesia.



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

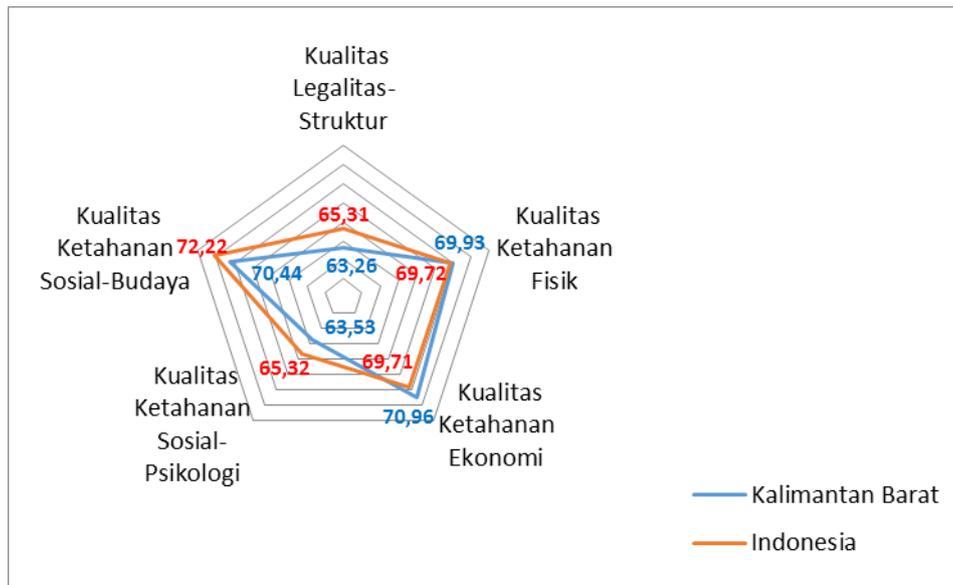
Gambar 10.2t. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2020

u. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kalimantan Barat yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Kalimantan Barat, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKSb, KKF, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kalimantan Barat dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSb, KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKE dan KKF diatas Indonesia.

Gambar 10.2u. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Barat Tahun 2020

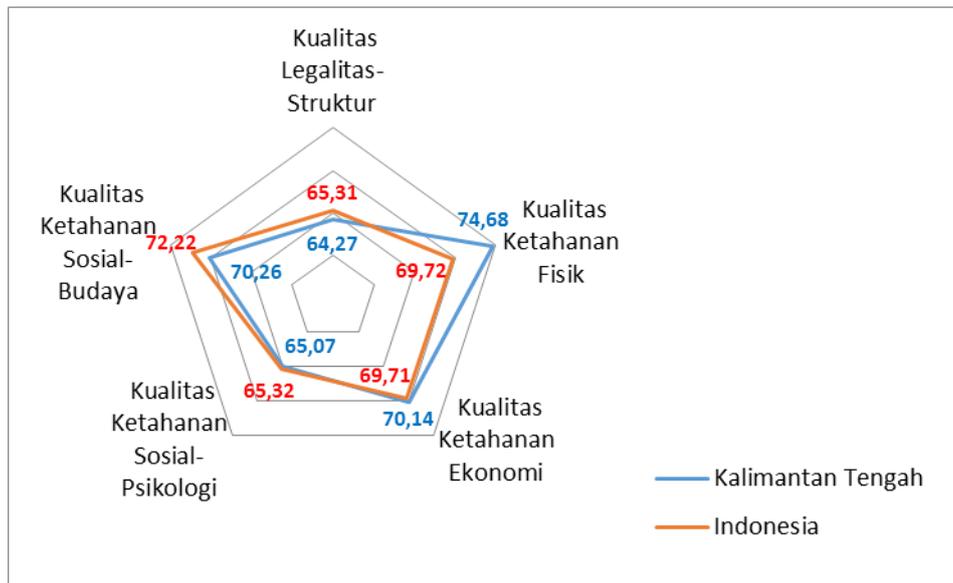


Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

v. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kalimantan Tengah yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Kalimantan Tengah, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKSB, KKE, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kalimantan Tengah dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSB, KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKE dan KKF di atas Indonesia.



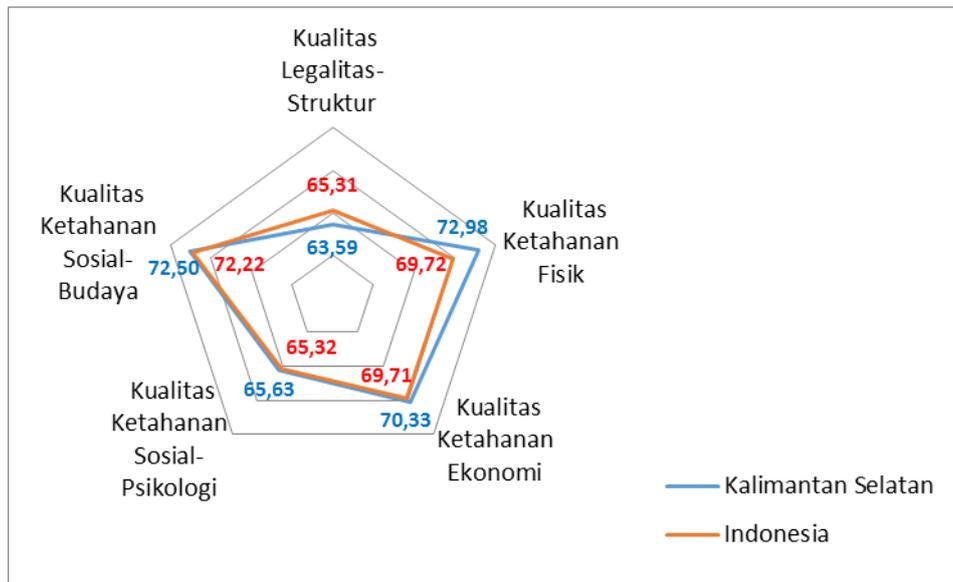
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2v. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Tengah Tahun 2020

w. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kalimantan Selatan yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Kalimantan Selatan, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKSB, KKE, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kalimantan Selatan dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS berada dibawah Indonesia, dimensi KKE, KKSB, KKSP dan KKF diatas Indonesia.



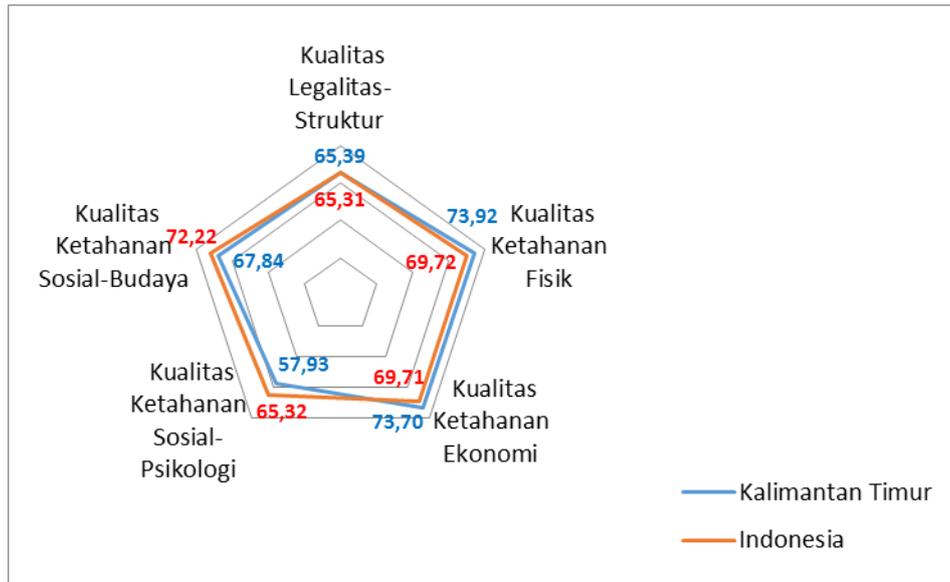
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2w. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2020

x. Analisis Dimensi Pembentuk IKK Web Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kalimantan Timur yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Kalimantan Timur, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKE, KKSb, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kalimantan Timur dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KKSb dan KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KLS, KKF dan KKE di atas Indonesia.



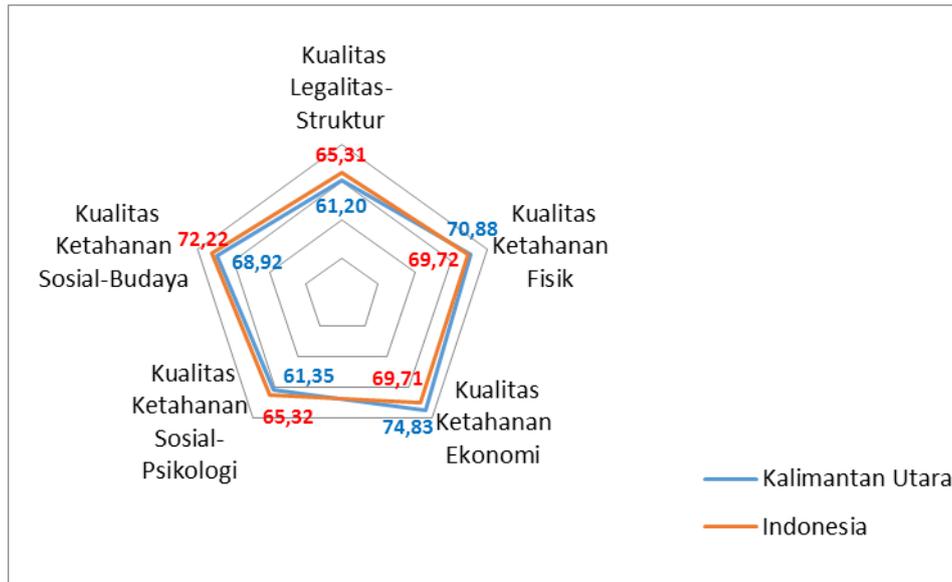
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2x. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Timur Tahun 2020

y. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kalimantan Utara yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Kalimantan Utara, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKF, KKSb, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Kalimantan Utara dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSb dan KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKF dan KKE di atas Indonesia.



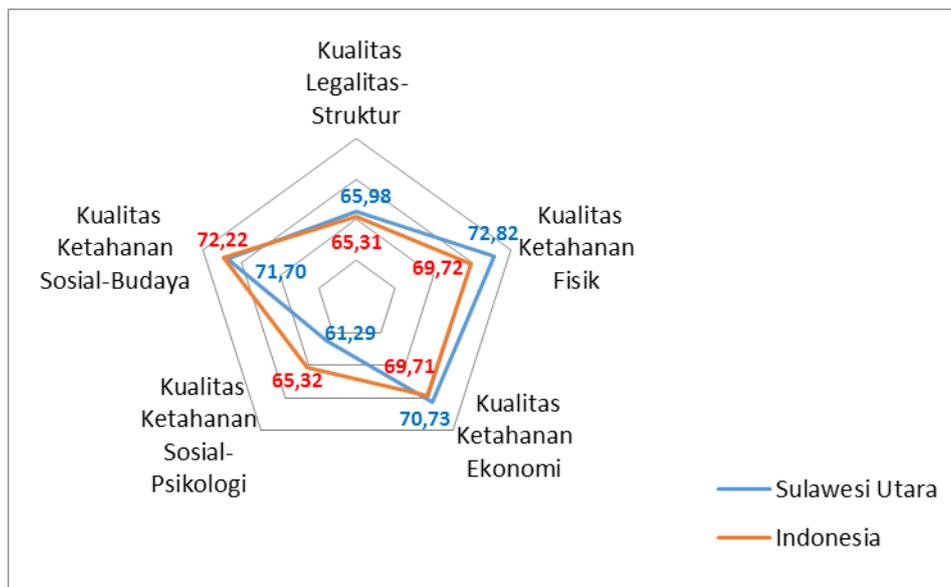
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2y. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Kalimantan Utara Tahun 2020

z. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sulawesi Utara yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Sulawesi Utara, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKSb, KKE, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sulawesi Utara dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KKSb dan KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KLS, KKF dan KKE di atas Indonesia.



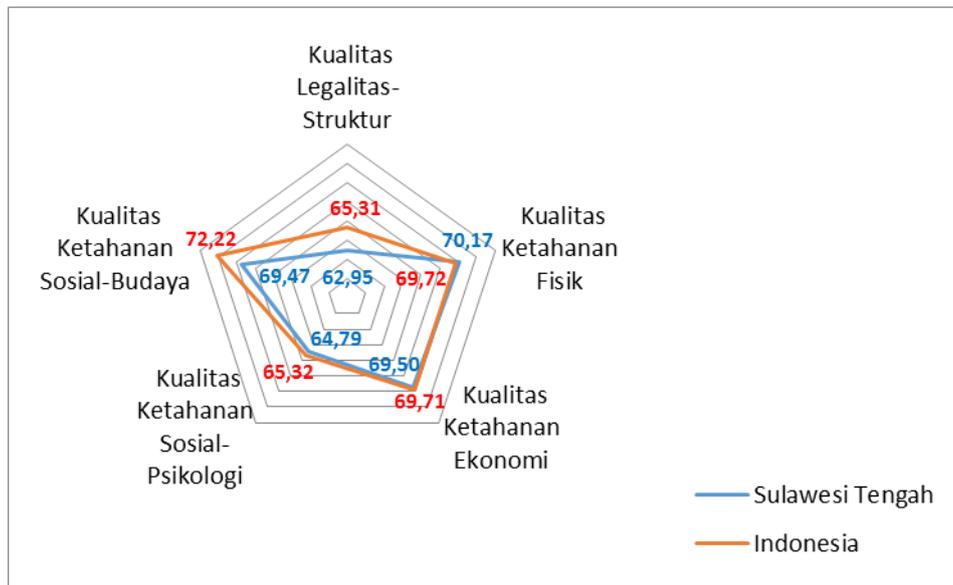
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2z. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Utara Tahun 2020

aa. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sulawesi Tengah yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Sulawesi Tengah, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKE, KKSB, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sulawesi Tengah dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSB, KKE dan KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKF di atas Indonesia.



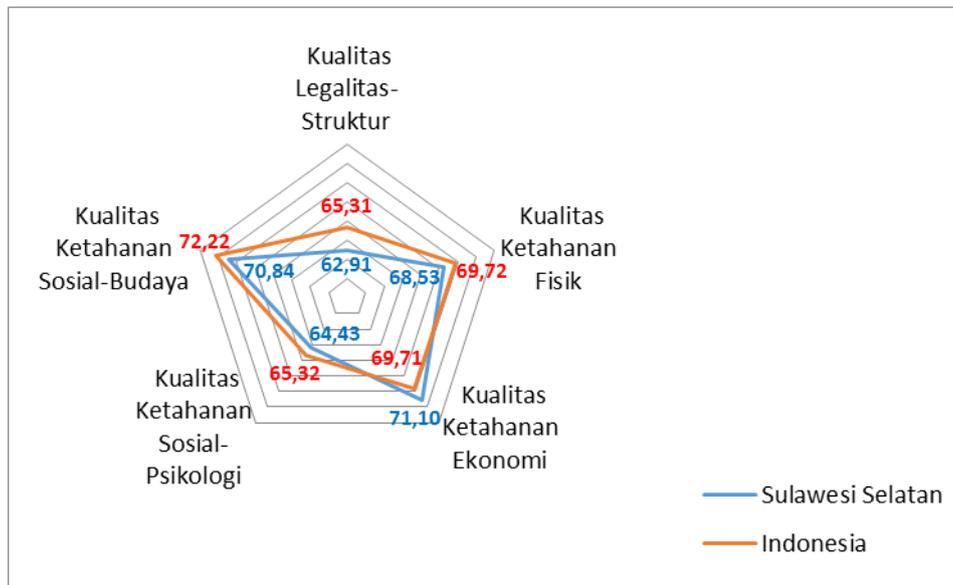
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2aa. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Tengah Tahun 2020

ab. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sulawesi Selatan yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Sulawesi Selatan, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKSB, KKF, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sulawesi Selatan dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSB, KKF dan KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKE di atas Indonesia.



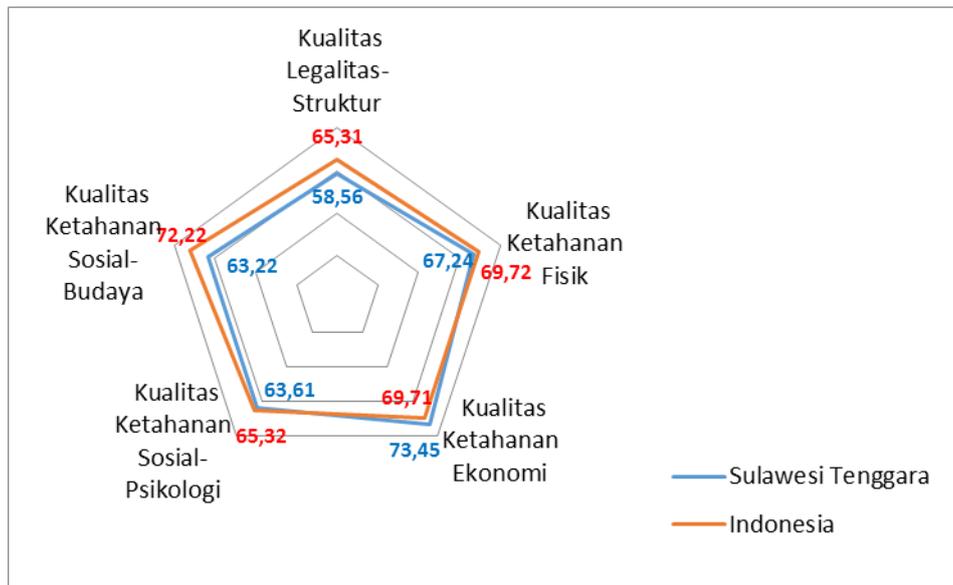
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2ab. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2020

ac. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sulawesi Tenggara yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Sulawesi Tenggara, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKF, KKSP, KKSB dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sulawesi Tenggara dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSB, KKF dan KKSP berada dibawah Indonesia, dimensi KKE di atas Indonesia.



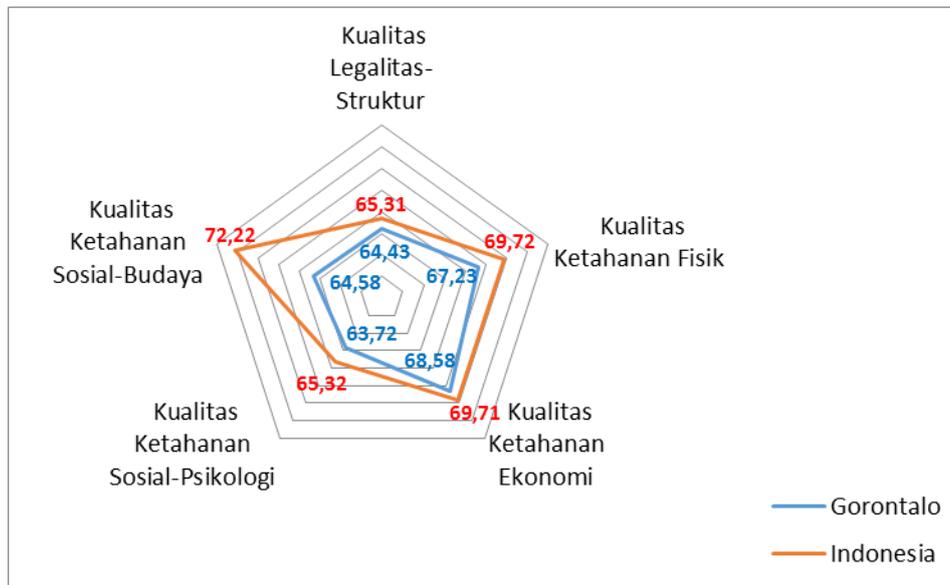
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2ac. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Tenggara Tahun 2020

ad. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Gorontalo Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Gorontalo yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Gorontalo, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKF, KKSb, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Gorontalo dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian semua dimensi KLS, KKE, KKSb, KKF dan KKSP berada dibawah Indonesia.



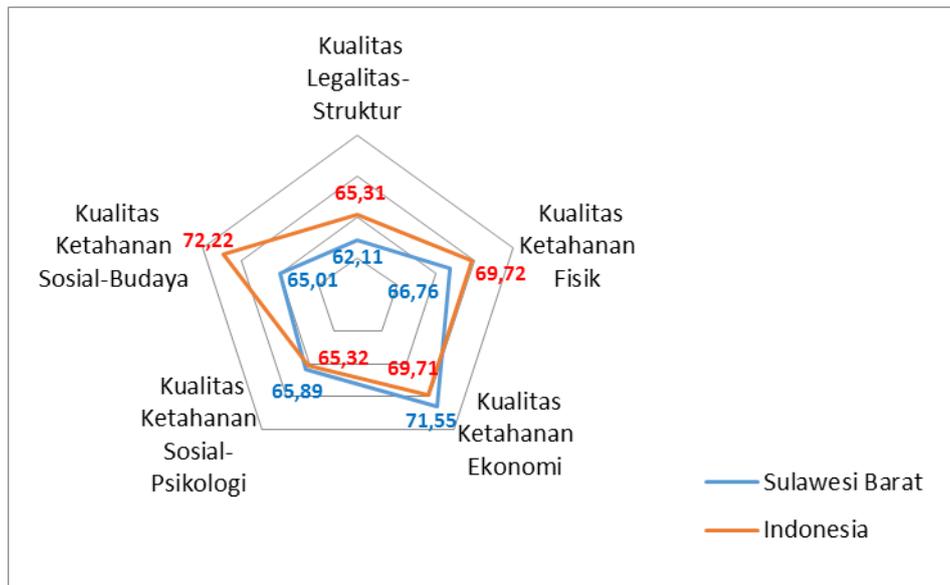
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2ad. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Gorontalo Tahun 2020

ae. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sulawesi Barat yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Sulawesi Barat, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKF, KKSP, KKSB dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Sulawesi Barat dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSB, KKF dan berada dibawah Indonesia, dimensi KKSP dan KKE di atas Indonesia.



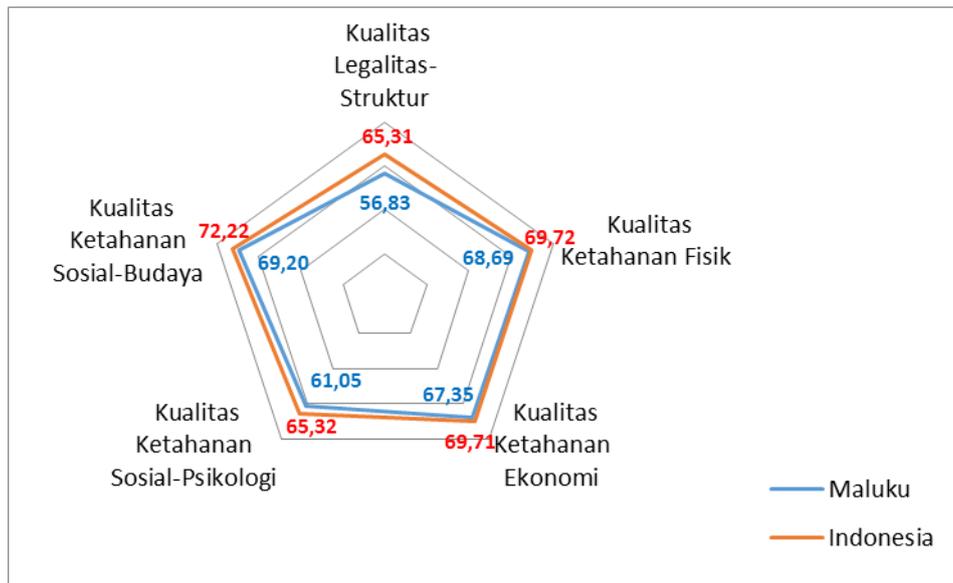
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2ae. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Sulawesi Barat Tahun 2020

af. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Maluku Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Maluku yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Maluku, dimensi KKSB menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKSB, KKF, KKE, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Maluku dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian semua dimensi KLS, KKSB, KKF, KKSP dan KKE berada dibawah Indonesia.



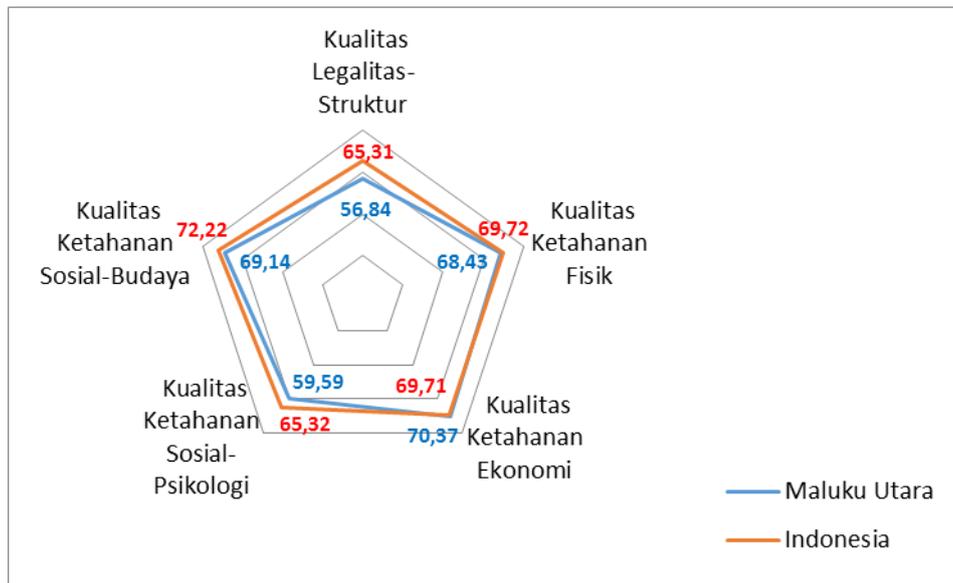
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2af. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Maluku Tahun 2020

ag. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Maluku Utara yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKS), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Maluku Utara, dimensi KKE menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKE, KKS, KKF, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Maluku Utara dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKS, KKF, dan KKSP berada dibawah Indonesia, dan KKE berada di atas Indonesia.



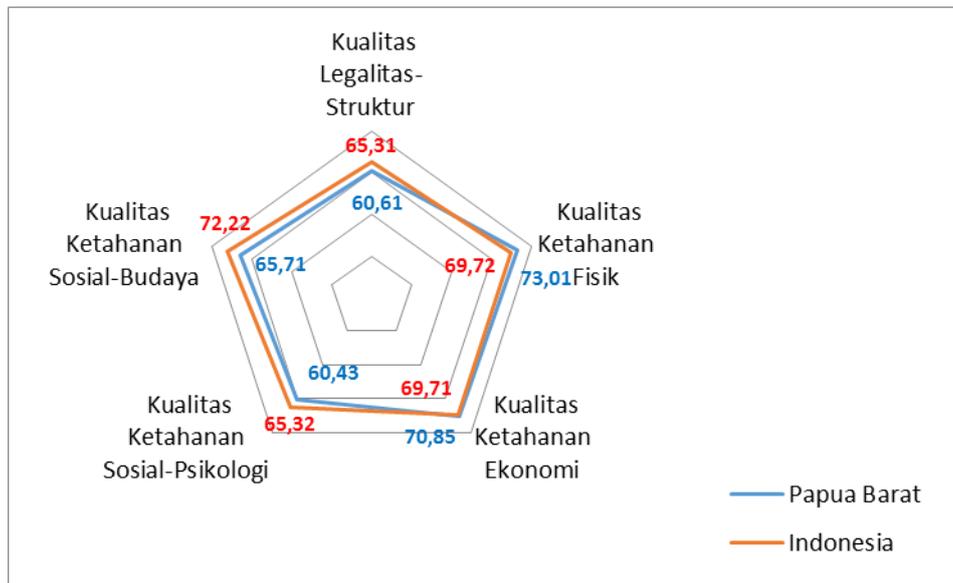
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2ag. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Maluku Utara Tahun 2020

ah. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Papua Barat Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Papua Barat yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP), kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSb), dan kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Papua Barat, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KKSP menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKE, KKSb, KLS dan KKSP.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Papua Barat dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSb, dan KKSP berada dibawah Indonesia, sedangkan dimensi KKF dan KKE berada di atas Indonesia.



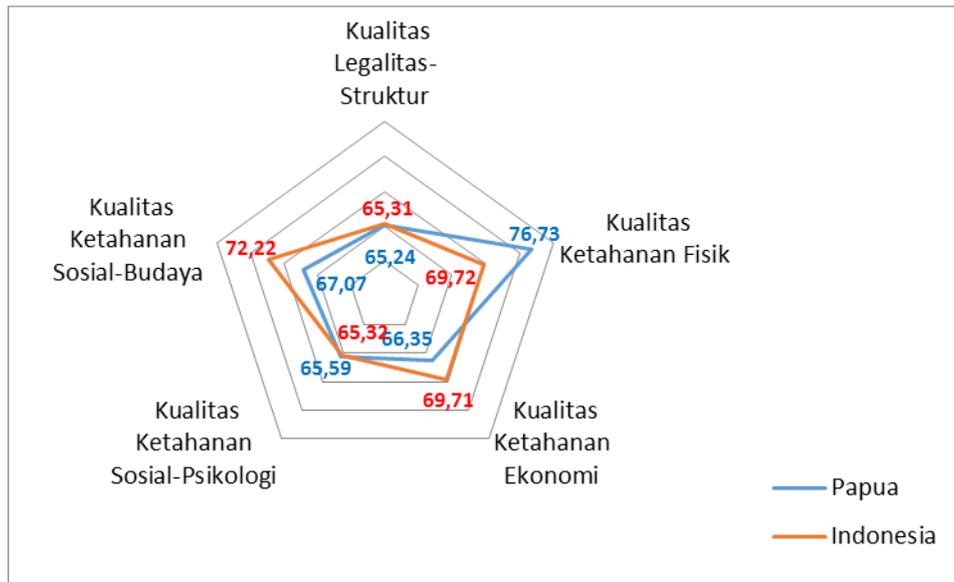
Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2ah. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Papua Barat Tahun 2020

ai. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Papua Tahun 2020

Berdasarkan data, dikatakan bahwa terdapat empat dimensi pembentuk IKK di Provinsi Papua yaitu dimensi kualitas legalitas-struktur (KLS), Kualitas ketahanan ekonomi (KKE), kualitas ketahanan sosial-psikologi (KKSP) dan kualitas ketahanan sosial-budaya (KKSB) dalam kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak, sedangkan dimensi kualitas ketahanan fisik (KKF) dalam kategori kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak. Di Provinsi Papua, dimensi KKF menduduki urutan tertinggi dan dimensi KLS menduduki urutan terendah. Apabila dilihat berdasarkan urutan nilai tertinggi sampai terendah, maka pada urutannya adalah dimensi KKF, KKSB, KKE, KKSP dan KLS.

Capaian per dimensi pembentuk IKK di Provinsi Papua dibandingkan dengan capaian per dimensi di Indonesia, menunjukkan data bahwa capaian dimensi KLS, KKSB, dan KKE berada dibawah Indonesia, sedangkan dimensi KKF dan KKSP berada di atas Indonesia.



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.2ai. Analisis Web Dimensi Pembentuk IKK Provinsi Papua Tahun 2020

3. Penghitungan IKK Terbobot AHP Tahun 2020 .

Penghitungan IKK dilakukan berdasarkan komposit kelima dimensi dengan pembobotan metode AHP. Metode AHP dihitung dari analisis pendapat para pakar dan birokrat yang relevan dengan kebijakan pembangunan kualitas keluarga. Diketahui bahwa semua nilai IKK per provinsi berada pada kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak.

Tabel 10.9. Penghitungan IKK terbobot AHP Tahun 2020.

No	Provinsi	IKK 2020	Kategori IKK
1	Aceh	66,70	2
2	Sumatera Utara	67,90	2
3	Sumatera Barat	67,65	2
4	Riau	68,57	2
5	Jambi	69,96	2
6	Sumatera Selatan	67,99	2
7	Bengkulu	67,35	2
8	Lampung	68,02	2
9	Kep. Bangka Belitung	69,30	2
10	Kepulauan Riau	69,10	2
11	DKI Jakarta	68,77	2
12	Jawa Barat	67,60	2
13	Jawa Tengah	68,59	2
14	DI Yogyakarta	67,51	2
15	Jawa Timur	69,53	2
16	Banten	67,66	2
17	Bali	72,39	2
18	Nusa Tenggara Barat	65,18	2
19	Nusa Tenggara Timur	63,18	2
20	Kalimantan Barat	67,47	2
21	Kalimantan Tengah	69,14	2
22	Kalimantan Selatan	68,89	2
23	Kalimantan Timur	68,31	2
24	Kalimantan Utara	67,52	2
25	Sulawesi Utara	68,56	2
26	Sulawesi Tengah	67,30	2
27	Sulawesi Selatan	67,24	2
28	Sulawesi Tenggara	65,45	2
29	Gorontalo	65,89	2
30	Sulawesi Barat	66,31	2
31	Maluku	64,38	2
32	Maluku Utara	64,65	2
33	Papua Barat	66,67	2

34	Papua	68,91	2
35	INDONESIA	68,13	2

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

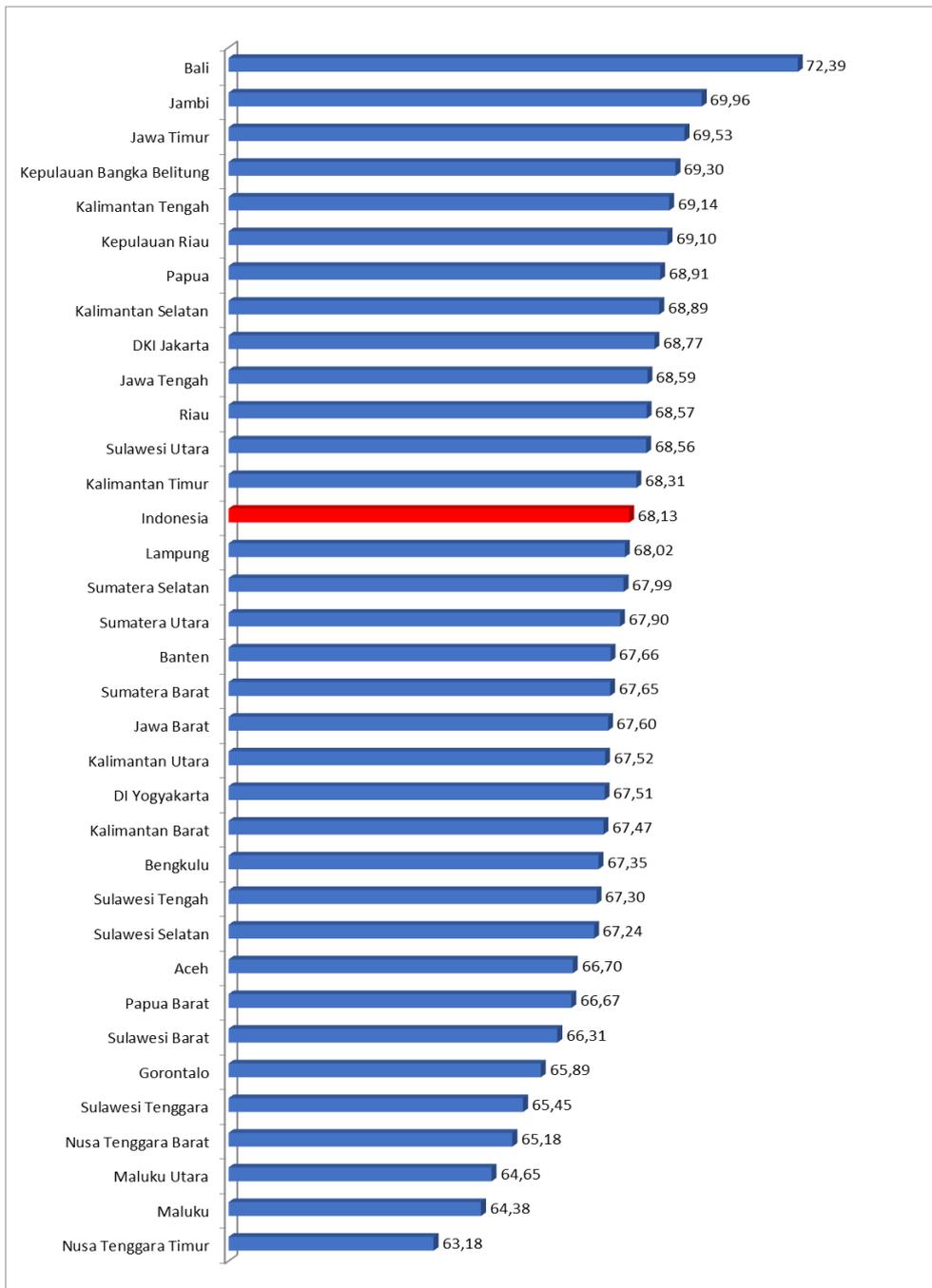
Kategori 1= Kualitas keluarga yang kurang responsif gender dan hak anak (IKK < 50,00).

Kategori 2= Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak (50,00 < IKK < 75,00).

Kategori 3= Kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak (IKK ≥ 75,00).

Gambar berikut ini menunjukkan nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Terbobot AHP Tahun 2020 di Indonesia adalah 68,13. Terdapat 13 provinsi atau 38 persen yang mempunyai nilai IKK yang lebih tinggi dari Indonesia. Sisanya, terdapat 21 provinsi atau 62 persen yang mempunyai nilai IKK yang lebih rendah dari Indonesia.

Nilai IKK tertinggi adalah di Provinsi Bali dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai nilai **IKK adalah Provinsi** Bali, Jambi, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah. **Adapun** 5 (lima) provinsi terendah yang mempunyai nilai IKK **adalah Provinsi** Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara.



Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Gambar 10.3 IKK terbobot AHP per provinsi Tahun 2020.

Berdasarkan hasil kategorisasi IKK tahun 2020, dapat diketahui bahwa semua provinsi di Indonesia termasuk dalam Kategori 2 yaitu **“Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak”**.

Tabel 10.10 Kategorisasi Provinsi Berdasarkan Nilai IKK Terbobot AHP Tahun 2020.

No	Kategori Kualitas Keluarga	Jumlah Provinsi (n)	Persen
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	0	0.00
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	34	100.00
3	Responsif Gender dan Hak Anak	0	0.00
No	Kategori Kualitas Keluarga	Nama Provinsi	
1	Kurang Responsif Gender dan Hak Anak	Tidak ada	
2	Cukup Responsif Gender dan Hak Anak	Semua Provinsi	
3	Responsif Gender dan Hak Anak	Tidak ada	

Sumber: Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b, Diolah.

Keterangan:

Kategori 1= Kualitas keluarga yang kurang responsif gender dan hak anak ($IKK < 50,00$).

Kategori 2= Kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak ($50,00 < IKK \leq 75,00$).

Kategori 3= Kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak ($IKK > 75,00$).

BAB XI

TANTANGAN INTERVENSI RENCANA AKSI PEMBANGUNAN KUALITAS KELUARGA

1. Intervensi Rencana Aksi.

Berdasarkan nilai capaian indikator dan dimensi pembentuk IKK Tahun 2020 di tingkat provinsi dan nasional, maka dapat diketahui potensi dan permasalahan keluarga yang dapat dipertimbangkan untuk menyusun rencana aksi baik di tingkat daerah dan nasional. Beberapa tahapan dalam memecahkan masalah kehidupan keluarga yang menjadi tantangan intervensi pembangunan kualitas keluarga adalah sebagai berikut:

- a. Penghitungan capaian indikator dan dimensi pembentuk IKK di tingkat provinsi dan nasional Tahun 2020 merupakan fakta yang menunjukkan adanya suatu potensi dan permasalahan keluarga di wilayah provinsi dan nasional.
- b. Penghitungan capaian dimensi pembentuk IKK dan nilai IKK di tingkat provinsi dan nasional Tahun 2020 dapat menunjukkan kategori kualitas keluarga yang sudah responsif gender dan hak anak, cukup responsif gender dan hak anak atau yang masih kurang responsif gender dan hak anak.
- c. Data IKK adalah data yang akurat/valid, reliabel dan mewakili populasi di wilayahnya. Data IKK dapat menjadi pembuka wawasan bagi para birokrat dan stakeholder lainnya dalam menemukan permasalahan keluarga yang kemudian dianjurkan untuk menemukan data dan informasi pendukung lainnya di tingkat daerah.
- d. Data IKK menjadi rujukan untuk mengukur kebutuhan (*needs assessment*) suatu daerah akan intervensi rencana aksi program/kegiatan yang dibutuhkan sesuai dengan kondisi lokal dan regional.
- e. Penyelesaian permasalahan pembangunan kualitas keluarga dapat difokuskan pada 1 (satu) atau beberapa indikator di dalam 1 (satu) dimensi atau beberapa indikator dari dimensi-dimensi yang berbeda secara terpadu, terintegratif dan holistik.
- f. Setelah mengetahui permasalahan dari data yang akurat, maka perlu diidentifikasi pemangku kepentingan (kementerian/lembaga di tingkat pemerintah pusat atau OPD di tingkat pemerintah provinsi/kabupaten/kota) yang berkaitan dengan masalah tersebut.
- g. Langkah selanjutnya adalah mengidentifikasi penanggung jawab utama di tingkat pemerintah pusat (kementerian/lembaga) dan pemerintah daerah (OPD) terkait masalah tersebut.
- h. Mengidentifikasi koordinasi dan sinergi antar Kementerian/Lembaga dan antar OPD dimulai dari *existing conditions* dan harapan yang diinginkan.
- i. Melakukan advokasi, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Kualitas Keluarga kepada kementerian/lembaga di tingkat pemerintah pusat.

- j. Melakukan advokasi, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Kualitas Keluarga kepada Perangkat Daerah (PD) Kabupaten/Kota, Pemerintah kecamatan dan Desa/Kelurahan serta organisasi kemasyarakatan. Konten advokasi, sosialisasi, fasilitasi, koordinasi dan sinkronisasi berkaitan dengan:
 - 1) Dimensi Kualitas Legalitas dan Struktur Keluarga.
 - 2) Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik.
 - 3) Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi.
 - 4) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Psikologi.
 - 5) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial Budaya.
- k. Menyusun bersama mekanisme mengintegrasikan program/kegiatan terkait penyelesaian masalah di tingkat pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
- l. Mengkoordinasi OPD di tingkat pemerintah daerah sampai tingkat kecamatan dan desa/kelurahan dalam Menyusun dan melaksanakan rencana aksi.
- m. Menyusun intervensi program dan target yang ingin dicapai secara integrative dan holistik.

2. Koordinasi dan Sinergi Antar Kementerian/Lembaga

Pelaksanaan Pembangunan Kualitas Keluarga di tingkat pemerintahan pusat dilakukan dengan cara:

- a. Merumuskan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga.
- b. Mengkoordinasikan Pembangunan Kualitas Keluarga lintas Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah Provinsi.
- c. Melakukan advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Kualitas Keluarga pada Kementerian/Lembaga, Pemerintah Daerah Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota dan Pemerintah Desa/Kelurahan serta organisasi kemasyarakatan.
- d. Melakukan pengintegrasian Pembangunan Kualitas Keluarga dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Kementerian/Lembaga.
- e. Melakukan bimbingan teknis, pendampingan dan supervisi.
- f. Mengumpulkan dan mengelola data IKK untuk intervensi berupa program/kegiatan di tingkat Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- g. Melakukan penyusunan dan pengembangan materi komunikasi.
- h. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan.

3. Koordinasi dan Sinergi antar OPD di Pemerintah Daerah.

Pelaksanaan Pembangunan Kualitas Keluarga di tingkat pemerintahan provinsi dilakukan melalui:

- a. Merumuskan kebijakan teknis peningkatan Kualitas Keluarga di tingkat Pemerintah Daerah dan lintas Kabupaten/Kota.
- b. Mengkoordinasikan Pembangunan Kualitas Keluarga antar Perangkat Daerah Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
- c. Melakukan advokasi, sosialisasi, fasilitasi, dan sinkronisasi pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan Pembangunan Kualitas Keluarga kepada Perangkat Daerah (PD) Provinsi, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Desa/Kelurahan serta organisasi kemasyarakatan.
- d. Melakukan pengintegrasian Pembangunan Kualitas Keluarga dalam dokumen perencanaan dan penganggaran Perangkat Daerah (PD).
- e. Melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga yang terstandarisasi.
- f. Melakukan penguatan dan pengembangan Lembaga Penyedia Layanan Kualitas Keluarga di tingkat Pemerintah Daerah Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
- g. Melakukan bimbingan teknis, dan supervisi kepada Perangkat Daerah (PD) Provinsi dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.
- h. Melakukan pendampingan dan pembinaan Kualitas Keluarga kepada Perangkat Daerah (PD) Provinsi dan lintas Kabupaten/Kota.
- i. Mengumpulkan dan mengelola data IKK untuk intervensi berupa program/kegiatan di Pemerintah Daerah Provinsi, dan Kabupaten/Kota.
- j. Melakukan penyusunan dan pengembangan materi komunikasi, informasi dan edukasi tentang peningkatan kualitas keluarga.
- k. Melakukan pemantauan, analisis, evaluasi dan pelaporan.

BAB XII

KESIMPULAN DAN SARAN

1. Kesimpulan.

- a. Hasil penghitungan IKK Tahun 2020 menggambarkan kualitas keluarga yang responsif gender dan hak anak. Terdapat 25 Indikator dan 5 (lima) dimensi pembentuk IKK Tahun 2020 (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a) adalah: (1) Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS) terdiri atas 2 indikator yaitu memiliki akta kelahiran anak, dan keluarga tinggal Bersama, (2) Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF) terdiri atas 6 indikator yaitu makan makanan sehat bergizi untuk keluarga, keluhan kesehatan keluarga, prevalensi kurang gizi anggota keluarga, tempat tidur terpisah antara orangtua dan anak, anak merokok, dan anggota keluarga sakit hingga terganggu, (3) Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE) terdiri atas 6 indikator yaitu memiliki rumah, tidak miskin, memiliki rekening tabungan, memiliki asuransi Kesehatan, anak putus sekolah, dan perempuan bekerja, (4) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP) terdiri atas 5 indikator yaitu kekerasan terhadap Anak, menjadi korban kejahatan, bepergian, dan kegiatan bersama anak dan orangtua (indicator dobel), dan (5) Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSb) terdiri atas 6 indikator yaitu perkawinan usia anak, memiliki tempat cuci tangan, melakukan kegiatan sosial, tinggal bersama lansia, melakukan kegiatan keagamaan, dan ada akses internet.
- b. Rekapitulasi atau ringkasan hasil indikator dan dimensi pembentuk IKK menunjukkan posisi suatu provinsi yang mempunyai nilai IKK tertinggi dan terendah untuk setiap indikator pembentuk IKK. Rekapitulasi dibagi ke dalam 2 (dua) kelompok indikator pembentuk IKK yaitu indikator positif dan indikator negatif. Terdapat 17 indikator positif pembentuk IKK. Nilai tertinggi untuk indikator positif sebanyak 4 (empat) kali berada di Provinsi Bali. Adapun nilai terendah untuk indikator positif sebanyak 5 (lima) kali berada di Provinsi Papua dan DI Yogyakarta. Terdapat 8 (delapan) indikator negatif pembentuk IKK. Nilai tertinggi untuk indikator negatif sebanyak 2 (dua) kali berada di Provinsi Nusa Tenggara Barat. Adapun nilai terendah untuk indikator negatif sebanyak 2 (dua) kali berada di Provinsi Papua, Bali dan DKI Jakarta.
- c. Berdasarkan analisis per dimensi pembentuk IKK, diketahui bahwa nilai tertinggi untuk setiap dimensi tersebar di berbagai Provinsi seperti Provinsi Jawa Timur, Kepulauan Riau, Bali, Kepulauan Bangka Belitung dan DKI Jakarta. Adapun nilai terendah untuk tingkatan dimensi sebanyak 3 (kali) berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sehingga, secara keseluruhan nilai IKK tahun 2020 tertinggi berada di Provinsi Bali dan terendah berada di Provinsi Nusa Tenggara Timur.

- d. Penghitungan IKK dilakukan berdasarkan komposit kelima dimensi dengan pembobotan metode AHP. Diketahui bahwa semua nilai IKK per provinsi berada pada kategori kualitas keluarga yang cukup responsif gender dan hak anak.
- e. Hasil menunjukkan bahwa nilai Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Terbobot AHP Tahun 2020 di Indonesia adalah 68,13. Terdapat 13 provinsi atau 38 persen yang mempunyai nilai IKK yang lebih tinggi dari Indonesia. Sisanya, terdapat 21 provinsi atau 62 persen yang mempunyai nilai IKK yang lebih rendah dari Indonesia.
- f. Nilai IKK tertinggi adalah di Provinsi Bali dan terendah di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Terdapat 5 (lima) provinsi tertinggi yang mempunyai nilai IKK adalah Provinsi Bali, Jambi, Jawa Timur, Kepulauan Bangka Belitung dan Kalimantan Tengah. Adapun 5 (lima) provinsi terendah yang mempunyai nilai IKK adalah Provinsi Nusa Tenggara Timur, Maluku, Maluku Utara, Nusa Tenggara Barat dan Sulawesi Tenggara.

2. Saran.

Berdasarkan nilai capaian indikator dan dimensi pembentuk IKK Tahun 2020 di tingkat provinsi dan nasional, maka dapat diketahui potensi dan permasalahan keluarga yang dapat dipertimbangkan untuk menyusun rencana aksi. Oleh karena itu perlu Koordinasi dan Sinergi Antar Kementerian/ Lembaga dan Antar OPD di Pemerintah Daerah. Saran selanjutnya adalah menyusun mekanisme operasional tentang koordinasi dan sinergi antar Kementerian/ Lembaga dan antar OPD di Pemerintah Daerah dalam mengintegrasikan rencana aksi program/kegiatan sampai ke tingkat kelurahan/desa.

BAB XIII

DAFTAR PUSTAKA

1. Undang-Undang Nomor 52 Tahun 2009 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.
3. Peraturan Menteri Negara Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Nomor 06 Tahun 2013 tentang Pelaksanaan Pembangunan Keluarga.
4. [Kemen PPPA-RI & BPS] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik. 2016. Pembangunan Ketahanan Keluarga 2016.
5. [Kemen PPPA-RI & BPS] Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik. 2019. Indikator Kualitas Keluarga 2019.
6. [Kemen PPPA-RI] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021a. Laporan Final Penyusunan Indikator Kualitas Keluarga. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.
7. [Kemen PPPA-RI] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021b. Laporan Hasil Pembobotan Combined Semua Pakar 29 Indikator Kualitas Keluarga. 27 September 2021. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.
8. [Kemen PPPA-RI] Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak. 2021c. Laporan Akhir Pedoman Pembangunan Kualitas Keluarga. Deputi Bidang Partisipasi Masyarakat.
9. [Kemen PPPA-RI & BPS] Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik. 2021a. Laporan Metadata 25 Indikator Pembentuk IKK Desember 2020.
10. [Kemen PPPA-RI & BPS] Kerjasama Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak & Badan Pusat Statistik. 2021b. Laporan Data Indikator dan Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020.

LAMPIRAN

Lampiran 1. Metadata 25 Indikator Pembentuk IKK (BPS, 2021).

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)					
1	Apakah semua anak memiliki akta kelahiran?	<p>Persentase rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran</p> <p>Keterangan: Semua anak memiliki Akta kelahiran</p>	<p>Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil terhadap total rumah tangga.</p> <p>Keterangan: Memiliki akta kelahiran yang dimaksud adalah baik pada saat pencacahan dapat menunjukkan (kode 1) maupun tidak dapat menunjukkan (kode 2) akta kelahiran.</p>	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0 – 17 tahun memiliki akta kelahiran dari kantor catatan sipil}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan ?	Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan Keterangan: Minimal satu	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal terdapat suami-istri tinggal bersama/suami-istri-anak kandung tinggal bersama/ibu-anak kandung tinggal bersama terhadap total rumah tangga. Keterangan: Termasuk dalam unit analisis jika salah satu kondisi terpenuhi.	$\frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal terdapat suami – istri tinggal bersama/ suami – istri – anak kandung tinggal bersama/ ibu – anak kandung tinggal bersama}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR
Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KMF)					
3	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah semua anggota keluarga	Persentase rumah tangga yang tidak ada Saat Di Mana Anda/Art Lainnya Tidak Dapat Menyantap	Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang selama setahun terakhir tidak ada saat dimana ART tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga yang selama setahun terakhir tidak ada saat dimana ART tidak dapat menyantap makanan sehat dan bergizi karena kurangnya uang atau sumber daya lainnya}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	mampu makan lengkap (nasi, sayur, ikan, tempe, tahu, buah) dua kali per hari?	Makanan Sehat Dan Bergizi Karena Kurangnya Uang Atau Sumber Daya Lainnya	kurangnya uang atau sumber daya lainnya terhadap total rumah tangga.		
4	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah ada anggota keluarga yang menderita penyakit akut/kronis atau penyandang disabilitas?	Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan.	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir terhadap total rumah tangga.	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki keluhan kesehatan dalam sebulan terakhir}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah ada anggota keluarga yang menderita masalah gizi (kurus sekali atau gemuk sekali atau stunting/ku ntet)?	PoU semua umur	<p>Perbandingan antara jumlah penduduk yang konsumsi energi biasanya sehari-hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat (dibawah MDER) terhadap total penduduk.</p> <p>Keterangan: MDER (Minimum Dietary Energy Requirement) adalah cutoff point kebutuhan minimum kalori pada PoU yang sudah memperhitungkan struktur anggota rumah tangga sehingga akan berbeda untuk setiap orang sesuai dengan umur, jenis kelamin dan aktifitas fisiknya.</p>	$= \frac{\text{jumlah penduduk yang konsumsi energi biasanya sehari – hari dari makanan tidak cukup untuk memenuhi tingkat energi yang dibutuhkan untuk hidup normal, aktif dan sehat (dibawah MDER)}}{\text{total penduduk}} \times 100$	KP

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
6	Apakah rumah yang ditempati memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak?	Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak Keterangan: Minimal satu	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur di rumah pada saat pencacahan terhadap total rumah tangga. Keterangan: Dianggap memiliki lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur baik dengan tempat tidur/kasur (kode 1) maupun tanpa tempat tidur/kasur (kode 2).	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki lokasi khusus/tempat tetap untuk tidur di rumah pada saat pencacahan}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	MSBP
7	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah di dalam keluarga ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok?	Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok Keterangan: Minimal satu	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 5-17 tahun merokok tembakau dalam sebulan terakhir terhadap total rumah tangga. Keterangan: - Termasuk dalam merokok baik	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 5 – 17 tahun merokok tembakau dalam sebulan terakhir}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			dilakukan setiap hari (kode 1) maupun tidak setiap hari (kode 2). - Termasuk kategori merokok setiap hari jika seseorang yang biasanya merokok setiap hari namun karena sakit, sehari tidak merokok.		
8	Selama 1 (satu) bulan terakhir, apakah terdapat anggota keluarga yang sakit sehingga meninggalkan aktivitas	Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu)	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya (sakit) dalam sebulan terakhir terhadap total rumah tangga. Keterangan: Aktivitas yang dimaksud meliputi pekerjaan, sekolah, atau kegiatan sehari-hari.	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki keluhan kesehatan dan terganggu aktivitasnya (sakit) dalam sebulan terakhir}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
9	Apakah keluarga memiliki rumah?	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah	<p>Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki rumah terhadap total rumah tangga.</p> <p>Keterangan: Termasuk memiliki rumah jika: - status bangunan tempat tinggal yang ditempati adalah milik sendiri. - KRT/pasangan/anaknya memiliki rumah lain selain rumah yang ditempati saat ini.</p>	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga yang memiliki rumah}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR
10	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah Suami dan/atau Istri mempunyai penghasilan tetap per	Persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi	Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang tidak miskin di masing-masing kab/kot dan provinsi terhadap total rumah tangga di masing-masing kab/kot dan provinsi.	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga yang tidak miskin di masing – masing kab/kot dan provinsi}}{\text{total rumah tangga di masing – masing kab/kot dan provinsi}} \times 100$	KP

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	bulan sebesar Rp 455.000 per orang per bulan?				
11	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah Suami dan/atau Istri mempunyai tabungan dalam bentuk uang minimal sebesar Rp 2.100 000?	<p>Persentase rumah tangga yang ada ART berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan</p> <p>Keterangan: Minimal satu</p>	<p>Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 10 tahun keatas yang berstatus kawin dan memiliki rekening tabungan terhadap total rumah tangga.</p> <p>Keterangan:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Memiliki rekening tabungan yang dimaksud adalah baik atas nama sendiri/bersama-sama di lembaga keuangan (perbankan, koperasi). - Seseorang dikatakan memiliki rekening tabungan di bank jika memiliki nomor rekening meskipun rekening tabungan tersebut kosong. 	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 10 tahun keatas yang berstatus kawin dan memiliki rekening tabungan}}{\text{total rumah tangga di masing – masing kab/kot dan provinsi}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Keikutsertaan tabungan tidak harus sesuai dengan wilayah tempat tinggalnya, yang penting responden masih dapat mengakses tabungannya.		
12	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah ada anggota keluarga yang memiliki asuransi kesehatan (atau BPJS) atau lainnya	Persentase rumah tangga yang ada art memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya) Keterangan: Minimal satu	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki jaminan kesehatan pada saat pencacahan terhadap total rumah tangga. Keterangan: - Jaminan kesehatan yang dimaksud meliputi BPJS-PBI, BPJS Non PBI, jamkesda, asuransi swasta, perusahaan/kantor.	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART memiliki jaminan kesehatan pada saat pencacahan}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			- Termasuk unit analisis jika minimal memiliki 1 jenis jaminan kesehatan.		
13	Adakah anak yang putus sekolah?	Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah Keterangan: Minimal satu	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 anak berumur 7-17 tahun yang putus sekolah terhadap total rumah tangga. Keterangan: - Putus sekolah yaitu jika pada saat pencacahan tidak bersekolah lagi dan pada tahun ajaran sebelum pencacahan masih bersekolah. - Batas umur 7-17 digunakan karena usia	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 anak berumur 7 - 17 tahun yang putus sekolah}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			mulai bersekolah adalah 7 tahun.		
14	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah istri bekerja?	Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja Keterangan: Minimal satu	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART perempuan berstatus kawin yang bekerja seminggu terakhir terhadap total rumah tangga. Keterangan: Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan dengan maksud memperoleh atau membantu memperoleh penghasilan atau keuntungan paling	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART perempuan berstatus kawin yang bekerja seminggu terakhir}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			sedikit selama satu jam dalam seminggu terakhir. Bekerja selama satu jam tersebut harus dilakukan berturut-turut dan tidak terputus.		
Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)					

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
15	SDG 16.2.1 (a) : Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengusaha dalam setahun terakhir	Ya (Susenas Modul Hansos September 2020)	<p>Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang terdapat kejadian kekerasan terhadap anak berumur 1-17 tahun dalam setahun terakhir terhadap jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 1-17 tahun.</p> <p>Keterangan: - Kejadian kekerasan terhadap anak meliputi: 1. Memberikan tugas/pekerjaan kepada anak yang melakukan kesalahan. Kode C 2. Memanggilnya bodoh, pemalas, tidak berguna, mengatakan tidak sayang lagi, atau sebutan lain yang sejenis. Kode D 3. Membentak atau menakutinya. Kode E 4. Mengurung atau</p>	$\frac{\text{jumlah rumah tangga yang terdapat kejadian kekerasan terhadap anak berumur 1 – 17 tahun dalam setahun terakhir}}{\text{total rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 1 – 17 tahun}} \times 100$	HANSOS

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			<p>meninggalkan anak sendirian dalam kamar/ruang tertentu. Kode F</p> <p>5. Mendorong/mengguncang badannya. Kode G</p> <p>6. Mencubit atau menjewer. Kode Kemen</p> <p>7. Menampar, memukul, menjambak atau menendang. Kode I</p> <p>- Termasuk dalam unit analisis jika terdapat anak yang mengalami minimal 1 jenis kekerasan.</p>		

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
16	Apakah ada anggota keluarga yang terlibat masalah dan/atau berhadapan dengan hukum (seperti mencuri, tawuran, berkelahi, memalak, narkoba, ditilang SIM, melanggar lalu lintas, memukul dan lainnya)?	Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan	<p>Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART pernah menjadi korban kejahatan pada tahun sebelumnya terhadap total rumah tangga.</p> <p>Keterangan: - Kejahatan yang dimaksud yaitu Pencurian, Penganiayaan, Pencurian dengan Kekerasan, Pelecehan Seksual, atau Lainnya. - Korban kejahatan adalah seseorang yang diri atau harta bendanya selama setahun terakhir mengalami atau terkena tindak kejahatan atau usaha/percobaan tindak kejahatan.</p>	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART pernah menjadi korban kejahatan pada tahun sebelumnya}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
17	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah anggota keluarga melakukan rekreasi bersama?	Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART pernah bepergian yang tidak untuk sekolah atau bekerja secara rutin pada tahun sebelumnya terhadap total rumah tangga. Keterangan: Bepergian meliputi: 1. Ke obyek wisata komersial. 2. Menginap di akomodasi komersial. 3. Menempuh jarak lebih dari 100km PP.	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART pernah bepergian yang tidak untuk sekolah atau bekerja secara rutin pada tahun sebelumnya}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
18	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah Ayah menyisihkan waktu khusus bersama anak?	<p>Persentase rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua</p> <p>Keterangan: Semua ART umur 0-17 tahun</p>	<p>Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun melakukan kegiatan bersama orang tua/wali dalam seminggu terakhir terhadap total rumah tangga.</p> <p>Keterangan: Kegiatan yang dimaksud meliputi: A. Makan/belajar makan B. Menonton TV C. Belajar/membaca buku D. Dibacakan buku cerita/diceritakan dongeng E. Beribadah/bedoa F. Berbincang-bincang/ngobrol G. Bermain/rekreasi/olahraga Kemen. Bermain games</p>	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0 – 17 tahun melakukan kegiatan bersama orang tua/wali dalam seminggu terakhir}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	MSBP

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
			I. Mengakses internet J. Mengurus rumah tangga K. Membantu menambah penghasilan		
19	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah Ibu menyisihkan waktu khusus bersama anak?	Persentase rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua Keterangan:	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun melakukan kegiatan bersama orang tua/wali dalam seminggu terakhir terhadap total rumah tangga. Keterangan:	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0 – 17 tahun melakukan kegiatan bersama orang tua/wali dalam seminggu terakhir}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	MSBP

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
		Semua ART umur 0-17 tahun	Kegiatan yang dimaksud meliputi: A. Makan/belajar makan B. Menonton TV C. Belajar/membaca buku D. Dibacakan buku cerita/diceritakan dongeng E. Beribadah/bedoa F. Berbincang-bincang/ngobrol G. Bermain/rekreasi/olahraga Kemen. Bermain games I. Mengakses internet J. Mengurus rumah tangga K. Membantu menambah penghasilan		
Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSB)					

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
20	Apakah ada anak (di bawah usia 18 tahun) yang dinikahkan ?	Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak Keterangan: Minimal satu	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 kejadian perkawinan anak terhadap total rumah tangga. Keterangan: Kejadian perkawinan anak adalah terdapat perempuan berumur 20-24 tahun yang umur perkawinan pertamanya kurang dari 18 tahun. (?)	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 kejadian perkawinan anak}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR
21	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah orangtua mengajarkan atau mencontohi kepada anak protokol kesehatan Covid-19 (pakai	Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap (kode1 dan2)	Perbandingan antara jumlah rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap terhadap total rumah tangga. Keterangan: Tempat cuci tangan tetap meliputi baik yang ada di dalam rumah (kode 1) maupun di luar rumah (kode 2).	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	masker, jaga jarak, cuci tangan, dsb)?				
22	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah anggota keluarga berpartisipasi dalam kegiatan sosial seperti pengajian, posyandu, kerjabakti, kematian, kelahiran. Ronda, kesenian, penyuluhan, pelatihan?	Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial Keterangan: Minimal satu	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap total rumah tangga. Keterangan: - Kegiatan sosial kemasyarakatan yang dimaksud meliputi kegiatan keagamaan, keterampilan, olahraga/permainan, gotong royong, arisan, kematian, sosial lainnya. - Lingkungan sekitar	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART melakukan kegiatan sosial kemasyarakatan di lingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	MSBP

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	Baik langsung maupun online		yang dimaksud adalah RT/RW/dusun/desa.		
23	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah anggota keluarga memberi perhatian dan merawat orangtua lanjut usia di atas 60 tahun?	Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+ Keterangan: Minimal satu	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 60 tahun ke atas terhadap total rumah tangga.	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART berumur 60 tahun ke atas}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	KOR

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
24	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah anggota keluarga melakukan kegiatan agama secara rutin?	Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan Keterangan: Minimal satu	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART melakukan kegiatan keagamaan dilingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir terhadap total rumah tangga. Keterangan: - Kegiatan keagamaan yang dimaksud tidak termasuk ibadah yang wajib dan rutin dilaksanakan, misalnya solat jum'at, kebaktian di gereja, dsb. - Lingkungan sekitar yang dimaksud adalah RT/RW/dusun/desa.	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan minimal 1 ART melakukan kegiatan keagamaan dilingkungan sekitar dalam 3 bulan terakhir}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	MSBP
25	Selama 6 (enam) bulan terakhir, apakah anak didampingi atau diawasi	Persentase rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktivitas bersama dalam	Perbandingan antara jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun yang mengakses internet bersama orang tua/wali dalam seminggu terakhir	$= \frac{\text{jumlah rumah tangga dengan semua ART berumur 0 – 17 tahun yang mengakses internet bersama orang tua/wali dalam seminggu terakhir}}{\text{total rumah tangga}} \times 100$	MSBP

No	Indikator Asal	Indikator Pembentuk	Konsep dan Definisi	Rumus	Sumber Data
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
	oleh orang dewasa dalam menggunakan media sosial online?	mengakses internet Keterangan: Semua ART umur 0-17 tahun	terhadap total rumah tangga.		

Sumber: Laporan Metadata 25 Indikator Pembentuk IKK Desember 2020 (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021a). Sumber: Susenas 2020 & MSBP 2018.

Rekapitulasi:

- 1 Indikator dari KOR: 16 Indikator
2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 23, 24, 31, 32, 34
- 2 KP: 2 Indikator (6,11)
- 3 MSBP: 6 indikator
7,26,27,33,35,36
- 4 Hansos: 1 indikator (22)

Lampiran 2. Data Indikator Pembentuk Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS).

Provinsi	Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur (KLS)	
	Persentase rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun memiliki akta kelahiran	Persentase rumah tangga yang semua anggota keluarga (suami, istri, dengan atau tanpa anak) tinggal dalam satu rumah dan tidak ada perpisahan
(1)	(2)	(3)
Aceh	28,55	88,41
Sumatera Utara	30,11	88,89
Sumatera Barat	31,03	88,36
Riau	27,86	91,34
Jambi	29,75	91,77
Sumatera Selatan	28,24	92,01
Bengkulu	30,37	89,21
Lampung	28,17	90,54
Kepulauan Bangka Belitung	32,98	88,33
Kepulauan Riau	33,42	85,84
DKI Jakarta	42,56	83,13
Jawa Barat	34,63	87,35
Jawa Tengah	36,93	87,41
DI Yogyakarta	47,63	77,86
Jawa Timur	39,33	86,41
Banten	26,91	91,89
Bali	39,67	85,40
Nusa Tenggara Barat	30,65	85,65
Nusa Tenggara Timur	22,27	87,30
Kalimantan Barat	27,23	90,62
Kalimantan Tengah	31,89	88,15
Kalimantan Selatan	32,53	87,02
Kalimantan Timur	34,33	87,42
Kalimantan Utara	27,04	88,78
Sulawesi Utara	36,15	86,65
Sulawesi Tengah	29,41	88,71
Sulawesi Selatan	31,15	87,39
Sulawesi Tenggara	24,89	87,84
Gorontalo	30,11	89,62
Sulawesi Barat	25,89	90,51
Maluku	23,48	87,22
Maluku Utara	20,36	89,53
Papua Barat	28,64	87,04
Papua	34,80	86,93
Indonesia	33,93	87,64

Sumber: Laporan Data Indikator dan Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020 (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b).
Dari Susenas 2020

Lampiran 3. Data Indikator Pembentuk Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF).

Provinsi	Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)					
	Persentase rumah tangga yang tidak ada Saat Di Mana Anda/Art Lainnya Tidak Dapat Menyantap Makanan Sehat Dan Bergizi Karena Kurangnya Uang Atau Sumber Daya Lainnya	Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan.	PoU semua umur	Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok	Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	89,93	59,97	8,58	87,02	0,76	36,76
Sumatera Utara	88,25	56,87	6,73	88,65	0,81	31,64
Sumatera Barat	89,68	64,36	5,86	85,48	1,38	36,59
Riau	90,39	51,76	9,16	88,93	0,57	29,29
Jambi	91,02	46,82	9,12	90,82	0,92	24,33
Sumatera Selatan	87,1	59,63	9,77	92,23	1,33	30,28
Bengkulu	88,07	60,48	7,72	88,9	1,6	34,18
Lampung	86,46	61,28	12,19	90,13	1,28	34,76
Kepulauan Bangka Belitung	94,43	61,21	9,35	87,13	1,24	28,36
Kepulauan Riau	93,14	40,09	6,07	84,93	0,79	19,91
DKI Jakarta	94,7	63,56	1,94	86,26	1,07	31,65
Jawa Barat	90,12	61,51	3,9	87,74	1,56	36,67
Jawa Tengah	94,81	66,36	11,8	80,47	1,59	38,35
DI Yogyakarta	96,63	66,2	9,9	75,33	0,85	32,53
Jawa Timur	93,62	61,24	8,58	84,73	1,16	35,26
Banten	88,16	62,03	2,11	87,43	1,58	36,95
Bali	97,07	52,07	4,01	87,47	0,43	31,81
Nusa Tenggara Barat	79,2	74,73	2,97	92,67	2,08	44,85
Nusa Tenggara Timur	71,04	65,05	13,12	91,86	1,49	43,9
Kalimantan Barat	85,64	53,77	19,92	88,77	1,32	30,17
Kalimantan Tengah	91,73	53,02	10,1	89,76	0,87	27,59
Kalimantan Selatan	93,09	63,77	2,72	88,71	0,81	31,49

Provinsi	Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik (KKF)					
	Persentase rumah tangga yang tidak ada Saat Di Mana Anda/Art Lainnya Tidak Dapat Menyantap Makanan Sehat Dan Bergizi Karena Kurangnya Uang Atau Sumber Daya Lainnya	Persentase rumah tangga yang ada ART yang mempunyai keluhan kesehatan.	PoU semua umur	Persentase rumah tangga yang memiliki ruang tidur terpisah antara orang tua dan anak	Persentase rumah tangga yang ada anak berusia 5-17 tahun yang merokok	Persentase rumah tangga yang ada ART sakit (mengalami keluhan kesehatan dan terganggu)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Kalimantan Timur	91,86	49,6	8,24	82,52	0,62	23,75
Kalimantan Utara	92,88	56,11	12,11	83,93	0,96	29,93
Sulawesi Utara	89,25	53,16	4,49	86,08	0,79	31,35
Sulawesi Tengah	83,7	56,04	8,85	90,21	1,41	35,89
Sulawesi Selatan	91,43	60,97	10,14	84,72	1,36	35,28
Sulawesi Tenggara	88,73	61,5	10,06	85,91	1,31	40,41
Gorontalo	89,45	64,95	10,33	88,13	1,64	40,14
Sulawesi Barat	79,93	58,1	9,16	89,57	2,34	38,64
Maluku	82,24	47,87	35,55	88,22	0,63	28,62
Maluku Utara	81,22	44,61	35,48	89,1	1,04	30,6
Papua Barat	88,02	48,44	23,09	89,52	0,91	24,8
Papua	85,22	34,35	31,49	95,4	1,03	21,14
Indonesia	90,58	60,53	8,34	86,44	1,28	34,73

Sumber: Laporan Data Indikator dan Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020 (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b). Dari Susenas 2020.

Lampiran 4. Data Indikator Pembentuk Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE).

Provinsi	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)					
	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah	Persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi	Persentase rumah tangga dengan semua ART berusia 10 tahun keatas berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan	Persentase rumah tangga yang ada art memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya)	Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah	Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	82,82	87,73	51,28	98,85	1,44	37,1
Sumatera Utara	71,74	93,71	50,25	73,02	1,73	45,58
Sumatera Barat	74,1	95,03	53,77	79,55	1,96	49,18
Riau	73,19	95,05	57,94	73,6	2,04	36,43
Jambi	86,67	93,84	50,18	59,49	2,34	40,29
Sumatera Selatan	83,55	89,93	42,34	68,81	2,89	47,38
Bengkulu	85,21	87,75	51,96	73,72	2,01	54,04
Lampung	89,42	89,92	48,37	77,69	2,48	44,33
Kepulauan Bangka Belitung	87,67	96,34	49,58	75,11	3,14	38,2
Kepulauan Riau	69,96	95,79	68,68	81,61	0,85	37,18
DKI Jakarta	51,17	96,79	66,34	91,15	1,42	33,48
Jawa Barat	79,86	93,9	48,48	72,82	2,75	33,45
Jawa Tengah	90,3	90,36	54,84	79,99	2,19	50,61
DI Yogyakarta	77,74	89,97	55,46	86,86	0,33	52,86
Jawa Timur	88,85	90,54	48,87	71,99	1,85	47,04
Banten	84,12	95,31	51,26	77,07	3,13	36,1
Bali	77,33	96,99	63,57	81,79	0,95	62,51
Nusa Tenggara Barat	89,16	88,32	45,79	72,32	1,75	45,71
Nusa Tenggara Timur	89,07	83,98	52,06	80,8	3,73	55,17
Kalimantan Barat	90,68	94,25	52,6	69,96	3,82	49,59
Kalimantan Tengah	83,25	96,55	51,39	71,59	2,79	43,92
Kalimantan Selatan	81,05	96,61	46,92	80,73	2,66	43,42
Kalimantan Timur	73,63	95,9	68,8	82,97	0,98	37,47
Kalimantan Utara	79,21	95,15	70,58	88,33	2,29	39

Provinsi	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi (KKE)					
	Persentase rumah tangga yang memiliki rumah	Persentase rumah tangga tidak miskin di kabupaten/kota dan provinsi	Persentase rumah tangga dengan semua ART berusia 10 tahun keatas berstatus kawin yang memiliki rekening tabungan	Persentase rumah tangga yang ada art memiliki asuransi kesehatan (BPJS/lainnya)	Persentase rumah tangga yang ada anak umur 7-17 tahun yang putus sekolah	Persentase rumah tangga yang ada perempuan berstatus kawin yang bekerja
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	82,82	94,41	51,16	86,65	2,08	34,66
Sulawesi Tengah	87,09	90,33	49,92	80,73	3,17	43,58
Sulawesi Selatan	85,93	92,99	56,6	86,89	3,29	36,76
Sulawesi Tenggara	88,62	91,69	58,76	84,74	3,09	46,7
Gorontalo	83,24	88,77	51,55	91,04	4,62	44,36
Sulawesi Barat	89,84	91,24	52,18	92,44	4,24	42,83
Maluku	82,89	87,48	50,8	71,94	2,22	44,31
Maluku Utara	86,35	95,33	46,04	79,01	2,54	41,18
Papua Barat	78,27	84,17	65,26	85,67	1,72	45,1
Papua	86,5	79,11	41,58	89	4,21	56,93
Indonesia	82,48	92,21	51,93	77,11	2,32	42,96

Sumber: Laporan Data Indikator dan Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020 (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b). Dari Susenas 2020

Lampiran 5. Data Indikator Pembentuk Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP).

Provinsi	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)			
	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir	Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan	Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir	Persentase rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Aceh	45,06	2,5	29,58	92,91
Sumatera Utara	48,03	4,4	31,32	94,52
Sumatera Barat	52,69	3,68	38,15	93,26
Riau	46,7	4,6	27,38	94,84
Jambi	43,34	2,94	21,06	96,55
Sumatera Selatan	42,91	4,9	22,06	96,26
Bengkulu	47,81	4,83	34,67	92,09
Lampung	44,03	4,88	27,48	97,45
Kepulauan Bangka Belitung	51,18	2,33	49,89	92,64
Kepulauan Riau	63,85	3,58	32,1	94,13
DKI Jakarta	67,66	3,84	36,53	95,85
Jawa Barat	47,6	3,85	28,86	96,55
Jawa Tengah	45,18	2,73	36,65	95,56
DI Yogyakarta	60,56	4,26	54,43	90,18
Jawa Timur	47,93	2,61	35,27	96,27
Banten	51,67	3,02	26,2	97,07
Bali	57,49	1,45	35,36	94,6
Nusa Tenggara Barat	48,25	5,03	29,11	95,91
Nusa Tenggara Timur	39,41	3,57	27,71	93,23
Kalimantan Barat	43,38	2,24	19,94	95,23
Kalimantan Tengah	42,47	2,55	27,08	94,27
Kalimantan Selatan	47,75	2,77	32,97	94,71
Kalimantan Timur	57,39	3,83	25,72	92,19

Provinsi	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi (KKSP)			
	Proporsi rumah tangga yang memiliki anak umur 1-17 tahun yang mengalami hukuman fisik dan/atau agresi psikologis dari pengasuhan dalam setahun terakhir	Persentase rumah tangga yang ada ART menjadi korban kejahatan	Persentase rumah tangga yang ada ART bepergian selama setahun terakhir	Persentase rumah tangga dengan semua ART berumur 0-17 tahun yang melakukan kegiatan bersama orang tua
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
Kalimantan Utara	50,6	5,6	29,43	93,6
Sulawesi Utara	55,84	2,58	28,57	93,86
Sulawesi Tengah	42,91	4,35	29,15	94,39
Sulawesi Selatan	47,11	3,75	31,53	94,18
Sulawesi Tenggara	46,25	3,72	37,88	90,49
Gorontalo	51,69	2,95	31,66	94,39
Sulawesi Barat	43,26	2,78	29,84	94,64
Maluku	43,25	4,95	28,97	90,45
Maluku Utara	47,36	4,64	21,2	92,86
Papua Barat	50,9	5,79	27,7	93,36
Papua	30,39	4,36	17,05	95,53
Indonesia	48,09	3,47	31,56	95,41

Sumber: Laporan Data Indikator dan Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020 (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b). Dari Susenas 2020

Lampiran 6. Data Indikator Pembentuk Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKS).

Provinsi	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKS)					
	Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak	Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap (kode1 dan2)	Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial	Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+	Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan	Persentase rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	0,94	76,59	79,84	24,26	59,51	95,84
Sumatera Utara	0,99	70,51	89,71	25,82	76,58	96,45
Sumatera Barat	0,79	88,87	86,75	31,49	72,18	95,51
Riau	1,47	81,33	90,85	18,72	79,92	96,2
Jambi	2,11	78,22	92,02	23,51	80,65	97,99
Sumatera Selatan	2,08	80,12	91,11	25,16	78,8	97,77
Bengkulu	1,45	83,43	86,02	23,12	71,63	95,45
Lampung	1,43	86,08	85,66	26,86	71,83	98,48
Kepulauan Bangka Belitung	2,65	91,45	91,1	23,26	77,15	95,27
Kepulauan Riau	0,78	86,8	93,92	14,00	82,49	86,65
DKI Jakarta	0,19	80,43	94,72	21,76	86,71	95,36
Jawa Barat	1,73	81,71	91,11	26,58	78,33	96,02
Jawa Tengah	1,34	89,16	83,98	37,71	64,59	95,99
DI Yogyakarta	0,23	92,42	79,75	35,64	59,34	92,76
Jawa Timur	1,4	84,83	87,64	36,32	70,95	96,84
Banten	1,02	85,73	91,59	21,07	79,68	95,69
Bali	1,17	94,32	90,6	30,17	75,53	97,06
Nusa Tenggara Barat	2,37	85,1	89,55	23,20	73,73	97
Nusa Tenggara Timur	1,62	61,3	78,61	28,25	61,53	96,87
Kalimantan Barat	2,64	78,55	89,58	25,38	77,14	97,12
Kalimantan Tengah	2,36	86,44	90,8	18,43	78,82	95,86
Kalimantan Selatan	2,18	91,65	90,81	22,13	77,22	96,34
Kalimantan Timur	1,59	87,06	89,21	19,64	76,52	91,26
Kalimantan Utara	1,88	89,78	88,37	21,84	72,65	94,02

Provinsi	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya (KKSb)					
	Persentase rumah tangga yang ada perkawinan anak	Persentase rumah tangga yang memiliki tempat cuci tangan tetap (kode1 dan2)	Persentase rumah tangga yang ada ART yang melakukan kegiatan sosial	Persentase rumah tangga yang ada ART berusia 60+	Persentase rumah tangga yang ada ART melakukan kegiatan keagamaan	Persentase rumah tangga dengan semua ART umur 0-17 tahun yang melakukan aktifitas bersama dalam mengakses internet
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Sulawesi Utara	1,97	88,81	85,67	32,03	69,7	96,87
Sulawesi Tengah	2,32	89,93	85,29	25,94	70,47	96,92
Sulawesi Selatan	1,95	92,58	84,4	31,65	67,68	96,32
Sulawesi Tenggara	2,51	89,94	81,711	23,67	64,22	93,75
Gorontalo	2,56	90,01	81,86	24,37	61,82	96,42
Sulawesi Barat	3,03	86,75	83,01	22,01	65,76	98,03
Maluku	1,31	89,28	83,33	26,57	69,18	95,32
Maluku Utara	2,64	90,35	87,06	22,48	73,79	96,41
Papua Barat	2,15	79,76	86,11	17,00	73,14	95,88
Papua	1,97	44,6	94,53	10,78	87,26	98,34
Indonesia	1,5	83,5	88,25	28,48	73,56	96,19

Sumber: Laporan Data Indikator dan Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020 (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b). Dari Susenas 2020

Lampiran 7. Data Dimensi Pembentuk IKK Terbobot AHP.

Provinsi	Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur	Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya	IKK (Bobot Pakar dengan AHP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Aceh	61,97	70,13	71,49	63,99	63,49	66,70
Sumatera Utara	63,67	72,51	67,86	64,06	71,75	67,90
Sumatera Barat	63,83	68,28	71,12	64,15	73,91	67,65
Riau	64,49	74,48	68,21	63,38	71,68	68,57
Jambi	66,40	77,01	67,50	64,64	73,29	69,96
Sumatera Selatan	65,48	72,33	66,07	63,85	73,17	67,99
Bengkulu	64,21	70,04	70,62	62,93	68,76	67,35
Lampung	63,90	69,59	70,00	66,22	72,29	68,02
Kepulauan Bangka Belitung	65,30	72,06	69,86	68,41	71,33	69,30
Kepulauan Riau	63,04	78,00	72,62	59,79	68,01	69,10
DKI Jakarta	67,25	72,07	68,30	61,37	77,61	68,77
Jawa Barat	65,54	69,91	66,02	65,38	73,22	67,60
Jawa Tengah	67,38	65,11	73,55	68,25	72,04	68,59
DI Yogyakarta	65,66	66,11	74,18	64,09	68,75	67,51
Jawa Timur	68,18	69,49	70,46	67,68	74,51	69,53
Banten	64,34	69,51	68,90	64,22	73,86	67,66
Bali	67,39	75,67	78,59	64,11	77,21	72,39
Nusa Tenggara Barat	60,71	64,79	69,02	64,15	70,40	65,18
Nusa Tenggara Timur	55,98	63,85	69,65	64,78	61,58	63,18
Kalimantan Barat	63,26	69,93	70,96	63,53	70,44	67,47
Kalimantan Tengah	64,27	74,68	70,14	65,07	70,26	69,14
Kalimantan Selatan	63,59	72,98	70,33	65,63	72,50	68,89
Kalimantan Timur	65,39	73,92	73,70	57,93	67,84	68,31
Kalimantan Utara	61,20	70,88	74,83	61,35	68,92	67,52
Sulawesi Utara	65,98	72,82	70,73	61,29	71,70	68,56
Sulawesi Tengah	62,95	70,17	69,50	64,79	69,47	67,30
Sulawesi Selatan	62,91	68,53	71,10	64,43	70,84	67,24
Sulawesi Tenggara	58,56	67,24	73,45	63,61	63,22	65,45
Gorontalo	64,43	67,23	68,58	63,72	64,58	65,89
Sulawesi Barat	62,11	66,76	71,55	65,89	65,01	66,31
Maluku	56,83	68,69	67,35	61,05	69,20	64,38
Maluku Utara	56,84	68,43	70,37	59,59	69,14	64,65

Provinsi	Dimensi Kualitas Legalitas-Struktur	Dimensi Kualitas Ketahanan Fisik	Dimensi Kualitas Ketahanan Ekonomi	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Psikologi	Dimensi Kualitas Ketahanan Sosial-Budaya	IKK (Bobot Pakar dengan AHP)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
Papua Barat	60,61	73,01	70,85	60,43	65,71	66,67
Papua	65,24	76,73	66,35	65,59	67,07	68,91
Indonesia	65,31	69,72	69,71	65,32	72,22	68,13

Sumber: Laporan Data Indikator dan Dimensi Pembentuk IKK Tahun 2020 (Kemen PPPA-RI & BPS, 2021b). Dari Susenas 2020, Diolah.

INDEKS KUALITAS KELUARGA TAHUN 2020



ISBN 978-602-6571-50-2



9 786026 571502